MANAJEMEN PENDIDIKAN BERBASIS MULTI BUDAYA

Wahyu Bagja Sulfemi, S.S., M.Pd

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, rizki dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Bahan buku ajar ini. Adapun penyusunan diktat ini bertujuan sebagai Bahan Ajar Mata Kuliah Manajemen Pendidikan Berbasis Multi Budaya Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Muhammadiyah Bogor. Mata Kuliah Manajemen Pendidikan Berbasis Multi Budaya adalah mata kuliah wajib oleh seluruh mahasiswa dengan beban 2 sks.

Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan diktat ini tidak lepas dari bantuan dan partisipasi berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Pimpinan STKIP Muhammadiyah Bogor
2. Ketua LPPM STKIP Muhammadiyah Bogor
3. Ketua Program Studi Administrasi Pendidikan
4. Sekretaris Program Studi Administrasi Pendidikan
5. Kepada seluruh Dosen dan staf STKIP Muhammadiyah Bogor.
6. Kedua orang Tua tercinta
7. Istri dan anak tercinta
8. Mahasiswa Program Studi Administrasi Pendidikan STKIP Muhammadiyah Bogor

Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini dengan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Dalam penyusunan karya tulis ini, penulis menyadari masih ada kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang masih sifatnya membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan. Semoga diktat ini dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi banyak pihak demi kemaslahatan bersama, serta bernilai ibadah dihadapan Allah SWT. Amin

Bogor, 2 Mei 2019

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Is.....	ii
BAB I Pengertian Manajemen dan Budaya, Pendidikan dan Kebudayaan, Globalisasi dan Daya Saing Permasalahan dan Tantangan Dalam Manajemen Pendidikan dan Kebudayaan	1
A. Pengertian manajemen dan budaya.....	1
B. Budaya dan pendidikan	3
C. Hubungan pendidikan dan kebudayaan	3
D. Globalisasi dan daya saing	4
E. Permasalahan dan tantangan dalam manajemen pendidikan	6
BAB II Teori Evolusi Pendidikan di Indonesia	14
A. Teori Evolusi.....	14
B. Pendidikan Guru	14
C. Pendidikan Guru Indonesia dalam zaman Hindia Belanda: Sistem yang Segregatif.....	16
D. Pendidikan Guru Indonesia dalam Zaman Jepang : Merintis Sistem yang Egaliter	17
E. Pendidikan Guru Indonesia dalam Periode 1945-1949: Rehabilitasi Sistem.....	18
F. Pendidikan Guru Indonesia dalam Periode 1950-1965: Ekspansi Sistem	19
G. Pendidikan Guru dalam Periode Orde Baru (1966-1998): Modernisasi, Rasionalisasi dan Ambivalensi.....	20
BAB III Teori Pendidikan Dan Pembangunan Masyarakat Sekolah Dan Masyarakat Tanpa Sekolah	26
A. Teori Pendidikan dan Pembangunan Masyarakat	26
B. Masyarakat Tanpa Sekolah.....	33
BAB IV Teori budaya organisasi	40

A. Mengenal Budaya Organisasi	40
B. Mempertahankan Dan Memperbaharukan Budaya Organisasi Perubahan	43
C. Budaya Pada Organisasi Pendidikan	47
BAB V Model Community Based Development	53
A. Konsep Dasar <i>Community Based Development</i> (Pembangunan berbasis Masyarakat).....	53
B. Ciri-Ciri Pembangunan Berbasis Masyarakat (<i>Community Based Development</i>).....	53
C. Tahapan dan Metode Pembangunan Berbasis Masyarakat	54
BAB IV Model School Based Management (SBM)	62
A. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	62
B. MBS sebagai proses pemberdayaan.....	67
C. Manajemen komponen-komponen sekolah	70
D. Implementasi manajemen berbasis sekolah	70
BAB VII Model Community Learning center (CLC)	77
A. Devinisi pusat kegiatan belajar masyarakat (clc)	77
B. Fungsi pkbm	78
C. Prinsip pengembangan program pkbm	80
D. Program pkbm	82
E. Mobilisasi dan pengelolaan sumber-sumber bagi pengembangan pkbm	91
F. Kerjasama dan kemitraan	92
BAB VIII Model Coverate Sosial Responsibility (CSR)	98
A. Devinisi Coverate Sosial Responsibility	98
B. Model Coverate Sosial Responsibility	99
C. Tujuan dan saran program Coverate Sosial Responsibility	100
D. Manfaat Coverate Sosial Responsibility	101
E. Persepsi perusahaan terhadap kegiatan csr	102

F. Prinsip-prinsip tanggungjawab social perusahaan	103
G. Arti penting csr.....	106
BAB IX Model Pendidikan Berbasis Lingkungan.....	111
A. Pendidikan berbasis lingkungan	111
B. Model enviromental learning.....	113
C. Kelebihan dan kekurangan enviromental learning	114
BAB X Landasan, Konsep Dasar Dan Implementasi Pendidikan Multikultural	
Di Indonesia.....	119
A. Konsep dasar pendidikan multikultural	119
B. Pancasila sebagai landasan pendidikan multikultural	120
C. Masalah pendidikan multikultural di Indonesi.....	121
D. Implementasi pendidikan multikultural di Indonesia.....	122
BAB XI Perkembangan Pendidikan Multikultur Di Dunia	129
A. Perkembangan pendidikan	129
B. Pendidikan multikultural.....	130
C. Urgensi pendidikan multicultural.....	136
Daftar Pustaka.....	141

BAB I

Pengertian Manajemen dan Budaya, Pendidikan dan Kebudayaan, Globalisasi dan Daya Saing, Permasalahan dan Tantangan Dalam Manajemen Pendidikan dan Kebudayaan

1. Pokok Pembahasan

Pengertian manajemen dan budaya, pendidikan dan kebudayaan, globalisasi dan daya saing, permasalahan dan tantangan dalam manajemen pendidikan dan kebudayaan

2. Tujuan Pembelajaran

Agar Mahasiswa dapat memahami pengertian manajemen dan budaya, pendidikan dan kebudayaan, globalisasi dan daya saing, permasalahan dan tantangan dalam manajemen pendidikan dan kebudayaan

3. Konteks dan Isi Pembelajaran

A. Pengertian Manajemen dan Budaya

1) Pengertian Manajemen

Banyak ahli memberikan pengertian tentang manajemen. Diantaranya adalah:

- a. Menurut Marry Parker Follet, dalam buku manajemen personalia (2014:15) Yang ditulis Nurzaman Kadar, Manajemen adalah suatu seni karena untuk melakukan suatu pekerjaan melalui orang lain dibutuhkan keterampilan khusus.
- b. Menurut Harlod Koontz dan Cyrill O'Donnel, dalam buku manajemen personalia (2014:15) Yang ditulis Nurzaman Kadar, Manajemen adalah usaha untuk mencapai tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain.
- c. Menurut G.R.Teryy, dalam buku manajemen personalia (2014:15) Yang ditulis Nurzaman Kadar, mengatakan bahwa manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri atas tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang

telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

- d. Menurut Lawrence A. Appley dan Oey Liang Lee, dalam buku manajemen personalia (2014:16) Yang ditulis Nurzaman Kadar, manajemen adalah strategi memanfaatkan tenaga dan pikiran orang lain untuk melaksanakan suatu aktivitas yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam manajemen terdapat teknik-teknik yang kaya dengan estetika kepemimpinan dalam mengarahkan, memengaruhi, mengawasi, dan mengorganisasikan semua komponen yang saling menunjang untuk tercapainya tujuan.

2) Pengertian Budaya

Budaya adalah bentuk jamak dari kata budi dan daya yang berarti cinta, karsa, dan rasa. Dalam bahasa inggris, kata budaya berasal dari kata *culture*, dalam bahasa belanda diistilahkan dengan kata *culture*, dalam bahasa latin, berasal dari kata *colera*. *Colera* berarti mengolah, mengerjakan, menyuburkan, mengembangkan tanah (bertani).

Kata kebudayaan berasal dari kata *Sanskarta Buddhayanah*, ialah bentuk jamak dari budhi yang berarti budi atau akal. Kemudian kebudayaan itu diartikan: Hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal. Ada pendirian lain mengenai asal dari kata kebudayaan itu, ialah bahwa kata itu adalah suatu perkembangan dari majemuk budi-daya, artinya daya dari budi, kekuatan dari akal.

Dengan demikian, kebudayaan atau budaya menyangkut keseluruhan aspek kehidupan manusia baik material maupun non material. Sebagian besar ahli yang mengartikan kebudayaan seperti ini kemungkinan besar sangat dipengaruhi oleh *evolusionisme*, yaitu suatu teori yang mengatakan bahwa kebudayaan itu akan berkembang dari tahapan yang sederhana menuju tahapan yang lebih kompleks.

B. Kebudayaan dan Pendidikan

Pendidikan tidak pernah berlangsung dalam suatu ruangan hampa, melainkan selalu berlangsung didalam suatu masyarakat tertentu, dan untuk suatu tujuan kehidupan suatu masyarakat tertentu pula. Masyarakat dan kebudayaan merupakan dwi tunggal secara nyata dan tidak dapat dipisahkan.

Pendidikan adalah upaya yang sengaja untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan murid. Menurut sindunata (2000:197) dalam buku Pengantar Pendidikan (2014:66) untuk mewujudkan budaya itu, proses belajar menjadi hal-hal yang penting.

Menurut Koentjaraningrat, (1984) dalam buku Pengantar Pendidikan (2010:6.3) yang ditulis Wahyudin Din, dkk, Dalam arti sempit kebudayaan adalah kesenian, yaitu pikiran, karya, dan hasil karya manusia yang memenuhi hasratnya akan keindahan. Adapun dalam arti luas kebudayaan adalah seluruh total pemikiran, karya, dan hasil karya manusia yang tidak berakar kepada nalurnya karna itu hanya biasa di cetuskan oleh manusia sesudah suatu proses belajar, dengan kata lain Koentjaraningrat (1985) dalam buku Pengantar Pendidikan (2010:6.3) yang ditulis Wahyudin Din, dkk, kebudayaan itu adalah dalam keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar.

C. Hubungan Pendidikan dan Kebudayaan

Antara kebudayaan dengan pendidikan terdapat komplementer. Pertama, kebudayaan berperan sebagai masukan (input) bagi pendidikan. Contohnya, tujuan pendidikan ditentukan oleh sistem nilai yang dianut oleh masyarakat (wujud pertama kebudayaan), kurikulum dan metode pendidikan, antara lain akan ditentukan oleh nilai-nilai, norma-norma, dan gagasan-gagasan masyarakat (wujud pertama kebudayaan), serta ditentukan pula wujud kebudayaan sebagai suatu kelakuan berpola dari suatu masyarakat (wujud kedua kebudayaan), adapun wujud ketiga dalam kebudayaan (wujud fisik berupa bangunan, OHP). Akan menjadi alat

bantu dalam praktik pendidikan. Kedua, pendidikan berfungsi untuk melestarikan kebudayaan masyarakat (fungsi konservasi) dan juga berfungsi masyarakat ke arah yang lebih baik (fungsi kreasi atau inovasi).

Hal yang harus diwariskan kegenerasi muda tentunya adalah kebudayaan yang ideal sehingga kebudayaan ideal milik masyarakat menjadi lestari. Namun demikian, pendidikan tidak cukup melaksanakan fungsi konservasi saja, sebaliknya pendidikan juga harus melaksanakan fungsi inovasi dan kreasi.

D. Globalisasi dan Daya Saing

Globalisasi sering diterjemahkan 'mendunia'. Suatu entitas, betapapun, dimanapun, kapanpun, dengan cepat menyebar keseluruh pelosok dunia, baik berupa ide, gagasan, data, informasi, produksi, pembangunan, pemberontakan, sabotase, dan sebagiannya, begitu disampaikan, saat itu pula diketahui semua orang diseluruh dunia. Globalisasi selain menghadirkan ruang positif untuk hidup mudah, nyaman, murah, indah, dan maju, tetapi juga menghadirkan keresahan, penderitaan, penyesatan. Globalisasi menawarkan banyak pilihan dan kebebasan yang bersifat pribadi. Pendek kata dewasa ini telah terjadi banjir pilihan dan peluang, terserah kompetensi seseorang untuk memilikinya.

Proses globalisasi nampaknya tidak dapat diabaikan oleh setiap masyarakat dan bangsa di dunia ini. Pembangunan nasional sebuah bangsa tidak hanya melihat kebutuhan internal masyarakat dan bangsa itu sendiri tetapi juga pembangunan harus melihat keluar dan kedepan serta perlu dijalani dengan bangsa lain, karena masyarakat dan bangsa kita adalah bagian dari suatu masyarakat dunia yang semakin maju dan menyatu. Globalisasi merupakan kenyataan hidup bahkan suatu kesadaran baru bagi setiap manusia di bumi ini. Globalisasi telah menimbulkan gaya dan semakin merebak merasuki kehidupan-kehidupan yang dulunya terisolasi. Kekuatan globalisasi menurut analisis para ahli pada umumnya bertumpuh pada 4 kekuatan global, yaitu:

- 1) Kemajuan iptek terutama dalam bidang informasi dan inovasi-inovasi baru didalam teknologi yang mempermudah kehidupan manusia.
- 2) Perdagangan bebas yang ditunjang oleh kemajuan iptek.
- 3) Kerja sama regional dan internasional yang telah menyatukan kehidupan berusaha dari bangsa-bangsa tanpa mengenal batas Negara.
- 4) Meningkatnya kesadaran terhadap hak-hak asasi manusia didalam kehidupan bersama, dan sejalan dengan itu semakin meningkatnya kesadaran bersama dalam alam demokrasi.

Kemajuan ilmu pengetahuan teknologi yang disertai dengan semakin kencangnya arus globalisasi dunia membawa dampak tersendiri bagi dunia pendidikan. Sebagian contoh; banyak sekolah di Indonesia dalam beberapa tahun ini mulai melakukan globalisai dalam system pendidikan internal sekolah. Hal ini terlihat dari pada sekolah-sekolah yang dikenal dengan *bilingual school*, dengan diterapkannya bahasa asing seperti bahasa inggris dan bahasa mandarin sebagai mata ajar wajib sekolah. Globalisasi pendidikan dilakukan untuk menjawab kebutuhan pasar akan tenaga kerja berkualitas yang semakin ketat. Dengan globalisai pendidikan diharapkan tenaga kerja Indonesia dapat bersaing dipasar dunia.

Dampak Positif Globalisai Pendidikan:

- a. Akan semakin mudahnya akses informasi.
- b. Globalisai dalam pendidikan akan menciptakan manusia yang profesional dan berstandar internasional dalam bidang pendidikan.
- c. Globalisai akan membawa dunia pendidikan Indonesia bias bersaing dengan Negara-negara lain.
- d. Globalisasi akan menciptakan tenaga kerja yang berkualitas dan mampu bersaing.
- e. Adanya perubahan struktur dan system pendidikan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan perkembangan ilmu yang sangat pesat.

Dampak Negatif Globalisasi Pendidikan:

- 1) Dunia pendidikan Indonesia biasa dikuasai oleh para pemilik modal. Dunia pendidikan akan sangat tergantung pada teknologi, yang berdampak munculnya tradisi serba instan.”
- 2) Globalisasi akan melahirkan suatu golongan-golongan didalam dunia pendidikan. Akan semakin terkikisnya kebudayaan bangsa akibat masuknya budaya dari luar.
- 3) Globalisasi dunia pendidikan mampu memaksas liberalisasi berbagi sektor yang dulunya non-komersial menjadi komoditas dalam pasar yang baru.
- 4) Globalisasi mengakibatkan melonggarnya kekuatan kontrol pendidikan oleh Negara. Mengacu ke standar internasional, dan bahasa inggris menjadi sangat penting sebagai komunikasi, supaya bisa bersaing.

E. Permasalahan dan Tantangan dalam Manajemen Pendidikan dan Kebudayaan

Permasalahan pendidikan semakin besarnya tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini dan masa depan, dunia yang mengalami perubahan-perubahan yang kian kompleks bahkan rasanya berlari semakin cepat, dan sangat sulit diramalkan mengharuskan bangsa kita ini terus melangkah beriringan, maju kedepan atau kalau perlu mendahului pergerakan zaman. Kalau tidak, seperti yang sudah terjadi saat ini terkaget-kaget dalam menghadapi perubahan global khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu salah satu agenda terpenting yang harus diperhatikan bangsa Indonesia sekarang adalah membenahi dunia pendidikan, jika ingin menjadi bangsa yang besar dan memimpin peradaban.

Pada dasarnya kita juga bergerak, tetapi seperti yang kita ketahui bersama betapa lambatnya kemajuan pendidikan di Negara kita ini bahkan dibeberapa hal kita justru mundur kebelakang adalah:

Pertama, kita hanya sering membicarakan masalah-masalah pendidikan saja, akan tetapi nasib pendidikan di Negara ini belum

terselesaikan dan bahkan semakin terpuruk karena terlalu banyak yang dibicarakan tidak terkait dengan substansi pendidikan itu sendiri. Tetapi tidak mengkaji kembali system pendidikan yang sudah ada.

Kedua, kurang optimalnya pelaksanaan sistem pendidikan (yang sebenarnya sudah cukup baik) di Indonesia. Sebenarnya kurikulum di Indonesia tidaklah kalah dari kurikulum di Negara maju, tetapi pelaksanaannya yang masih jauh dari optimal. Implementasi pendidikan yang kurang benar.

Ketiga, pendidikan di Negara kita belum mampu mengembangkan intelektual serta pengetahuan secara komprehensif. Kegiatan pembelajaran hanya sekedar menekankan pada kompetensi akademik (*learning how to learn*) ditambah lagi seringnya sistem pendidikan yang dirubah tergantung kondisi politik.

Kempat, penerapan ujian nasional dijadikan tolak ukur keberhasilan pendidikan. Karena dengan diterapkannya standart tersebut, siswa justru harus dibebani dengan kepadatan materi yang tidak banyak membuka ruang diskusi, perdebatan, polemik dan kebebasan berpendapat dan banyak juga sekolah berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara akademik saja sehingga bahan pelajaran yang sudah dipecahkan hanya tinggal dihafal saja dan tidak diberi dorongan melakukan pencarian dan juga adanya dominasi peran guru yang tidak memberi hak kepada siswa anak didik hanya dianggap seperti bejana kosong yang ditumpahi air.

Kelima, masih banyaknya sekolah belum melaksanakan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah dengan benar.

Keenam, sering sekali bahan pelajaran yang diajarkan kepada murid secara terpisah dan tidak memiliki kaitan historis dengan kenyataan sosial yang dialami siswa.

Ketujuh, Pendidikan hanya dijadikan sebagai “ faktor pelengkap” atau “dokumen tanpa makna” sehingga sering terjadi tujuan yang ditetapkan tidak tercapai secara optimal.

Menurut Fikse (1996) dalam buku Manajemen Pendidikan Global visi, aksi, & adaptasi (2009:125) yang ditulis Idrus Ali, menyatakan bahwa berdasarkan pengalaman berbagai negara sedang berkembang yang menerapkan otonomi di bidang Pendidikan, otonomi berpotensi memunculkan masalah: pembenturan kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah, menurunnya mutu Pendidikan, inefisiensi dalam pengelolaan Pendidikan, ketimpangan dalam pemerataan Pendidikan, terbatasnya gerak dan ruang partisipasi masyarakat dalam pendidikan, serta berkurangnya tuntutan akuntabilitas Pendidikan oleh pemerintah serta meningkatnya akuntabilitas Pendidikan oleh masyarakat.

Kebudayaan mempunyai sifat stabil atau konstan dan juga berubah. Stabil dalam arti beberapa elemennya seperti bahasa, hukum berlanjutan terus tanpa perubahan besar selama waktu yang panjang. Berubah karena elemen-elemen kebudayaan baik secara perlahan dan mungkin secara tiba-tiba mengalami penggantian penambahan atau pengurangan. Para antropolog mengemukakan 3 proses utama dalam perubahan kebudayaan. Ketiga jenis proses perubahan kebudayaan yang dimaksud adalah original, difusi, dan reinterpretasi. Original adalah penemuan elemen-elemen baru dalam suatu kebudayaan. Difusi adalah peminjaman elemen-elemen kebudayaan baru dari kebudayaan lain. Adapun reinterpretasi adalah modifikasi elemen-elemen budaya yang ada untuk memenuhi tuntutan zaman.

Perubahan-perubahan yang terjadi dalam kebudayaan masyarakat terkadang menimbulkan apa yang disebut *Cultural Lag* atau kesenjangan budaya. Di dalam masyarakat, misalnya kita dapat melihat cepatnya perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi, sementara nilai-nilai takhayul tertentu sebagaimana sering ditayangkan di televisi, atau kepercayaan terhadap perdukunan masih dianut oleh sebagian masyarakat. Perkembangan teknologi komunikasi informasi begitu canggih, promosi produk industri menjadi efektif melalui teknologi tersebut. Sementara nilai-nilai tertentu terabaikan.

4. Latihan Soal

A. Pilihan Ganda

- 1) Manajemen adalah usaha untuk mencapai tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain, dalam definisi manajemen diatas ini, definisi menurut ...
 - a. Lawrence A. Appleby dan Oeyliang Lee (2014:16)
 - b. Marry Parker Follet (2014:15)
 - c. Harlod Koontz dan Cyrillo' Donnel (2014:15)
 - d. G.R. Terry (2014:15)
- 2) Budaya adalah bentuk jamak dari kata budi yang berarti cinta, karsa, dan rasa. Dalam Bahasa Inggris budaya berasal dari kata ...
 - a. Colera
 - b. Culture
 - c. Traditional
 - d. Semua salah
- 3) Kebudayaan itu adalah keseluruhan system gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Definisi diatas merupakan definisi kebudayaan menurut...
 - a. Koentjaraningrat (1985)
 - b. Sindunata (2000:197)
 - c. G.R. Terry (2014:15)
 - d. Marry Parker Follet (2014:15)
- 4) Yang termasuk kekuatan globalisasi analisis menurut para ahli yaitu...
 - a. Kemajuan iptek terutama dalam bidang informasi dan inovasi-inovasi baru didalam teknologi yang mempermudah kehidupan manusia
 - b. Perdagangan bebas yang ditunjang oleh kemajuan iptek
 - c. Kerjasama regional dan internasional yang telah menyatukan kehidupan berusaha dari bangsa-bangsa tanpa mengenal batas negara
 - d. Semua jawaban diatas termasuk analisis global menurut para ahli

- 5) Yang tidak termasuk dalam dampak positif globalisasi Pendidikan...
- a. Akan mudahnya akses informasi
 - b. Globalisasi akan membawa dunia Pendidikan Indonesia bias bersaing dengan negara-negara lain.
 - c. Globalisasi akan melahirkan golongan-golongan didalam dunia Pendidikan. Akan semakin terkikisnya kebudayaan bangsa akibat masuknya budaya dari luar.
 - d. Globalisasi akan menciptakan tenaga kerja yang berkualitas dan mampu bersaing
- 6) Yang termasuk dalam dampak negative globalisasi Pendidikan...
- a. Globalisasi akan melahirkan golongan-golongan didalam dunia Pendidikan, akan semakin terkikisnya kebudayaan bangsa akibat masuknya budaya dari luar
 - b. Globalisasi akan menciptakan tenaga kerja yang berkualitas dan mampu bersaing
 - c. Globalisasi akan membawa dunia Pendidikan Indonesia biar bersaing dengan negara-negara lain
 - d. Akan mudahnya akses informasi
- 7) Cultural Lag adalah...
- a. Kesenjangan budaya
 - b. Kebudayaan yang mmenyimpang
 - c. Kebudayaan yang bertentangan dengan kebutuhan masyarakat
 - d. Produk dari teknologi
- 8) Pendidikan sebagai pranata kebudayaan artinya ...
- a. Ada hubungan antara kebudayaan dan pendidikan
 - b. Pola perilaku manusia yang mengacu kepada sistem nilai, gagasan, dan aturan-aturan
 - c. Membentuk tinngkah laku manusia yang ideal
 - d. Pendidikan adalah bagian dari hasil kebudayaan
- 9) Hubungan kebudayaan dan pendidikan yang tepat adalah ...
- a. Berperan sebagai masukan bagi pendidik
 - b. Menata masyarakat

- c. Bagian dari pendidikan
 - d. Dua hal yang tidak berkaitan
- 10) Karakteristik kebudayaan terdiri dari, kecuali ...
- a. Organik dan super organik
 - b. Ideal dan aktual
 - c. Dihasilkan oleh manusia
 - d. Stabil dan berubah

B. Essay

- 1) Apa pengertian dari manajemen menurut G.R. terry?
- 2) Menurut koentjaningrat apa arti dari kebudayaaan itu?
- 3) Hubungan antara kebudayaan dan pendidikan itu terdapat adanya komplementer. Jelaskan!
- 4) Apa saja empat kekuatan dari dari globalisasi?
- 5) Dampak negatif apa yang di didapat dari sebuah globalisasi dalam pendidikan?

Jawaban Soal

A. Pilihan Ganda

- 1) C
- 2) B
- 3) A
- 4) D
- 5) C
- 6) A
- 7) A
- 8) B
- 9) A
- 10) C

B. Essay

- 1) Menurut G.R.Teryy, dalam buku manajemen personalia (2014:15) yang ditulis Nurzaman Kadar, mengatakan bahwa manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri atas tindakan perencanaan,

pengorganisasian, pergerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

- 2) Dalam arti sempit kebudayaan adalah kesenian, yaitu pikiran, karya, dan hasil karya manusia yang memenuhi hasratnya akan keindahan. Adapun dalam arti luas kebudayaan adalah seluruh total pemikiran, karya, dan hasil karya manusia yang tidak berakar kepada nalurinya karena itu hanya biasa di cetuskan oleh manusia sesudah suatu proses belajar, dengan kata lain Koentjaraningrat (1985) dalam buku Pengantar Pendidikan (2010:6.3) yang ditulis Triwiyanto Teguh, kebudayaan itu adalah dalam keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar.
- 3) Pertama, kebudayaan berperan sebagai masukan (input) bagi pendidikan. Contohnya, tujuan pendidikan ditentukan oleh sistem nilai yang dianut oleh masyarakat (wujud pertama kebudayaan), kurikulum dan metode pendidikan, antara lain akan ditentukan oleh nilai-nilai, norma-norma, dan gagasan-gagasan masyarakat (wujud pertama kebudayaan), serta ditentukan pula wujud kebudayaan sebagai suatu kelakuan berpola dari suatu masyarakat (wujud kedua kebudayaan), adapun wujud ketiga dalam kebudayaan (wujud fisik berupa bangunan, OHP). Akan menjadi alat bantu dalam praktik pendidikan. Kedua, pendidikan berfungsi untuk melestarikan kebudayaan masyarakat (fungsi konservasi) dan juga berfungsi masyarakat ke arah yang lebih baik (fungsi kreasi atau inovasi).
- 4) Empat kekuatan global, yaitu:
 1. Kemajuan iptek terutama dalam bidang informasi dan inovasi-inovasi baru didalam teknologi yang mempermudah kehidupan manusia.
 2. Perdagangan bebas yang ditunjang oleh kemajuan iptek.

3. Kerja sama regional dan internasional yang telah menyatukan kehidupan berusaha dari bangsa-bangsa tanpa mengenal batas Negara.
 4. Meningkatnya kesadaran terhadap hak-hak asasi manusia didalam kehidupan bersama, dan sejalan dengan itu semakin meningkatnya kesadaran bersama dalam alam demokrasi.
- 5) Dampak negatif dari globalisasi dalam pendidikan, antara lain :
- a. Dunia pendidikan Indonesia bisa dikuasai oleh para pemilik modal. Dunia pendidikan akan sangat tergantung pada teknologi, yang berdampak munculnya tradisi serba instan.
 - b. Globalisasi akan melahirkan suatu golongan-golongan didalam dunia pendidikan. Akan semakin terkikisnya kebudayaan bangsa akibat masuknya budaya dari luar.
 - c. Globalisasi dunia pendidikan mampu memaksa liberalisasi berbagi sektor yang dulunya non-komersial menjadi komoditas dalam pasar yang baru.
 - d. Globalisasi mengakibatkan melonggarnya kekuatan kontrol pendidikan oleh Negara. Mengacu ke standar internasional, dan bahasa Inggris menjadi sangat penting sebagai komunikasi, supaya bisa bersaing.

BAB II

Teori Evolusi Pendidikan di Indonesia

1. Kompetensi Pembelajaran

Teori Evolusi Pendidikan di Indonesia

2. Tujuan Pembelajaran

Mahasiswa dapat mengetahui Teori Evolusi Pendidikan di Indonesia

3. Materi Pembahasan

A. Teori Evolusi

Evolusi adalah proses perubahan secara berangsur – angsur (bertingkat) di mana sesuatu berubah menjadi bentuk lain (yang biasanya) menjadi lebih kompleks / rumit ataupun berubah menjadi bentuk yang lebih baik.

Evolusi berarti perubahan frekuensi gen dalam suatu populasi. Akumulasi perubahan gen ini menyebabkan terjadinya perubahan pada makhluk hidup. Peradaban merupakan tahapan dari evolusi budaya yang telah berjalan bertahap dan berkesinambungan, memperhatikan karakter yang khas pada tahap tersebut, yang dicirikan oleh kualitas tertentu dari unsur budaya yang menonjol, meliputi tingkat ilmu pengetahuan, seni teknologi dan spiritualitas yang tinggi. (Hermianto,2011:75).

B. Pendidikan Guru

Bagi kehidupan umat manusia, pendidikan merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Tanpa pendidikan, mustahil suatu kelompok manusia dapat hidup dan berkembang sejalan dengan aspirasi (cita-cita) untuk maju, sejahtera dan bahagia menurut konsep pandangan hidup mereka. (Choirul Mahfud,2016:32)

Evolusi pendidikan guru di indonesia, khususnya perkembangan dalam cara berbagai lembaga pendidikan guru di masa lampau mempersiapkan siswa-siswa mereka untuk menjadi ”guru yang kompeten”. Jadi yang ditelusuri ialah perkembangan konsep “kompetensi mengajar” (*Teaching competence*) dan bagaimana konsep ini diterjemahkan menjadi

program pendidikan dalam sekolah guru. Dengan mempergunakan jargon masa kini dapat dikatakan, bahwa buku ini mencoba menelusuri bagaimana “profesionalisasi” di lembaga pendidikan guru berkembang dari waktu ke waktu.

Kweekschool adalah sekolah guru pertama yang didirikan oleh pemerintah hindia belanda pada tahun 1852, sedangkan IKIP (Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan) adalah lembaga pendidikan guru pertama pada jenjang Perguruan Tinggi yang didirikan oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1954.

Perjalanan dari *kweekschool* sampai ke IKIP merupakan perjalanan yang cukup panjang. Selama kurun waktu ini sistem pendidikan guru indonesia mengalami berbagai perubahan, termasuk perubahan dalam cara bagaimana para siswa dipersiapkan menjadi guru-guru yang kompeten. Untuk keperluan analisis sejarah pertumbuhan yang panjang ini dibagi menjadi tiga fase, yaitu (1) Fase zaman Hindia Belanda (2) Fase zaman Jepang dan (3) Fase zaman Kemerdekaan.

Fase terakhir ini Fase zaman Kemerdekaan merupakan suatu fase yang sangat dimanis, dan selama fase ini terjadi empat jenis perkembangan dalam diri sistem pendidikan guru Indonesia, dapat disebut dengan istilah Rehabilitasi, Ekspansi, Modernisasi dan Ambivalensi atau keragu-raguan.

Selama **Masa Rehabilitasi** telah dilakukan langkah-langkah untuk memulihkan kembali kondisi sistem pendidikan guru Indonesia, yang selama pada zaman pendudukan jepang mengalami penyederhanaan yang sangat drastis. Fase ini berlangsung dari 1945-1949. Selama **Masa Ekspansi** dilakukan penambahan sekolah-sekolah guru di seluruh Indonesia, mulai dari sekolah guru yang paling bawah, yaitu KPKPKB (Kursus Pengantar untuk Pengajar Kewajiban Belajar), sampai ke pendidikan guru jenjang perguruan tinggi, yaitu PTPG/IKIP. Periode ini berlangsung dari 1950-1965. Dalam **masa modernisasi** dilaksanakan langkah-langkah untuk memutakhirkan (*updating*) kondisi pendidikan guru di Indonesia, dengan memperkenalkan antara lain, metode-metode

pembelajaran terbaru beserta perlengkapan-perengkapan teknologinya. Melalui langkah-langkah modernisasi ini pendididkan guru di Indonesia berusaha mengejar ketinggalannya dari negara-negara tetangga, terutama Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Periode ini berangsur dari 1966 sampai kira-kira 1987. Dan akhirnya selama **Masa Ambivalensi** terjadi beberapa perubahan yang pada dasarnya memperlihatkan keraguan lembaga pendidikan guru mengenai identitas diri yang sebenarnya. Ada dua jenis identitas yang seolah-olah merobek lembaga pendidikan guru menjadi dua lembaga yang saling bersaing, yaitu pertama identitasnya sebagai perguruan tinggi dengan fungsi khususnya untuk mempersiapkan calon-calon guru, dan kedua identitasnya sebagai perguruan tinggi yang tugas utamanya ialah mengembangkan ilmu pengetahuan, terutama ilmu pendidikan (Mochtar Buchori, 2009:1-4).

C. Pendidikan Guru Indonesia dalam zaman Hindia Belanda: Sistem yang Segregatif

Sampai dengan tahun 1942, yaitu akhir zaman Hindia Belanda, untuk orang Indonesia yang ingin menjadi guru terdapat dua jenis sekolah guru, yaitu sekolah guru untuk mereka yang akan mengajar di sekolah rendah pribumi dengan bahasa pengantar Bahasa Belanda, dan sekolah guru untuk mereka yang akan menjadi guru pada sekolah rendah pribumi yang bahasa pengantarnya ialah salah satu dari bahasa-bahasa daerah (Jawa, Sunda, Melayu atau Bugis). Sekolah rendah jenis pertama mula-mula disebut Sekolah Pribumi Kelas I (*Eerste Inlandsche School*). Kemudian sekolah ini disebut dengan nama *hollandsch inlandsche school* (*H.I.S.*). Sekolah rendah jenis kedua di sebut dengan nama sekolah pribumi kelas II (*tweede inlandsche School*), atau *standaard school*.

Kedua jenis sekolah ini memiliki susunan yang berjenjang. Artinya ada bagian yang terletak di jenjang bawah, dan ada pula bagian yang terletak di jenjang atas. Untuk sekolah guru bagi sekolah rendah berbahasa pengantar Bahasa Belanda, pada jenjang terbawah terdapat *kweekschool*, dan pada jenjang di atasnya, terdapat *Hogere Kweekschool*, yang artinya

sekolah guru yang lebih tinggi. Kata Belanda “ *Kweekschool*” berarti “ sekolah pembibitan” atau “ sekolah persemaian”. Artinya di sekolah ini di tanamkan atau di semaiakan bibit-bibit guru. Lama studi di *Kweekschool* ini 4 tahun (Mochtar Buchori,2009:12).

D. Pendidikan Guru Indonesia dalam Zaman Jepang : Merintis Sistem yang Egaliter

Pemerintah Hindia Belanda menyerah kepada bala tentara kerajaan Jepang pada 9 Maret 1942, dan Pemerintah Militer Jepang berkuasa di Indonesia sampai 17 Agustus 1945. Jadi Jepang berkuasa di Indonesia selama 3 tahun, 5 bulan, dan 8 hari. Dalam jangka waktu yang pendek ini tentara ke-16 (*the 16th army*) dari tentara kerajaan Jepang di bawah pimpinan Letnan Jendral Hitoshi Imamura membentuk Pemerintahan Militer Jepang untuk seluruh kawasan bekas Hindia Belanda, kecuali *Nederlands-Nieuw-Guinea* (Irian Barat). (Mochtar Buchori,2009:25)

Pemerintahan Militer Jepang memutuskan untuk memulihkan kehidupan sehari-hari secepat mungkin. Keputusan ini dilaksanakan antara lain dengan membuka kembali berbagai pelayanan umum, seperti hubungan kereta api antar-kota, pelayanan pos, telepon, telegram dan penyelenggaraan pendidikan. Ini di lakukan dengan membuka kembali sekolah sekolah yang di tutup pada waktu tentara jepang mulai menduduk daerah-daerah indonesia, sekolah-sekolah pemerintah dibuka secara otomatis, tanpa harus melalui prosedur-prosedur birokrasi yang berliku-liku. Tetapi untuk sekolah-sekolah swasta diperlukan izin dari Pemerintahan Militer Jepang. Ada perguruan swasta yang boleh dibuka kembali, tetapi ada pula yang tidak boleh dibuka kembali (Mochtar Buchori,2009:26).

Pembukaan kembali sekolah-sekolah di Jawa merupakan bagian dari program jangka panjang Pemerintahan Militer Jepang untuk menguasai Indonesia. Ada dua bidang kehidupan di Indonesia yang ditetapkan oleh pemerintah militer jepang untuk digarap dengan skema jangka panjang, yaitu bidang budaya dan bidang pendidikan. Di samping

program-program jangka panjang, Pemerintah Militer Jepang juga telah mempersiapkan serangkaian program jangka pendek. Program-program jangka pendek ini mempunyai berbagai tujuan, antara lain :

- 1) Merebut simpati penduduk, terutama kaum cendekiawan
- 2) Merebut simpati dari umat Islam Indonesia
- 3) Membentuk jaringan pengamatan negara sampai ketingkat RT
- 4) Mempersiapkan sistem pertahanan untuk membantu tentara jepang bila tentara sekutu sampai menyerang indonesia
- 5) Mobilisasi rakyat untuk melaksanakan proyek-proyek militer jepang (Proyek kerja paksa atau *Roomusha*).

Antara proyek-proyek jangka panjang dengan proyek-proyek jangka pendek harus diadakan koordinasi. Untuk mencapai tujuan ini program pendidikan sekolah harus “bersentuhan” atau “ bersinggungan” dengan program-program pembinaan masyarakat yang dilaksanakan di luar sekolah. Salah satu akibat dari kebijaksanaan ini ialah bahwa kehidupan di sekolah tidak boleh bersifat terlalu intelektualistik. Semua program pendidikan harus lebih bersifat praktis dan segera dapat dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat (Mochtar Buchori,2009:26-27).

E. Pendidikan Guru Indonesia dalam Periode 1945-1949: Rehabilitasi Sistem

Sistem pendidikan guru yang selama zaman jepang mengalami penyederhanaan yang cukup drastis, segera direhabilitasi dan dikembangkan. Secara fisik tidak banyak yang dapat dilakukan dalam periode yang pendek ini untuk merehabilitasi sistem pendidikan guru secara keseluruhan. Dengan keadaan yang serba sulit ini kementrian P.P. dan K memutuskan untuk mengembangkan tiga jenis sekolah guru untuk mendidik calon-calon guru SD, yaitu Sekolah Guru C (SGC), Sekolah Guru B (SGB), dan Sekolah Guru A (SGA).

Kehadiran SGB dalam sistem pendidikan guru dilakukan dengan melanjutkan SGL (Sekolah Guru Laki-laki) dan SGP (Sekolah Guru Perempuan) yang ada dalam zaman Jepang, kemudian diberi nama baru:

Sekolah Guru B. Sedangkan SGA dihadirkan ke dalam masyarakat dengan membuka sekolah guru baru yang murid-muridnya adalah tamatan SGB atau SMP. Sekolah Guru C (SGC) tidak dapat segera dibuka, karena adanya keberatan dari pihak Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), yang berpendapat bahwa guru SD hendaknya paling tidak dididik selama 4 tahun setelah tamat sekolah rakyat (Mochtar Buchori,2009:50).

Dalam periode ini munculnya gagasan-gagasan yang sangat fundamental mengenai watak pendidikan baru yang harus dibangun untuk sekolah-sekolah dalam zaman kemerdekaan. Para pemimpin politik dan pemuka-pemuka pendidikan menyadari, bahwa untuk menciptakan masyarakat dan pandangan hidup yang mampu menompang cita-cita kemerdekaan yang sangat menggelora pada waktu itu, diperlukan sistem pendidikan yang baru. Sistem pendidikan yang lama, pada dasarnya bersifat kolonialistik dan feodalistik dipandang tidak akan dapat mengembangkan pada diri generasi muda sifat-sifat pribadi serta watak bangsa yang dibutuhkan oleh suatu negara dan bangsa merdeka (Mochtar Buchori,2009:53).

Pada periode ini juga diselenggarakannya Kongres Pendidikan Antar Indonesia pada Bulan Oktober 1949. Pada bulan Juni 1949 konflik militer antara Republik Indonesia dengan Pemerintahan Hindia Belanda pasca Perang Dunia II diakhiri melalui suatu kesepakatan untuk mengadakan gencatan senjata. Presiden Soekarno dan Wakilnya beserta pemimpin-pemimpin Indonesia lainnya dipulangkan ke Yogyakarta dari tempat pembuangan masing-masing (Mochtar Buchori,2009:67).

F. Pendidikan Guru Indonesia dalam Periode 1950-1965: Ekspansi Sistem

Tahun 1950 dipandang sebagai permulaan dari zaman normal bagi kehidupan dalam Republik Indonesia. Pada tahun ini pemerintahan dapat berjalan dengan tenang, tanpa gangguan yang berarti dari manapun. Kementrian P.P. dan K mulai dapat melakukan pembenahan secara fisik

terhadap sistem pendidikan Indonesia termasuk sistem pendidikan gurunya (Mochtar Buchori,2009:78).

Menurut Mochtar Buchori (2009:84) pada permulaan 1950, ketika bentuk negara Indonesia masih berupa Republik Indonesia Serikat (RIS) untuk membangun kembali sistem pendidikan untuk seluruh wilayah Indonesia, harus diadakan persetujuan kerjasama antara Pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan Pemerintah Republik Indonesia. Atas dasar persetujuan ini dibentuklah suatu panitia bersama dari Kementrian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan RIS (PPK-RIS) dan Kementrian Pendidikan, Kebudayaan RI (PPK-RI).

G. Pendidikan Guru dalam Periode Orde Baru (1966-1998): Modernisasi, Rasionalisasi dan Ambivalensi

Pada zaman ini soal biaya pendidikan merupakan soal yang tidak mudah diselesaikan, dan turut menjadi penghambat bagi tercapainya tujuan menyebarluaskan kesempatan pendidikan secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Salah satu cara yang ditempuh Pemerintah dalam hal ini ialah pendirian “SD InPres”, akronim dari istilah “SD Instruksi Presiden”, yaitu SD yang didirikan bukan atas rencana Pemerintah Daerah atau Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, melainkan SD yang didirikan atas instruksi presiden. SD InPres ini didirikan di berbagai tempat. Dalam sistem ini masyarakat setempat menyediakan lahan dan Pemerintah Pusat menyediakan bangunan sekolahnya.

Pemerintah Orde Baru memperhatikan dua hal untuk meningkatkan mutu pendidikan ini, yaitu meningkatkan mutu-mutu sekolah keguruan untuk memenuhi tuntutan pembangunan dalam jangka pendek, kedua meningkatkan mutu pendidikan umum untuk memenuhi tuntutan pembangunan jangka panjang.

Hal yang dilakukan pada zaman Orde Baru ini ialah:

- 1) Peningkatan Mutu Pendidikan Keguruan

- 2) Peningkatan Mutu Pendidikan Umum
- 3) Pembaharuan Kurikulum
- 4) Pembangunan di bidang Pendidikan Guru pra-jabatan (Mochtar Buchori,2009:123-124)

Dalam sistem yang baru ini ditentukan, bahwa calon guru-guru TK dan SD dipersiapkan melalui program pendidikan guru D-II. Calon-calon guru SLTP dipersiapkan melalui program pendidikan guru D-III, sedangkan calon guru-guru SLTA dipersiapkan melalui Program pendidikan guru S-I dan S-II.

Pada tahun 1963 antara Pihak Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada satu pihak dengan pihak Departemen Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) pada pihak yang lainnya. Adanya persoalan dalam hal ini diselesaikan melalui suatu kompromi, yaitu dengan dileburnya FKIP dan IPG menjadi IKIP. Pada tahun 1989 diputuskan, semua pendidikan keguruan yang bersifat pra-jabatan diselenggarakan pada jenjang perguruan tinggi (Mochtar Buchori,2009:137).

Keputusan tentang pemusatan pengelolaan pendidikan keguruan pra-jabatan pada pihak Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi telah menimbulkan reaksi yang bersifat ambivalent dalam masyarakat pendidikan di Indonesia. Ada pihak-pihak yang senang, tetapi ada pula pihak-pihak yang kurang senang atau kecewa (Mochtar Buchori,2009:139).

4. Latihan Soal:

A. Pilihan Ganda

- 1) Sekolah Guru pertama yang didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1852 adalah...
 - a. Eurospeesch Lagere
 - b. Kweekschool
 - c. Hollandsch
 - d. Meer Uitgebreid Lager
 - e. Algemeene

- 2) Lembaga Pendidikan Guru pertama pada jenjang Perguruan Tinggi yang didirikan oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1954 adalah...
 - a. Coursus voor Volksschool
 - b. Middelbaar Onderwijs
 - c. PTPG
 - d. IKIP
 - e. LPTK
- 3) Sistem pendidikan guru pada masa itu terbagi menjadi beberapa Fase yaitu, Kecuali...
 - a. Fase zaman Hindia Belanda
 - b. Fase zaman Jepang
 - c. Fase zaman Kemerdekaan (1950-1965)
 - d. Fase zaman Kemerdekaan (1966-1998)
 - e. Fase zaman Kemerdekaan (1998-1999)
- 4) Ada empat jenis perkembangan dalam diri Sistem Pendidikan Guru Indonesia ialah, Kecuali...
 - a. Rehabilitasi
 - b. Zonasi
 - c. Ekspansi
 - d. Modernisasi
 - e. Ambivalensi
- 5) Apa Kepanjangan dari HIS...
 - a. *Holistik Inlandsche School*
 - b. *Hamburde Inlandsche School*
 - c. *Hollandsch Inlandsche School*
 - d. *Hoogere Inlandsche School*
 - e. *Hoogwart Include School*
- 6) Apa arti dari Kweekschool dalam Bahasa Belanda...
 - a. Sekolah Pembibitan
 - b. Sekolah Persatuan
 - c. Sekolah Gabungan

- d. Sekolah Kemitraan
 - e. Sekolah Menengah
- 7) Kapan diselenggarakannya Kongres Pendidikan Antar Indonesia...
- a. Juni 1949
 - b. Oktober 1949
 - c. Agustus 1949
 - d. Oktober 1948
 - e. Agustus 1948
- 8) Untuk mengatasi masalah pendidikan pada zaman Orde Baru (1966-1998) pemerintah mendirikan sekolah dasar yaitu...
- a. SD Satu
 - b. SD Berprestasi
 - c. SD Lokal
 - d. SD Embryo
 - e. SD InPres
- 9) Berapa lama studi yang harus ditempuh pada Kweekschool...
- a. 3 tahun
 - b. 4 tahun
 - c. 5 tahun
 - d. 6 tahun
 - e. 7 tahun
- 10) Pada tahun berapa Rehabilitasi Sistem Pendidikan mulai dilakukan...
- a. 1941
 - b. 1942
 - c. 1945
 - d. 1950
 - e. 1952

B. Essay

- 1) Pendidikan Guru Indonesia dalam zaman Hindia Belanda guru untuk mereka yang akan menjadi guru pada sekolah rendah pribumi yang bahasa pengantarnya ialah...

- 2) Program-program jangka pendek apa saja yang mempunyai tujuan pada zaman Pemerintahan Jepang adalah...
- 3) Hal apa saja yang sudah dilakukan pada zaman Orde Baru (1966-1998)...
- 4) Keputusan apa yang menimbulkan reaksi yang bersifat ambivalent dalam masyarakat pendidikan di Indonesia...
- 5) Masa Rehabilitasi terjadi pada Tahun...

Jawaban:

A. Pilihan Ganda

- 1) B
- 2) D
- 3) E
- 4) B
- 5) C
- 6) A
- 7) B
- 8) E
- 9) B
- 10) C

B. Essay

- 1) Salah satunya dari bahasa-bahasa daerah (Jawa, Sunda, Melayu atau Bugis)
- 2) Program-program jangka pendek zaman Pemerintahan Jepang adalah:
 - Merebut simpati penduduk, terutama kaum cendekiawan
 - Merebut simpati dari umat Islam Indonesia
 - Membentuk jaringan pengamatan negara sampai ketingkat RT
 - Mempersiapkan sistem pertahanan untuk membantu tentara jepang bila tentara sekutu sampai menyerang indonesia
 - Mobilisasi rakyat untuk melaksanakan proyek-proyek militer jepang (Proyek kerja paksa atau Roomusha).
- 3) Hal yang sudah dilakukan pada zaman Orde Baru (1966-1998)

- Peningkatan Mutu Pendidikan Keguruan
 - Peningkatan Mutu Pendidikan Umum
 - Pembaharuan Kurikulum
 - Pembangunan di bidang Pendidikan Guru pra-jabatan
- 4) Keputusan tentang pemusatan pengelolaan pendidikan keguruan pra-jabatan pada pihak Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi
- 5) 1945-1949

BAB III

Teori Pendidikan Dan Pembangunan Masyarakat Sekolah Dan Masyarakat Masyarakat Tanpa Sekolah

1. Teori Pendidikan dan Pembangunan Masyarakat

- A. Sekolah dan Masyarakat
- B. Masyarakat Tanpa Sekolah

2. Kompetensi:

- A. Mengetahui Teori Pendidikan dan Pembangunan Masyarakat
- B. Mengetahui hubungan sekolah dan masyarakat
- C. Mengetahui hubungan masyarakat tanpa sekolah

3. Tujuan Pembelajaran:

Agar mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang Teori Pendidikan dan Pembangunan Masyarakat.

- A. Sekolah dan Masyarakat.
- B. Masyarakat Tanpa Sekolah..

4. Konten Atau Isi Materi Pembelajaran:

A. Teori Pendidikan dan Pembangunan Masyarakat

1) Teori pendidikan

Teori pendidikan merupakan landasan dan pijakan awal dalam pengembangan praktik pendidikan, misalnya pengembangan kurikulum, manajemen sekolah dan proses belajar-mengajar. Kurikulum dan pembelajaran memiliki keterkaitan dengan teori pendidikan atau dalam penyusunan suatu kurikulum dan rencana pembelajaran ini mengacu pada teori pendidikan.(Sholichah dkk, 18.1.12)

Pendidikan Multikultural adalah pendidikan yang memberikan kesempatan pada semua siswanya tanpa memandang jenis kelamin ,kelas sosial, etnis, ras, agama, dan budayanya.(Kuswata,wihardit 1.2:101)

Pendidikan multikultural berasal dari dua kata pendidikan dan multikultural. Pendidikan merupakan proses pengembangan

sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran, pelatihan, proses, perbuatan dan cara-cara yang mendidik. Sedangkan Multikultural secara etimologis multi berarti banyak, beragam dan aneka sedangkan kultural berasal dari kata *culture* yang mempunyai makna budaya, tradisi, kesopanan. (Ibrohim, Rustam 7.1:138)

2) Pembangunan Masyarakat

Pembangunan masyarakat diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat, dimana mereka mampu mengidentifikasi kebutuhan dan masalah secara bersama. (Nugraha, Andi 5.2:119)

Pembangunan dapat diartikan sebagai proses menata dan mengembangkan pranata dalam masyarakat, yang didalam pranata tersebut berisi nilai-nilai dan norma-norma untuk mengatur dan memberi pedoman bagi eksistensi tindakan masyarakat.

Lingkungan sekolah merupakan salah satu agen sosial yang merepresentasikan lingkungan masyarakat secara keseluruhan harus dapat menjalankan fungsi dengan baik dalam melakukan proses pendidikan dan pembelajaran sehingga sekolah dapat memelihara nilai dan norma masyarakat yang positif dan baik. Hal ini logis, dengan perkembangan saat ini, setiap kegiatan dari pembangunan akan menuntut dan mengadopsi berbagai kondisi kemapanan yang telah diciptakan oleh masyarakat yang dinamis. Hal ini pula memberi dampak pada lingkungan sekolah untuk dapat beradaptasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang memiliki karakter yang positif, sehingga peserta didik akan mampu menghadapi tantangan yang dihadapinya. (Maulana, amin 1.1.34)

3) Upaya membangun Kultur masyarakat sekolah

Dalam melakukan kegiatan membangun, dibutuhkan suatu cara dan perbuatan, hal ini merupakan proses pembangunan. Pembangunan berisi suatu kompleks tindakan manusia yang cukup rumit yang melibatkan sejumlah pranata dalam masyarakat. Hampir

semua tindakan manusia adalah kebudayaan. Dalam pembangunan, masyarakat menjadi pelaku dan sekaligus objek dari aktivitas pembangunan. Keterkaitan atau korelasi antara masyarakat dan pembangunan akan terjadi melalui pengendalian dari kebudayaan. Di dalam kebudayaan, tatanan nilai menjadi inti dan basis bagi tindakan manusia. Fungsi elemen nilai (*cultural value*) bagi pembangunan adalah untuk mengevaluasi proses pembangunan agar tetap sesuai dengan standar dan kadar manusia.

Manusia menjadi fokus bagi proses pelaksanaan pembangunan. Salah satu yang utama dari proses tersebut adalah terbentuknya mentalitas pembangunan yang dapat mendorong secara positif gerak pembangunan. Mentalitas pembangunan ini terwujud karena berbasiskan nilai budaya yang luhur, positif dan inovatif bagi pemunculan ide-ide dan gerak pembangunan.

Beberapa upaya membangun kultur masyarakat sekolah dapat dilakukan dengan beberapa alternatif pilihan seperti yang akan diuraikan dibawah ini. Terkait dengan manajemen sekolah untuk mendorong kultur sekolah yang positif maka penting dipikirkan beberapa hal penting.

- a. perlunya manajemen sekolah berbasis motivasi. Hal ini penting, mengingat problem terbesar bangsa ini adalah masalah motivasi dan etos. Motivasi akan mampu menciptakan komitmen, komitmen akan melahirkan etos, etos menciptakan daya gerak, daya gerak akan menciptakan perubahan. Kultur sekolah yang baik, adalah yang mampu menciptakan perubahan. Dan, perubahan bermuara pada motivasi.
- b. Perlunya manajemen sekolah berbasis komunikasi. Manajemen ini, menekankan akan pentingnya kesadaran bahwa etos profesionalitas (mutu), sangat ditentukan oleh kualitas komunikasi. Semakin jernih komunikasi sekolah, dapat diprediksi kultur sekolah yang jernih pula. Sekolah dalam

manajemen prasangka, misalnya, tidak akan terjadi karena *chanel* komunikasi telah terfasilitasi.

- c. Perlunya manajemen sekolah berbasis reward and punishmen. Artinya, dalam kepemimpinan modern dua hal itu merupakan “bahasa komunikasi professional” yang mutlak dibutuhkan. Sehingga penempatan orang didasarkan penghargaan atas kualitas kerja bukan pada *like* dan *dislike*. Sedangkan, hukuman penting dipikirkan untuk menegakkan aturan main institusi sehingga kultur sekolah berjalan atas aturan baku yang mengikat dan tidak pandang bulu.
- d. Perlunya manajemen sekolah berbasis baca tulis. Manajemen ini, nyaris tidak pernah tersentuh oleh sekolah. Tak pernah terpikirkan bahwa guru (komponen sekolah) setiap saat penting untuk meningkatkan kualitas melalui dua budaya ini. Hal ini, mengingat dua hal tersebut merupakan unsur penting dalam tradisi pengembangan SDM mutakhir untuk menuju kultur sekolah yang berkualitas.
- e. perlunya manajemen sekolah berbasis jaringan. Kemajuan sekolah di era mutakhir, mau tidak mau, sangat ditentukan oleh kemampuan membangun jaringan dengan pihak eksternal. (Kaawoan, Selviyanti 10.1.50)

4) Keterkaitan Pendidikan dan Pembangunan Negara

Menurut Suparlan (2013:30) dalam buku Manajemen Berbasis Sekolah UU. No. 20 tahun 2003, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.

fungsi dan tujuan pendidikan yang tertuang dalam pasal 3 UUD No. 20 Tahun 2003, yang menjelaskan bahwa: “Pendidikan

nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,berjuang untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,berakhlak mulia,sehat,berilmu,cakap,kreatif,mandiri,dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Artinya,pembangunan pendidikan dilaksanakan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 telah merumuskan empat tujuan kemerdekaan kebangsaan Indonesia,untuk :

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
- b. Memajukan kesejahteraan umum.
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa,dan
- d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dari empat tujuan Negara tersebut,mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu tujuan yang diusahakan melalui pembangunan nasional.Dalam pasal 13 UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional disebutkan bahwa Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal,nonformal,dan informal yang saling melengkapi dan memperkaya”.Ketiga jalur pendidikan tersebut.

- a. Pendidikan formal adalah institusi atau lembaga pendidikan yang diselenggarakan secara formal yang disebut sebagai lembaga pendidikan sekolah.
- b. Pendidikan nonformal adalah institusi atau lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat,seperti lembaga kursus,dan pusat kegiatan belajar mengajar (PKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat.

- c. Pendidikan informal adalah proses pendidikan yang terjadi dan dilaksanakan oleh didalam keluarga.

5) Sekolah dan Masyarakat

Sekolah sebagai lembaga sosial yang diselenggarakan dan dimiliki oleh masyarakat, harus memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Sekolah mempunyai kewajiban secara legal dan moral untuk selalu memberikan penerangan kepada masyarakat tentang tujuan-tujuan, program-program, kebutuhan dan keadaannya, dan sebaliknya sekolah harus mengetahui dengan jelas apa kebutuhan, harapan, dan tuntutan masyarakatnya. Makin majunya pengertian masyarakat akan pentingnya pendidikan anak-anaknya, maka merupakan kebutuhan vital bagi sekolah dan masyarakat untuk menjalin kerjasama. Kerjasama tersebut dimaksudkan demi kelancaran pendidikan di sekolah pada umumnya, dan untuk meningkatkan prestasi belajar siswa pada khususnya. Secara etimologis, “hubungan masyarakat” diterjemahkan dari perkataan bahasa Inggris “*public relation*”, yang berarti hubungan sekolah dengan masyarakat ialah sebagai hubungan timbal balik antara suatu organisasi (sekolah) dengan masyarakatnya.

“hubungan sekolah dengan masyarakat adalah suatu proses komunikasi antara sekolah dengan masyarakat untuk berusaha menanamkan pengertian warga masyarakat tentang kebutuhan dari karya pendidikan serta pendorong minat dan tanggung jawab masyarakat dalam usaha memajukan sekolah”.(Umar,Munirman 2.1.18)

6) Hubungan Lembaga Pendidikan dengan Masyarakat

Lembaga pendidikan tidak dibenarkan untuk menutup diri dari masyarakat terutama masyarakat sekitarnya juga tidak wajar melaksanakan idenya sendiri dengan tidak mendengarkan atau melaksanakan aspirasi-aspirasi masyarakat karena pada hakikatnya lembaga pendidikan adalah milik masyarakat. Masyarakat

menginginkan lembaga pendidikan berdiri di lingkungannya untuk meningkatkan perkembangan sumber daya manusianya, masyarakat juga menginginkan agar lembaga pendidikan bisa memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung dengan harapan masyarakat pula turut mendukung usaha-usaha yang dilakukan oleh lembaga pendidikan di lingkungannya.

Lembaga pendidikan merupakan sistem terbuka bagi masyarakat, sebagai sistem yang terbuka sudah jelas tidak dapat mengisolasi diri serta penting untuk menyadari keberadaan masyarakat baik ide-idenya, kebutuhan-kebutuhannya serta nilai-nilai yang ada di masyarakat. Begitupun sebaliknya menyadari bahwa lembaga pendidikan sangat membantu mereka untuk menyiapkan SDM yang berkualitas tentu sesuai dengan keinginan mereka sendiri dengan tidak membiarkan lembaga pendidikan saja yang berperan aktif tetapi masyarakat juga karena bagaimanapun dalam membentuk manusia dewasa melalui proses pendidikan tidak akan bisa terwujud tanpa dukungan dan kerjasama dari masyarakat. Pada hakekatnya lingkungan pendidikan itu ada tiga yang sangat erat kaitannya dan tidak bisa berdiri sendiri, yaitu lingkungan pendidikan di keluarga, lingkungan pendidikan di lembaga pendidikan dan lingkungan pendidikan di masyarakat. Jadi, antara lembaga pendidikan dan masyarakat terjadi komunikasi dua arah untuk saling bisa memberi dan saling menerima.

Komunikasi dua arah yaitu dari lembaga pendidikan ke masyarakat dan dari masyarakat ke lembaga pendidikan adalah untuk saling memberi informasi dan berpartisipasi dalam membina proses pendidikan. Pemikiran dalam pengembangan pendidikan tidak selalu harus datang dari lembaga pendidikan dan tidak menutup kemungkinan ide-ide dari masyarakat dapat diterapkan dalam proses pendidikan karena tidak semua program atau ide dari lembaga pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Hubungan komunikasi dua arah ini sangat efektif dalam pengembangan proses pendidikan apabila benar-benar diterapkan oleh kedua belah pihak. Menurut (Sri Minarti, 2011:278-280).,menyatakan bahwa kerjasama antara lembaga pendidikan dengan masyarakat digolongkan menjadi tiga jenis, yaitu:

- a. Hubungan edukatif, yaitu hubungan kerjasama antara lembaga pendidikan dan masyarakat dalam hal mendidik peserta didik, antara guru di lembaga pendidikan dan orangtua dalam keluarga. Kerjasama tersebut dapat direalisasikan dengan mengadakan pertemuan yang direncanakan secara periodik antara guru-guru dan orangtua peserta didik sebagai anggota komite sekolah
- b. Hubungan kultural, yaitu kerjasama antara lembaga pendidikan dan masyarakat untuk membina dan mengembangkan kebudayaan masyarakat setempat karena bagaimanapun pendidikan merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat sekitar.Untuk mewujudkan kerjasama ini yaitu dengan mengarahkan peserta didik untuk membantu kegiatan-kegiatan sosial yang diperlukan oleh masyarakat dengan bergotong-royong memperbaiki jalan, membersihkan lingkungan, menjaga kelestarian lingkungan dan juga bersama-sama menyelenggarakan perayaan yang bersifat keagamaan ataupun nasional.
- c. Hubungan institusional, yaitu hubungan kerjasama antara lembaga pendidikan dengan lembaga atau instansi resmi lainnya baik swasta maupun pemerintah, misalnya hubungan lembaga pendidikan dengan puskesmas, pemerintah setempat, dinas-dinas, pasar dan sebagainya. (Nurhasanah.17.62:64).

B. Masyarakat Tanpa Sekolah

Sekolah adalah dari dan untuk masyarakat, merupakan lembaga sosial yang diselenggarakan dan dimiliki oleh masyarakat itu baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pemerintahnya. Karena itu

sekolah merupakan satu bagian/komponen dari keseluruhan sistem kehidupan masyarakat

Pengaruh masyarakat terhadap sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan sosial, sangat kuat, dan berpengaruh kepada para individu yang ada dalam lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah merupakan masyarakat kompleks, terdiri dari berbagai macam tingkatan masyarakat yang saling melengkapi dan bersifat unik sebagai akibat latar belakang dimensi budaya yang beraneka ragam.

Masyarakat yang kompleks terdiri dari kelompok-kelompok kecil dengan ciri-ciri kolektif yang dimilikinya, mempunyai harapan yang berbeda-beda terhadap kebijaksanaan sekolah, seperti sasaran, tujuan, kurikulum program, dan lain-lain. Oleh sebab itu, untuk memperbaiki dan mempertinggi perhatian masyarakat terhadap sekolah dapat dilakukan dengan melibatkan orang tua dan masyarakat dalam pendidikan sekolah, karena pokok pengembangan partisipasi efektif dengan masyarakat setempat, adalah untuk memungkinkan orang tua dan warga wilayah partisipasi aktif dan penuh arti dalam pendidikan di sekolah.

Masyarakat selalu tumbuh dan berkembang mengikuti arus modernisasi. Ia memiliki identitas dan karakteristik tersendiri sesuai dengan sosial budaya dan latar belakang sosial ekonominya. Identitas dan karakter masyarakat sangat berpengaruh terhadap pendidikan. Jika lingkungan masyarakat tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial maka akan mempengaruhi peserta didik. Masyarakat walaupun mereka daerah pinggiran tetapi mereka sekarang mengalami perubahan cara berfikir terutama dalam memandang fungsi sekolah sendiri, yaitu sebagai pusat kebudayaan. Setiap individu ini memiliki kepribadian dan lingkungan yang berbeda untuk itu pendidikan membawa kepribadian itu untuk ditata dengan norma dan nilai yang ada di masyarakat dan yang diharapkan masyarakat.

Misalnya saja mereka dibesarkan pada kawasan yang semua tetangganya memiliki kebiasaan yang buruk maka di dalam sekolah ini mereka akan dibentuk agar dapat berperilaku yang sesuai dengan tuntutan

masyarakat.Selain itu juga sekolah dapat dipercayai untuk menbgembangkan anak agar mereka lebih menurut dan sopan santun dengan orang tua.Selain itu kepribadian ini dibentuk pada usia kecil misalnya anak sudah disekolah maka mereka akan memiliki rasa yang tidak pernah ditemui mereka dirumah misalnya berinteraksi dengan teman,dengan guru bahkan belajar tentang toleransi dan belajar tentang kebudayaan yang baru dan yang mana budayaa itu yang cocok dengan kepribadian bangsa kita serta cara menghadapi modernisasi dan pengaruh dari budaya luar yang masuk.

Hubungan antara masyarakat dan sekolah saling membutuhkan satu sama lain karena mempunyai peran dalam pembangunan suatu negara dalam upaya untuk bisa mensejahterakan masyarakatnya melalui dengan sekolah,masyarakat tanpa sekolah maka akan menambah buta aksara sehingga akan menimbulkan miskin pengetahuan masyarakat akan terhadap pendidikan ada selain itu juga akan menambah pengangguran dimana-mana.Dalam jurnal (Nurhasanah.17.1.66:68)

5. Latihan Soal

A. Pilihan ganda

- 1) Usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan manusia yang dilaksanakan didalam maupun diluar sekolah ,dan berlangsung seumur hidup adalah ?
 - a. Pengajaran
 - b. Pelatihan
 - c. Pendidikan
 - d. Pembekalan
 - e. Pelajaran
- 2) Pembangunan bisa diartikan sebagai ?
 - a. perubahan yang sifatnya direncanakan
 - b. perubahan yang sifatnya diorganisasikan
 - c. perubahan yang sifatnya dikendalikan
 - d. perubahan yang sifatnya diperbaharui

- e. Jawaban semua benar
- 3) Keterkaitan Pendidikan dan Pembangunan Negara diatur dalam UU pada No dan tahun ?
- a. UU. No. 20 tahun 2002
 - b. UU. No. 20 tahun 2003
 - c. UU. No. 20 tahun 2004
 - d. UU. No. 20 tahun 2005
 - e. Jawaban semua salah
- 4) Fungsi dan tujuan pendidikan nasional diatur dalam pasal, ?
- a. pasal 1 UUD No. 20 Tahun 2003
 - b. pasal 2 UUD No. 20 Tahun 2003
 - c. pasal 3 UUD No. 20 Tahun 2003
 - d. pasal 4 UUD No. 20 Tahun 2003
 - e. Semua jawaban benar
- 5) Dalam pasal 13 UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional disebutkan bahwa "Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan ?
- a. Pendidikan informasi
 - b. Pendidikan Beasiswa
 - c. Pendidikan kultural
 - d. Pendidikan nonformal
 - e. Jawaban semua benar
- 6) Secara etimologis, "hubungan masyarakat" diterjemahkan dari perkataan bahasa Inggris ?
- a. Publick Informasi
 - b. Publick Intellectual
 - c. Publik Education
 - d. Pubick relation
 - e. Semua jawaban salah
- 7) institusi atau lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, seperti lembaga kursus, dan pusat kegiatan belajar mengajar (PKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat disebut pendidikan jalur ?

- a. Jalur beasiswa
 - b. Jalur formal
 - c. Jalur informal
 - d. Jalur prestasi
 - e. Semua jawaban salah
- 8) Hubungan yang berkaitan dengan kebudayaan suatu lembaga pendidikan adalah termasuk kedalam hubungan ?
- a. Hubungan Konseling
 - b. Hubungan educative
 - c. Hubungan institusional
 - d. Hubungan kultural
 - e. Semua Jawaban Salah
- 9) Komunikasi untuk menyampaikan keterkaitan pendidikan yang dilakukan kepada bagian masyarakat dilakukan oleh bagian ?
- a. Komite
 - b. Bendahara
 - c. Humas
 - d. Saprasi
 - e. Semua Jawaban salah
- 10) pembangunan pendidikan dilaksanakan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 telah merumuskan empat tujuan kemerdekaan kebangsaan Indonesia, *kecuali* :
- a. Menjaga persatuan dengan kultur budaya
 - b. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
 - c. Memajukan kesejahteraan umum.
 - d. Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
 - e. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

B. Essay

- 1) Jelaskan Teori Pendidikan dan Pembangunan Masyarakat ?

- 2) Jelaskan hubungan sekolah dan masyarakat ?
- 3) Pada hakekatnya lingkungan pendidikan itu ada tiga yang sangat erat kaitannya dan tidak bisa berdiri sendiri,sebutkan apa saja yang termasuk kedalam hakekat lingkungan tersebut ?
- 4) Menurut Sri Minarti,menyatakan bahwa kerjasama antara lembaga pendidikan dengan masyarakat digolongkan menjadi tiga jenis, yaitu ?
- 5) Jelaskan menurut pendapat kamu bagaimana masyarakat tanpa sekolah?

Jawaban:

A. pilihan ganda

- 1) C
- 2) A
- 3) B
- 4) C
- 5) D
- 6) B
- 7) D
- 8) D
- 9) C
- 10) A

B. Essay

- 1) Teori pendidikan dan pembangunan masyarakat
 - a. Teori pendidikan merupakan landasan dan pijakan awal dalam pengembangan praktik pendidikan.
 - b. Pembangunan masyarakat diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat, dimana mereka mampu mengidentifikasikan kebutuhan dan masalah secara bersama.
- 2) Hubungan sekolah dengan masyarakat adalah suatu proses komunikasi antara sekolah dengan masyarakat untuk berusaha menanamkan pengertian warga masyarakat tentang kebutuhan dari karya pendidikan serta pendorong minat dan tanggung jawab masyarakat dalam usaha memajukan sekolah

- 3) Hakekat lingkungan Pendidikan
 - a. Lingkungan pendidikan di keluarga
 - b. lingkungan pendidikan di lembaga pendidikan
 - c. lingkungan pendidikan di masyarakat
- 4) 3 jenis hubungannya
 - a. Hubungan Educatif
 - b. Hubungan Kultural
 - c. Institusional
5. Jika masyarakat tanpa sekolah maka pendidikan tidak akan mampu berjalan dengan baik karena didalam pendidikan masyarakat mempunyai peran aktif untuk menjankan pendidikan,begitu pun dengan masyarakat tanpa sekolah angka buta aksara mungkin akan banyak dan tingkat kemiskinan pun akan semakin meningkat.

BAB IV

Teori Budaya Organisasi

1. Kompetensi:

Mengenal budaya organisasi, mempertahankan dan memperbaharui budaya organisasi dan perubahan budaya pada organisasi pendidikan.

2. Tujuan Pembelajaran:

Agar mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang Teori Budaya Organisasi.

3. Konten Atau Isi Materi Pembelajaran:

D. Mengenal Budaya Organisasi

1) Pengertian budaya organisasi

Menurut Edgar Schein (1997:12) dalam buku Budaya Organisasi, (Wibowo, 2016:15) berpendapat bahwa Budaya adalah suatu pola asumsi dasar yang ditemukan dan dikembangkan oleh suatu kelompok tertentu karena mempelajari dan menguasai masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal yang telah bekerja dengan cukup baik untuk dipertimbangkan secara layak dan karena itu diajarkan pada anggota baru sebagai cara yang dipersepsikan, berfikir, dan dirasakan dengan benar dalam hubungan dengan masalah tersebut.

Sedangkan organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Organisasi hanya merupakan alat dan wadah saja. Kalau dari segi wujudnya maka organisasi adalah kerja sama orang-orang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam segi wujudnya ini organisasi bersifat *dinamis*. (Suryanti, Eny Wahyu. 19.1:3)

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Budaya Organisasi adalah seperangkat asumsi atau sistem keyakinan, nilai-nilai dan norma yang dikembangkan dalam

organisasi yang dijadikan pedoman tingkah laku bagi anggota-anggotanya untuk mengatasi masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal. Dengan demikian, budaya organisasi dapat memberikan nilai-nilai dan norma bagi karyawan dalam prinsip operasional organisasi (Suryanti, Eny Wahyu. 19.1:3-4)

2) Tipe Budaya Organisasi

(Wibowo, 2016:19) menyatakan adanya 4 tipologi budaya yang dapat pula dipandang sebagai siklus hidup budaya, yaitu sebagai berikut:

a. *The monoculture*

Monoculture merupakan program mental tunggal, orang berfikir sama dan sesuai dengan norma budaya yang sama. Orang-orangnya mempunyai satu pikiran. Merupakan model “ras murni” yang menyebabkan banyak konflik dalam dunia dimana terdapat banyak etnis dan kelompok rasial berbeda.

b. *The superordinate culture*

Terdiri dari sub culture terkordinasi, masing-masing dengan keyakinan dan nilai-nilai, gagasan dan sudut pandang sendiri, tetapi semua bekerja dalam satu organisasi dan semua termotivasi mencapai sasaran organisasi.

c. *The divisive culture*

The divisive culture Bersifat memecah belah. Dalam budaya ini sub-kultur dalam organisasi secara individual mempunyai agenda dan tujuannya sendiri. Dalam model ini, organisasi ditarik kearah yang berbeda. Tidak ada pemisahan dan konflik antara ”kita dan mereka” tidak terdapat arah yang jelas dan kekurangan kepemimpinan.

d. *The disjunctiv culture*

Budaya ini ditandai oleh seringnya pemecahan organisasi secara eksplosive atau bahkan menjadi unit budaya individual sebagai contohnya adalah yugoslavia, bosnia, dan

uni soviet. Demikian pula perang sipil diaprika yang berkepanjangan.

Tipe budaya organisasi jeff cartwright tersebut apabila disimak lebih dalam menunjukkan bahwa perbedaannya adalah terletak pada derajat kekuatan hubungan antara dominant culture dengan subcultures.

3) Fungsi Budaya Organisasi

Fungsi budaya organisasi menunjukkan peranan atau kegunaan dari budaya organisasi. Fungsi budaya organisasi menurut Robert Kreitner dan Angelo Kinicki (2001:73) dalam buku budaya organisasi (Wibowo, 2016:45) adalah sebagai berikut :

- a. Memberi anggota identitas organisasional, menjadikan perusahaan diakui sebagai perusahaan yang inovatif dengan mengembangkan produk baru. Identitas organisasi menunjukkan ciri khas yang membedakan dengan organisasi lain yang mempunyai sifat khas yang berbeda.
- b. Memfasilitasi komitmen kolektif perusahaan mampu membuat pekerjaannya bangga menjadi bagian dari padanya. Anggota organisasi mempunyai komitmen bersama tentang norma-norma dalam organisasi yang harus diikuti dan tujuan bersama yang harus dicapai.
- c. Meningkatkan stabilitas sistem sosial sehingga mencerminkan bahwa lingkungan kerja dirasakan positif dan diperkuat, konflik dan perubahan dapat dikelola secara efektif. Dengan kesepakatan bersama tentang budaya organisasi yang harus dijalani mampu membuat lingkungan dan interaksi sosial berjalan dengan stabil dan tanpa gejolak.
- d. Membentuk perilaku dengan membantu anggota menyadari atas lingkungannya. Budaya organisasi dapat menjadi alat untuk membuat orang berfikir sehat dan masuk akal.

E. Mempertahankan Dan Memperbaharukan Budaya Organisasi

1) Memelihara Budaya Organisasi

Budaya akan diuji ketika pendiri organisasi dan pekerja terdahulu mulai merekrut dan menggaji anggota baru. Apabila anggota baru tersebut tidak sesuai dengan budaya, maka budaya menjadi dilemahkan atau dibedakan. Menurut Jason A. Colquit, dkk Dalam buku budaya organisasi (Wibowo, 2016:63) Ada dua proses untuk menjaga budaya kuat, yaitu:

- a. *attraction-selection-attrition dan attraction-selection-attrition* (ASA). Kerangka kerja ASA berpandangan bahwa pekerja potensial akan tertarik pada organisasi yang budayanya sesuai dengan kepribadian mereka sendiri, artinya bahwa beberapa pelamar kerja potensial tidak melamar karena merasa kurang sesuai. Organisasi akan memilih kandidat didasarkan pada apakah kepribadiannya sesuai dengan budaya, selanjutnya membuang orang potensial yang tidak dapat menyesuaikan diri. Akhirnya, orang tersebut yang tetap tidak sesuai akan tidak senang atau tidak efektif ketika bekerja dalam organisasi, yang mengarah pada pengurangan (perpindahan sukarela atau tidak sukarela).
- b. *Socialization*. Memulai pekerjaan baru dengan perusahaan adalah membuat stres, kompleks, dan menantang untuk pekerja dan organisasi. Kenyataannya, tidak ada orang kuat dapat mengerti dan memahami sepenuhnya budaya organisasi dengan hanya melihat artifak yang terlihat dari luar perusahaan. Memahami secara lengkap budaya organisasi adalah suatu proses yang terjadi sepanjang waktu. Sosialisasi adalah proses utama dengan mana pekerja belajar pengetahuan sosial yang memungkinkan mereka memahami dan menyesuaikan pada budaya organisasi. Prosesnya mulai dari sebelum pekerja mulai bekerja dan tidak berakhir sampai pekerja meninggalkan organisasi.

2) Menyebar Budaya Organisasi

Apabila budaya organisasi telah terbentuk, maka perlu segera disosialisasikan agar dapat lebih mudah diketahui dan diikuti segenap sumber daya manusia dalam organisasi maupun oleh pihak lain diluar organisasi. Ada beberapa cara yang dapat dipakai untuk mensosialisasikan budaya organisasi dan terdapat beberapa kesamaan pandangan diantara para penulis. Perbedaan di antara mereka tidak signifikan, namun bersifat melengkapi atau memperinci.

Menurut Jerald Greenberg dan Robert A. Baron (2003:523) dalam buku budaya organisasi (Wibowo, 2016:67) yang menunjukkan beberapa cara yang dapat dipergunakan untuk menyebarkan budaya organisasi, yaitu:

- a. Simbol, yaitu suatu objek yang dapat mengatakan lebih banyak dari pada apa yang terlihat oleh mata. merupakan objek material yang memberikan arti lebih luas melebihi kandungan intrinsiknya.
- b. Slogan, merupakan ungkapan yang menangkap budaya organisasi. Slogan juga mengkomunikasikan aspek penting dari budaya organisasi baik kepada masyarakat umum maupun pekerja dalam organisasi sendiri.
- c. Cerita, disampaikan secara formal maupun informal dan menggambarkan aspek kunci budaya organisasi dan dengan memberitahu mereka dapat memperkenalkan secara efektif atau menegaskan kembali tentang nilai-nilai kepada pekerja.
- d. Jargon, bahasa khusus yang mendefinisikan budaya. Bahkan tanpa memberikan cerita, bahasa sehari-hari yang dipergunakan dalam perusahaan membantu melanjutkan budaya.
- e. Upacara, kejadian khusus yang memperingati nilai-nilai korporasi. Upacara dapat dilihat sebagai perayaan nilai-nilai dasar dan asumsi organisasi.

- f. Pernyataan tentang dasar, mendefinisikan budaya dalam bentuk tertulis. Beberapa organisasi secara eksplisit menuliskan dasar-dasarnya untuk dapat dilihat semua orang, beberapa organisasi menyampaikan aspek moral sebagai kode etik, suatu dokumen yang merupakan pernyataan yang dibuat secara eksplisit yang menyatakan nilai-nilai etika organisasi.

3) Strategi dalam Pengembangan Budaya Organisasi

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan strategi dan pengembangan organisasi:

- a. *Pengamatan Eksternal* yaitu dengan memperhatikan kesempatan dan ancaman di segala aspek, baik ekonomi, politik, teknologi, budaya dan lainnya yang semua variable itu akan membentuk karakter organisasi.
- b. *Pengamatan Internal* terdiri dari evaluasi SDM dan struktur organisasi, dengan tujuan mengukur kesiapan SDM (inputs) strategi sekarang (process), kinerja (outputs) dan potensi dalam yang akan membentuk kedinamisan organisasi. Dalam internal terdapat dua variable yang penting, yaitu, Struktur dan Budaya. Struktur berkenaan dengan mekanisme, prosedural organisasi. Budaya adalah yang berkenaan dengan pola keyakinan dan pemikiran, aspirasi dan nilai-nilai yang diharapkan oleh semua anggota organisasi.
- c. *Perumusan Organisasi* adalah pengembangan *planning* jangka panjang, dari manajemen yang efektif dari kesempatan dan ancaman yang disinergiskan dengan kondisi internal.
- d. *Misi Organisasi* adalah tujuan atau alasan mengapa organisasi ada dan mempertegas keberadaan organisasi. Konsep misi yang disusun dengan sistemik dan general itu akan menjadikan ciri khas organisasi dengan organisasi yang lain, dan berperan terhadap uniknya nilai produk organisasi yang ditawarkan.

- e. *Tujuan* adalah hasil akhir aktivitas perencanaan, dengan merumuskan apa dan kapan yang akan diselesaikan dengan mengukur sasaran.
- f. *Strategi* merupakan konsep perencanaan komprehensif tentang bagaimana organisasi dapat mencapai misi dan tujuan.
- g. *Kebijakan* adalah pedoman luas yang menghubungkan strategi dan implementasi. Kebijakan ini bersifat general yang nantinya akan diikuti dan disepesifikan dan diinterpretasikan dan diimplementasikan oleh divisi-divisi melalui strategi dan tujuan divisi masing-masing.
- h. *Implementasi Strategi* adalah proses dimana manajemen mewujudkan strategi dan kebijakan dalam tindakan melalui pengembangan program, anggaran dan prosedur.
- i. *Program* adalah pernyataan aktivitas-aktivitas yang diperlukan untuk menyelesaikan perencanaan sekali pakai.
- j. *Anggaran* adalah program yang dinyatakan dalam satuan uang, setiap program akan dinyatakan secara rinci dalam biaya, yang dapat digunakan oleh SDM untuk mengelola organisasi.
- k. *Prosedur* sering juga disebut dengan standar *operating procedures*, yaitu langkah-langkah yang berurutan yang menggambarkan dengan rinci bagaimana suatu tugas atau pekerjaan diselesaikan.
- l. *Evaluasi dan Pengendalian* adalah proses yang melalui aktivitas-aktivitas dan hasil kerja dimonitor dan kinerja nyata dengan kinerja/program yang diinginkan.

Hasil yang diharapkan dalam sebuah organisasi adalah bentuk peningkatan efektivitas organisasi: produk, efisiensi, dan kepuasan dalam jangka pendek, adaptasi dan pengembangan dalam jangka menengah, kemampuan bertahan dalam jangka panjang.

F. Perubahan Budaya Pada Organisasi Pendidikan

Perubahan merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari dan pasti terjadi bahkan tiada sesuatu yang bertahan statis di dunia ini, semua mengalami perubahan. Demikian pula halnya pada lembaga pendidikan, termasuk sekolah juga harus memiliki kemampuan untuk berubah, karena sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki fungsi sebagai instrument transformasi nilai, sehingga secara berkesinambungan harus dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan, tuntutan, dan perubahan yang terjadi dilingkungannya sebagai implikasi dari perubahan (Widodo, Hendro. 2017. Manajemen Perubahan Budaya Sekolah. 2. 2. 288).

1) Komponen Perubahan Budaya Sekolah

Dalam setiap organisasi perlu ada “pembaharu” atau *Change Agent* yaitu orang yang mampu melakukan perubahan. Kepala sekolah sebagai pemimpin di sekolah memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan perubahan, karena pada dirinya juga melekat tanggungjawab sebagai *Change Agent*. Kepala sekolah memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan-keputusan penting kemana sekolah mau dibawa dan perubahan apa yang dilakukan.

Manajemen perubahan di sekolah mencakup dua komponen utama perubahan yang saling terkait karena sekolah harus dilihat sebagai satu keutuhan yang harus senantiasa diupayakan untuk meningkatkan output pendidikan. Dua komponen utama tersebut adalah *pertama*; perubahan dalam pengelolaan yang meliputi kepemimpinan, komunikasi, dan hubungan internal dan eksternal lembaga, *kedua*; perubahan dalam sekolah untuk mendukung terwujudnya perubahan tersebut meliputi tim manajemen supervisi, peran guru, para staf pendukunya profesional, metodologi perbaikan berkelanjutan, dan rancang bangun kurikulum, monitoring terhadap kemajuan siswa dan program penilaian (Widodo, Hendro. 2017. Manajemen Perubahan Budaya Sekolah. 2. 2. 293-295).

2) Tahapan dalam Mengelola Perubahan Budaya Sekolah

E Mulyasa mengemukakan dalam jurnal (Widodo, Hendro. 2017. Manajemen Perubahan Budaya Sekolah. 2. 2. 300-301) bahwa tahapan yang diperlukan dalam mengelola perubahan yaitu:

- a. Menemukan. Pada tahapan ini, kepala sekolah dapat menemukan komponen apa saja yang perlu dirubah dan pada unsur apa perubahan itu dilakukan.
- b. Mengkomunikasikan. Temuan tersebut dikomunikasikan dengan pihak terkait untuk mendapatkan konfirmasi apakah hal tersebut benar-benar terjadi.
- c. Mengkaji dan menganalisis. Masalah tersebut dikaji untuk ditemukan faktor penyebabnya melalui berbagai data yang relevan, kemudian dianalisis secara cermat;
- d. Mencari dukungan. Untuk meyakinkan bahwa masalah benar-benar terjadi, kepala sekolah mencari sumber, baik orang maupun sarana yang menguatkan adanya masalah dan mencari jalan untuk melakukan perubahan.
- e. Mencoba. Dalam tahap ini ditentukan langkah-langkah perubahan yang akan ditempuh. Pada tahap ini dimungkinkan terjadinya pro dan kontra terhadap perubahan, karenanya dalam proses ini perlu dipertimbangkan adanya faktor pendukung sehingga perubahan dapat terjadi dengan baik; dan
- f. Menerima perubahan. Pada tahap ini perubahan dimulai, sebagai *problem solving* untuk memecahkan. Dalam tahap ini, warga sekolah perlu membangun kebersamaan dan komunikasi yang efektif, karena dengan adanya komunikasi yang baik, maka akan tercipta suasana yang harmonis yang melahirkan tim kerja yang kompak dalam rangka pencapaian tujuan perubahan.

4. Latihan Soal

A. Pilihan ganda

- 1) Dimensi *external environments* diantaranya..

- a. *mission and strategy*
 - b. *common language*
 - c. *developing norms of intimacy, friendship, and love*
 - d. *reward and punishment*
 - e. *ideology and religion*
- 2) Dimensi *internal integration* yang di dalamnya terdapat enam aspek utama, yaitu...
- a. *common language*
 - b. *mission and strategy*
 - c. *goals*
 - d. *means to achieve goals*
 - e. *correction*
- 3) Robbins (1996) menyatakan bahwa budaya organisasi merupakan...
- a. seperangkat asumsi atau sistem keyakinan, nilai-nilai dan norma yang dikembangkan dalam organisasi
 - b. perekat sosial yang mengikat anggota-anggota organisasi secara bersama-sama melalui nilai-nilai bersama.
 - c. sistem perserikatan formal, berstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu.
 - d. alat dan wadah saja
 - e. Semua jawaban benar
- 4) Mitos yang berkenaan dengan budaya organisasi adalah...
- a. Budaya tidak untuk semua orang
 - b. *Strong culture* bersifat monolistis.
 - c. The superordinate culture
 - d. The disjunctiv culture
 - e. Jawaban b dan c benar
- 5) Jeff cartwright (1999:11) menyatakan adanya 4 tipologi budaya yang dapat pula dipandang sebagai siklus hidup budaya, salah satu nya yaitu....
- a. The superordinate culture

- b. *Strong culture* bersifat monolistis.
 - c. Budaya tidak untuk semua orang.
 - d. Budaya menolak semua perubahan.
 - e. Perubahan budaya dapat dikelola.
- 6) Geert hofstede membagi karakteristik budaya dalam 5 (lima) dimensi, salah satu diantaranya yaitu...
- a. The disjunctiv culture
 - b. *Manajemen Style* (Gaya Manajemen)
 - c. *Individualism* (Individualisme)
 - d. *Individualism versus collectivism*
 - e. *Change* (Perubahan)
- 7) Budaya korporasi dapat mempunyai dampak signifikan dalam kinerja..
- a. Ekonomi Jangka Pendek
 - b. Ekonomi Jangka Menengah
 - c. Ekonomi Jangka lama
 - d. ekonomi perusahaan jangka panjang
 - e. Semua jawaban benar
- 8) Memulai pekerjaan baru dengan perusahaan adalah..
- a. membuat stres, kompleks, dan menantang untuk pekerja dan organisasi
 - b. pekerja potensial akan tertarik pada organisasi yang budayanya sesuai dengan kepribadian mereka sendiri
 - c. sumber daya manusia dalam organisasi maupun oleh pihak lain diluar organisasi.
 - d. Perbedaan di antara mereka tidak signifikan, namun bersifat melengkapi atau memperinci.
 - e. objek material yang memberikan arti lebih luas melebihi kandungan intrinsiknya
- 9) Cara yang dapat dipergunakan untuk menyebarkan budaya organisasi, yaitu
- a. Tahapan

- b. Cara
 - c. Alur
 - d. Proses
 - e. Slogan
- 10) Yang harus diperhatikan dalam perencanaan strategi dan pengembangan organisasi yaitu..
- a. *Pengamatan Eksternal dan Solidaritas Organik*
 - b. *Perumusan Organisasi dan Pengamatan Internal*
 - c. *Pengamatan Internal dan Solidaritas Mekanik*
 - d. jawaban a benar
 - e. semua jawaban salah

B. Esayy

1. Apa yang dimaksud dengan organisasi menurut pendapatmu ?
2. Apa fungsi budaya organisasi ?
3. Bagaimana menurutmu tentang pengamatan Eksternal ?
4. Dalam setiap organisasi perlu ada “pembaharu” atau *Change Agent*
Mengapa “Pembaharu” dibutuhkan dalam organisasi ?
5. Apa yang dimaksud misi dalam organisasi ?

Jawaban

A. Plihan ganda

- 1) A
- 2) A
- 3) B
- 4) A
- 5) A
- 6) D
- 7) D
- 8) A
- 9) E
- 10) B

B. Essay

- 1) Organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu.
- 2) Memfasilitasi komitmen kolektif perusahaan mampu membuat pekerjaannya bangga menjadi bagian dari padanya.
- 3) yaitu dengan memperhatikan kesempatan dan ancaman di segala aspek, baik ekonomi, politik, teknologi, budaya dan lainnya yang semua variable itu akan membentuk karakter organisasi.
- 4) Karena merupakan orang yang mampu melakukan perubahan dan itu dibutuhkan pada setiap lembaga maupun organisasi
- 5) tujuan atau alasan mengapa organisasi ada dan mempertegas keberadaan organisasi.

BAB V

Model Community Based Development

1. Kompetensi

- A. Konsep dasar Community Based Development
- B. Ciri-ciri pembangunan berbasis masyarakat (*community based development*)
- C. Tahapan dan metode pembangunan berbasis masyarakat

2. Tujuan Pembelajaran

Agar mahasiswa dapat memahami Model *community based development*.

3. Isi Materi

D. Konsep Dasar *Community Based Development* (Pembangunan berbasis Masyarakat)

Menurut Theresia Aprilia (2014:28) Pembangunan berbasis masyarakat, secara sederhana dapat diartikan sebagai pembangunan yang mengacu kepada kebutuhan masyarakat, direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat dengan sebesar-besarnya memanfaatkan potensi sumber daya (alam, manusia, nilai-nilai sosial budaya, dll) yang ada dan dapat diakses oleh masyarakat setempat.

Karena itu, pembangunan berbasis masyarakat seharusnya pembangunan berangkat dari kebutuhan masyarakat dan bukannya dirumuskan oleh “orang luar” atau elit masyarakat yang merasa tahu dan lebih pandai untuk merumuskan pembangunan yang cocok bagi masyarakatnya. Pembangunan berbasis masyarakat berarti pembangunan harus berbasis pada sumber daya lokal, berbasis pada modal sosial, berbasis pada budaya lokal, menghormati atau berbasis pada kearifan lokal, dan berbasis pada modal spiritual yang dimiliki atau diyakini oleh masyarakat setempat.

E. Ciri-Ciri Pembangunan Berbasis Masyarakat (*Community Based Development*)

- 1) Prakarsa dan proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tahap demi tahap harus diletakkan pada masyarakat sendiri.

- 2) Fokus utamanya adalah meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola dan memobilisasikan sumber-sumber yang terdapat di komunitas untuk memenuhi kebutuhan mereka.
- 3) Pendekatan ini mentoleransi variasi lokal dan karenanya, sifatnya fleksibel menyesuaikan dengan kondisi lokal.
- 4) Di dalam melaksanakan pembangunan, pendekatan ini menekankan pada proses *social learning* yang di dalamnya terdapat interaksi kolaboratif antara birokrasi dan komunitas mulai dari proses perencanaan sampai evaluasi proyek dengan mendasarkan diri saling belajar.
- 5) Proses pembentukan jejaring (*networking*) antara birokrasi dan lembaga swadaya masyarakat, satuan-satuan organisasi tradisional yang mandiri, merupakan bagian integral dari pendekatan ini, baik untuk meningkatkan kemampuan mereka mengidentifikasi dan mengelola berbagai sumber, maupun untuk menjaga keseimbangan antara struktur vertikal maupun horizontal. Melalui proses *networking* ini diharapkan terjadi simbiosis antara struktur-struktur pembangunan di tingkat lokal.

C. Tahapan dan Metode Pembangunan Berbasis Masyarakat

1) Tahapan Pembangunan Berbasis Masyarakat

Menurut Aprilia Theresia, dkk (2014:223) tahapan kegiatan *Community Based Development* (Pembangunan Berbasis Masyarakat) dapat dibagi menjadi beberapa tahapan :

- a. Penetapan dan pengenalan wilayah kerja. Sebelum melakukan kegiatan, penetapan wilayah kerja perlu memperoleh kesepakatan antara Tim Fasilitator, Aparat pemerintah setempat, masyarakat setempat, dan pemangku kepentingan lain. Hal ini, tidak saja untuk menghindari gesekan atau konflik kepentingan antar semua pemangku kepentingan, tetapi juga untuk membangun sinergi dan memperoleh dukungan berupa partisipasi dari seluruh pemangku kepentingan, demi keberhasilan program dan kegiatan Pembangunan Berbasis Masyarakat yang akan dilakukan.

- b. Sosialisasi kegiatan, yaitu upaya mengkomunikasikan rencana kegiatan pembangunan berbasis masyarakat yang akan dilakukan di wilayah tersebut. Termasuk sosialisasi kegiatan, perlu juga dikemukakan tentang pihak-pihak terkait yang akan diminta partisipasi/keterlibatannya, pembagian peran yang diharapkan, pendekatan, strategi serta langkah-langkah yang akan dilakukan.
- c. Penyadaran masyarakat, merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyadarkan masyarakat tentang “keberadaanya”, baik sebagai individu dan anggota masyarakat, maupun kondisi lingkungannya yang menyangkut lingkungan fisik/teknis, sosial budaya, ekonomi, dan politik. Yang termasuk dalam penyadaran adalah :
 - (1) Bersama-sama masyarakat melakukan analisis keadaan yang menyangkut potensi dan masalah, serta analisis faktor-faktor penyebab terjadinya masalah yang menyangkut kelemahan internal dan ancaman eksternalnya.
 - (2) Melakukan analisis akar masalah, analisis alternatif pemecahan masalah, serta pilihan alternatif pemecahan terbaik yang dapat dilakukan.
 - (3) Menunjukkan pentingnya perubahan untuk memperbaiki keadaannya, termasuk merumuskan prioritas perubahan, tahapan perubahan, cara melakukan dan mencapai perubahan, sumber daya yang diperlukan, maupun peran bantuan yang diperlukan.
- d. Pengorganisasian masyarakat. Termasuk pemilihan pemimpin dan kelompok-kelompok tugas yang akan dibentuk. Pengorganisasian masyarakat ini penting dilakukan, karena untuk melaksanakan perubahan guna memecahkan masalah dan memperbaiki keadaan seringkali tidak dapat dilakukan secara individual, tetapi memerlukan pengorganisasian masyarakat.
- e. Pelaksanaan kegiatan, terdiri dari :
 - (1) Berbagai pelatihan untuk menambah dan memperbaiki pengetahuan teknis, keterampilan manajerial serta perubahan sikap/wawasan.

- (2) Pembangunan berbasis kegiatan, utamanya yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan serta perlindungan, pelestarian dan perbaikan sumber daya alam maupun pembangunan berbasis efektivitas kelembagaan.
- f. Advokasi kebijakan, karena semua upaya pembangunan berbasis masyarakat memerlukan dukungan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Kegiatan advokasi ini diperlukan guna memperoleh dukungan politik dan legitimasi dari elit masyarakat.
- g. Politisasi, dalam arti terus menerus memelihara dan meningkatkan posisi tawar melalui kegiatan politik praktis. Hal ini diperlukan untuk memperoleh dan melestarikan legitimasi dan keberlanjutan kebijakan yang ingin dicapai melalui pembangunan berbasis masyarakat. Politisasi ini perlu dilakukan melalui beragam cara, seperti :
 - (1) Menanam “virus” atau kader-kader perubahan yang memiliki komitmen untuk mendukung pembangunan berbasis masyarakat, kedalam jajaran birokrasi, politisi, pelaku bisnis, dll.
 - (2) Melakukan “*pressure*” melalui media masa, forum ilmiah, dan pembanguna berbasis kelompok penekana.
 - (3) Melakukan kegiatan aksi nyata melalui kelompok kecil yang menunjukkan manfaat pembangunan berbasis masyarakat yang ditawarkan.

2. Metode *Community Based Development* (Pembangunan Berbasis Masyarakat)

Menurut Aprilia Theresia, dkk (2014:266) metode merupakan suatu kerangka kerja untuk menyusun suatu tindakan atau suatu kerangka berpikir, menyusun gagasan, yang beraturan, berarah, dan berkonteks yang relevan dengan maksud dan tujuan tertentu.

a. Prinsip-prinsip Pemilihan Metode Pembangunan Berbasis Masyarakat

(1) Pembangunan berbasis untuk berpikir kreatif

Melalui pembangunan berbasis masyarakat bukanlah dimaksudkan agar masyarakat penerima manfaat selalu

menggantungkan diri kepada petunjuk, nasehat, atau bimbingan penyuluhnya. Tetapi, melalui pembangunan berbasis masyarakat harus menghasilkan masyarakat yang mampu dengan upayanya sendiri mengatasi masalah-masalah yang dihadapi, serta mampu mengembangkan kreativitasnya untuk memanfaatkan setiap potensi dan peluang yang diketahuinya untuk terus menerus dapat memperbaiki mutu hidupnya.

Karena itu, pada setiap kegiatan pembangunan berbasis masyarakat, seorang fasilitator harus mampu memilih metode yang sejauh mungkin dapat mengembangkan daya nalar dan kreativitas masyarakat penerima manfaatnya.

(2) Tempat kegiatan

Dalam banyak kasus, kegiatan pembangunan berbasis masyarakat sebaiknya dilaksanakan dengan menerapkan metode-metode yang dapat dilaksanakan di lingkungan pekerjaan.

(3) Setiap individu terikat dengan lingkungan sosialnya

Sebagai makhluk sosial, setiap individu akan selalu berperilaku sesuai dengan kondisi lingkungan sosialnya, atau setidaknya akan selalu berusaha menyesuaikan diri dengan perilaku orang-orang disekitarnya. Karena itu, pembangunan berbasis masyarakat akan lebih efisien jika diterapkan hanya kepada beberapa warga masyarakat, terutama yang diakui oleh lingkungannya sebagai panutan yang baik.

(4) Ciptakan hubungan yang akrab

Keakraban hubungan antara fasilitator dan penerima manfaat ini menjadi sangat penting. karena dengan keakraban itu akan tercipta suatu keterbukaan mengemukakan masalah dan menyampaikan pendapat.

(5) Memberikan sesuatu untuk terjadinya perubahan

Metode yang diterapkan harus mampu merangsang penerima manfaat untuk selalu siap dan dengan suka hati atas

kesadaran ataupun pertimbangan nalarnya sendiri melakukan perubahan-perubahan demi perbaikan mutu hidupnya sendiri, keluarga dan masyarakatnya.

b. Metode Pembangunan Berbasis Masyarakat

- (1) Kelompok metode tatap muka dapat berupa percakapan, ceramah, diskusi, sekolah lapang dan pelatihan.
- (2) Kelompok metode percakapan tak langsung, melalui telepon, TV, radio atau alat komunikasi lainnya.
- (3) Kelompok metode demonstrasi, berupa demonstrasi cara, demonstrasi hasil, dan demonstrasi cara dan hasil.
- (4) Kelompok metode barang cetakan, dapat melalui foto, pamflet, leaflet, folder, brosur, poster dan baliho.
- (5) Kelompok metode media masa, melalui surat kabar, tabloid, majalah, radio, tape recorder, dll

4. Latihan Soal

A. Pilihan Ganda

- 1) Pembangunan yang mengacu kepada kebutuhan masyarakat, direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat dengan sebesar-besarnya memanfaatkan potensi sumber daya (alam, manusia, nilai-nilai sosial budaya, dll) yang ada dan dapat diakses oleh masyarakat setempat. Merupakan definisi umum dari...
 - a. *Community Based Development*
 - b. Sosial ekonomi
 - c. Koperasi
 - d. Organisasi
 - e. Manajemen berbasis sekolah
- 2) Dalam pembangunan berbasis masyarakat, ada ciri ciri tertentu. Ada berapakah ciri-ciri tersebut..
 - a. 1
 - b. 2
 - c. 3

- d. 4
 - e. 5
- 3) Menurut Aprilia Theresia, dkk (2014:223) tahapan kegiatan *Community Based Development* (Pembangunan Berbasis Masyarakat) dapat dibagi menjadi beberapa tahapan. Ada berapa tahapan tersebut...
- a. 2
 - b. 4
 - c. 5
 - d. 6
 - e. 7
- 4) Merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyadarkan masyarakat tentang “keberadaanya”, baik sebagai individu dan anggota masyarakat, maupun kondisi lingkungannya yang menyangkut lingkungan fisik/teknis, sosial budaya, ekonomi, dan politik. Adalah definisi dari...
- a. Pengorganisasian masyarakat
 - b. Penyadaran masyarakat
 - c. Sosialisasi kegiatan
 - d. Pelaksanaan kegiatan
 - e. Penetapan dan pengenalan wilayah kerja
- 5) Upaya mengkomunikasikan rencana kegiatan pembangunan berbasis masyarakat yang akan dilakukan di wilayah tersebut. Merupakan definisi dari...
- a. Penyadaran masyarakat
 - b. Pelaksanaan kegiatan
 - c. Sosialisasi kegiatan
 - d. Penetapan dan pengenalan wilayah kerja
 - e. Pelaksanaan kegiatan
- 6) Prinsip-prinsip pemilihan metode pembangunan berbasis masyarakat dibagi menjadi berapa prinsip...
- a. 1
 - b. 2
 - c. 3

- d. 4
 - e. 5
- 7) Yang termasuk prinsip-prinsip pemilihan metode pembangunan berbasis masyarakat adalah...
- a. Pembangunan berbasis untuk berpikir kreatif
 - b. Tempat kegiatan
 - c. Setiap individu terikat dengan lingkungan sosialnya
 - d. Ciptakan hubungan yang akrab
 - e. (a),(b),(c) dan (d) benar
- 8) Metode pembangunan berbasis masyarakat dibagi menjadi berapa metode..
- a. 2
 - b. 3
 - c. 4
 - d. 5
 - e. 6
- 9) Kelompok metode percakapan tak langsung, dapat melalui...
- a. Foto
 - b. Pamflet
 - c. TV
 - d. Dialog
 - e. Brosur
- 10) Kelompok metode media masa, dapat melalui...
- a. Folder
 - b. Brosur
 - c. Pamflet
 - d. Surat kabar
 - e. Ceramah

B. Essay

- 1) Jelaskan pengertian dari pembangunan berbasis masyarakat.
- 2) Sebutkan dan jelaskan ciri-ciri pembangunan berbasis masyarakat.
- 3) Sebutkan tahapan pembangunan berbasis masyarakat.

- 4) Dalam tahapan pembangunan berbasis masyarakat, ada tahapan pelaksanaan kegiatan, terdiri dari apa saja kah pelaksanaan kegiatan tersebut.
- 5) Sebutkan metode pembangunan berbasis masyarakat.

BAB VI

Model School Based Management (SBM)

1. Kompetensi

Konsep dasar dari model school based management (MBS), Menjelaskan MBS sebagai proses pemberdayaan dan memahami cara implementasi model school based management (MBS)

2. Tujuan Pembelajaran

Mahasiswa dapat memahami bagaimana konsep dasar dari MBS serta mahasiswa mampu mengetahui bagaimana Model School Based Management (SBM)

3. Isi Materi

E. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Menurut Mulyasa (2002, hal. 24) Manajemen berbasis sekolah merupakan model manajemen pendidikan yang telah dilaksanakan di beberapa negara. Di Indonesia penerapan model MBS disesuaikan terlebih dahulu dengan sistem di Indonesia. MBS ini diterapkan dengan tujuan agar sekolah diberi wewenang untuk mengelola sekolahnya semaksimal mungkin dan dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolah tersebut. Untuk mendukung pelaksanaan MBS ini satuan pendidikan yang ada di sekolah, seperti guru dan kepala sekolah perlu mengetahui alasan, landasan, dan bagaimana menerapkan MBS di sekolah masing-masing.

Istilah manajemen berbasis sekolah merupakan kata dari “ *School Based Management* “. Istilah ini muncul di Amerika Serikat ketika masyarakat mulai mempertanyakan relevansi pendidikan dengan tuntutan dan perkembangan setempat. MBS merupakan paradigma baru pendidikan, yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah pelibatan masyarakat dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional.

Selain dari pengertian di atas, Secara leksikal, MBS berasal dari 3 kata yaitu: *Manajemen Berbasis Sekolah*. *Manajemen* adalah proses menggunakan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. *Berbasis* memiliki kata dasar basis yang berarti dasar atau asas. *Sekolah*

adalah lembaga untuk belajar dan mengajarserta tempat menerima dan memberikan pelajaran. Dari definisi diatas MBS dapat diartikan sebagai pengguna sumber daya yang berasaskan pada sekolah itu sendiri, dalam proses pelajaran atau pengajaran. MBS adalah bentuk alternatif sekolah sebagai hasil dari Desentralisasi Pendidikan. MBS pada prinsipnya bertumpu pada sekolah dan masyarakat serta jauh dari Birokrasi yang Sentralistik.

Pada sistem MBS, sekolah dituntut secara mandiri menggali, mengalokasikan, menentukan prioritas, mengendalikan dan mempertanggungjawabkan pemberdayaan sumber-sumber baik kepada masyarakat maupun pemerintah.

Kewenangan yang bertumpu pada sekolah merupakan inti dari MBS yang dipandang memiliki ektivitas tinggi serta memberikan beberapa keuntungan sebagai berikut:

- Kebijakan dan kewenangan sekolah yang membawa pengaruh langsung kepada peserta didik, orang tua maupun guru.
- Bertujuan bagaimana memanfaatkan sumber daya lokal.
- Efektif dalam melakukan pembinaan peserta didik, seperti kehadiran, hasil belajar, tingkat pengulangan tingkat putussekolah, moral guru dan ilim sekolah.
- Adanya perhatian bersama untuk mengambil keputusan, memberdayakan guru, manajemen sekolah, rencana ulang sekolah, dan perubaha perencanaan (Fattah,2000).

1) Tujuan MBS

Manajemen berbasis sekolah (MBS) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai keunggulan masyarakat bangsa dalam penguasaan ilmu dan tekhnologi.

MBS yang ditandai dengan otonomi sekolah dan pelibatan masyarakat merupakan respons pemerintah terhadap gejala-gejala yang muncul di masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan.peningkatan efisiensi, antara lain diperoleh

melalui keleluasaan mengelola sumberdaya partisipasi masyarakat dan penyederhanaan birokrasi. Dan peningkatan mutu diperoleh melalui partisipasi orangtua terhadap sekolah, fleksibilitas pengelolaan sekolah, peningkatan profesionalisme guru dan kepala sekolah, dan berlakunya sistem insentif dan disinsentif. Sementara peningkatan pemerataan diperoleh melalui peningkatan partisipasi masyarakat yang memungkinkan pemerintah lebih berkonsentrasi pada kelompok tertentu.

2) Manfaat MBS

MBS memberikan kebebasan dan keleluasaan yang besar pada sekolah, disertai seperangkat tanggung jawab. Keleluasaan dalam mengelola sumber daya dan dalam menyertakan masyarakat untuk berpartisipasi, mendorong profesionalisme kepala sekolah, dalam peranannya sebagai manajer maupun pemimpin sekolah. Dengan adanya kesempatan yang diberikan kepada sekolah untuk menyusun kurikulum, guru juga didorong untuk berinovasi di lingkungan sekolahnya. Dengan demikian, MBS mendorong profesionalisme guru dan kepala sekolah. Melalui penyusunan kurikulum elektif, rasa tanggap sekolah terhadap kebutuhan setempat meningkatkan dan menjamin layanan pendidikan sesuai dengan tuntutan peserta didik dan masyarakat sekolah. Prestasi peserta didik dapat di maksimalkan melalui peningkatan partisipasi orang tua, misalnya, orang tua dapat mengawasi langsung proses belajar anak nya.

MBS menekankan keterlibatan maksimal berbagai pihak, seperti pada sekolah-sekolah swasta, sehingga menjamin partisipasi staf, orang tua, peserta didik, dan masyarakat yang lebih luas dalam perumusan-perumusan keputusan tentang pendidikan. Kesempatan berpartisipasi tersebut dapat meningkatkan komitmen mereka terhadap sekolah. Selanjutnya, aspek-aspek tersebut pada akhirnya akan mendukung efektivitas dalam pencapaian tujuan sekolah. Adanya kontrol dari masyarakat dan monitoring dari pemerintah, pengelolaan sekolah menjadi lebih akuntabel, transparan, egaliter, dan demokratis,

serta menghapuskan monopoli dalam pengelolaan pendidikan. Untuk kepentingan tersebut di perlukan kesiapan pengelola pada berbagai level untuk melakukan perannya sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab.

3) Karakteristik MBS

Karakteristik MBS bisa diketahui antara lain dari bagaimana sekolah dapat mengoptimalkan kinerja organisasi sekolah, proses belajar-mengajar, pengelolaan sumber daya manusia, dan pengelolaan sumber daya dan administrasi. Lebih lanjut BPPN dan BANK Dunia (1999), mengutip dari Focus on School The Future Organisation of Education Services for Student, Departement of Education, Australia (1990), mengemukakan ciri-ciri MBS sebagai berikut:

a. Organisasi Sekolah

- (1) Menyediakan manajemen organisasi kepemimpinan transformasional dalam mencapai tujuan sekolah
- (2) Menyusun rencana sekolah dan merumuskan kebijakan untuk sekolah mandiri
- (3) Mengelola kegiatan operasional sekolah
- (4) Menjamin adanya komunikasi yang efektif antara sekolah/dan masyarakat terkait (school community)
- (5) Menjamin akan terpeliharanya sekolah yang bertanggung jawab (akun-tabel kepada masyarakat dan pemerintah)

b. Proses Belajar Mengajar

- (1) Meningkatkan kualitas belajar siswa
- (2) Mengembangkan kurikulum yang cocok dan tanggap terhadap kebutuhan siswa dan masyarakat sekolah
- (3) Menyelenggarakan pengajaran yang efektif
- (4) Program pengembangan yang diperlukan siswa

c. Sumber Daya Manusia

- (1) Memberdayakan staf dan menempatkan personel yang dapat melayani keperluan siswa

- (2) Memilih staf yang memiliki wawasan manajemen berbasis sekolah
- (3) Menyediakan kegiatan untuk pengembangan profesi pada semua staf
- (4) Menjamin kesejahteraan staf dan siswa
- (5) Kesejahteraan staf dan siswa
- d. Sumber Daya dan Administrasi
 - (1) Mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan dan mengalokasikan sumber daya tersebut sesuai dengan kebutuhan
 - (2) Mengelola dana sekolah
 - (3) Menyediakan dukungan administratif
 - (4) Mengelola dan memelihara gedung dan sarana lainnya
 - (5) Memelihara gedung dan sarana lainnya
- e. Prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah

Menurut Nurkholis (2002, hal. 155), ada beberapa prinsip dalam Manajemen Berbasis Sekolah, antara lain :

(1) *Prinsip Ekuifinalitas (Principle of equifinality)*

Prinsip ini didasarkan pada teori manajemen yang berasumsi pada bahwa terdapat beberapa cara yang berbeda untuk tercapai beberapa tujuan. MBS menekankan fleksibilitas sehingga sekolah harus dikelola oleh warga sekolah menurut kondisi mereka masing-masing. Karena kompleksnya pekerjaan sekolah saat ini dan adanya perbedaan besar antara sekolah yang satu dengan yang lain, misalnya tingkat akademik dan situasi komunitasnya.

(2) *Prinsip Desentralisasi (Principle of Decentralization)*

Prinsip ini dilandasi oleh teori dasar bahwa pengelolaan sekolah dan aktivitas pengajaran tidak dapat dielakan dari kesulitan dan permasalahan.

(3) *Prinsip Sistem Pengelolaan Mandiri (Principle of self-managing system)*

MBS menyadari pentingnya untuk mempersilahkan sekolah menjadi sistem pengelolaan secara mandiri dibawah kebijakannya sendiri. Sekolah memiliki otonomi tertentu untuk mengembangkan tujuan pengajaran, strategi manajemen, distribusi sumber daya manusia dan sumber daya lainnya, memecahkan masalah dan mencapai tujuan berdasarkan kondisi mereka masing-masing.

(4) *Prinsip inisiatif manusia (principle of human initiative)*

Prinsip ini mengakui bahwa manusia bukanlah sumber daya yang statis melainkan dinamis. Oleh karena itu, potensi manusia harus digali, ditemukan, kemudian dikembangkan. Sekolah dan lembaga pendidikan yang lebih luas tidak dapat lagi menggunakan istilah *staffing* yang konotasinya yang mengelola manusia sebagai barang yang statis. Lembaga pendidikan harus menggunakan pendekatan *human resources development* yang memiliki konotasi dinamis dan menganggap serta memperlakukan manusia di sekolah sebagai aset yang sangat penting dan memiliki potensi untuk terus dikembangkan.

F. MBS Sebagai proses Pemberdayaan

Menurut Mulyasa. E (2002, hal. 31), Pemberdayaan merupakan istilah yang sangat populer dalam era reformasi. Jika dikaitkan dengan terminology demokratisasi, pembangkitan ekonomi kerakyatan, keadilan dan penegakan hukum, serta partisipasi politik. Pemberdayaan dimaksudkan untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat dalam perekonomiannya, hak-haknya, dan memiliki posisi yang seimbang dengan kaum lain yang selama ini telah lebih mapan kehidupannya. Melalui pemberdayaan, kaum idealis atau para pejuang demokrasi, keadilan, dan hak asasi manusia menginginkan adanya tata kehidupan yang lebih adil, demokratis, serta tegaknya kebenaran dan keadilan.

Dalam dunia pendidikan, pemberdayaan adalah cara yang sangat praktis dan produktif untuk mendapatkan hasil yang terbaik dari kepala sekolah (manajer), para guru, dan para pegawai. Proses yang ditempuh untuk mendapatkan hasil terbaik dan produktif tersebut adalah dengan membagi tanggung jawab secara proporsional kepada para guru. Satu prinsip yang terpenting dari pemberdayaan ini adalah melibatkan guru dalam proses pengambilan keputusan dan tanggung jawab.

Dalam MBS, pemberdayaan dimaksudkan untuk memperbaiki kinerja sekolah agar dapat mencapai tujuan secara optimal, efektif, dan efisien. MBS sebagai proses pemberdayaan merupakan cara untuk membangkitkan kemauan dan potensi peserta didik agar memiliki kemampuan mengontrol diri dan lingkungannya untuk dimanfaatkan bagi kepentingan peningkatan kesejahteraan.

Pada dasarnya pemberdayaan terjadi melalui beberapa tahap. Pertama, masyarakat mengembangkan sebuah kesadaran awal bahwa mereka dapat melakukan tindakan untuk meningkatkan kehidupannya dan memperoleh seperangkat keterampilan agar mampu bekerja lebih baik. Tahap kedua, mereka akan mengalami pengurangan perasaan ketidakmampuan dan mengalami peningkatan kepercayaan diri. Akhirnya, ketiga, seiring dengan tumbuhnya keterampilan dan kepercayaan diri, masyarakat bekerja sama untuk berlatih lebih banyak mengambil keputusan dan memilih sumber-sumber daya yang akan berdampak pada kesejahteraan mereka.

Untuk dapat memahami dan menerapkan MBS sebagai proses pemberdayaan terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, seperti dijelaskan berikut ini:

- 1) Pemberdayaan berhubungan dengan upaya peningkatan kemampuan, masyarakat untuk memegang control (atas diri dan lingkungannya); dari konsepsi itu perlu dilakukan upaya yang memperhatikan prinsip-prinsip,
 - a. Melakukan pembangunan yang bersifat lokal,
 - b. Mengutamakan dan merupakan aksi sosial,

- c. Menggunakan pendekatan organisasi kemasyarakatan setempat.
- 2) Adanya kesamaan dan kesepadanan kedudukan dalam hubungan kerja dari konsepsi itu perlu dilakukan upaya yang memperhatikan prinsip-prinsip,
- a. Manajemen yang swakelola oleh para guru dan kepala sekolah,
 - b. Kepemimpinan oleh masyarakat (tumbuhnya rasa memiliki pada masyarakat terhadap program sekolah),
 - c. Pemantauan langsung oleh pemerintah daerah,
 - d. Tumbuhnya rasa kebersamaan (collectives),
 - e. Bekerja secara kolaborasi antara berbagai pihak yang berkepentingan dengan sekolah, baik dari pihak sekolah, masyarakat pemerintah, lembaga swasta, maupun pihak-pihak lain.
- 3) Menggunakan pendekatan *partisipatif*. Dari konsepsi tersebut beberapa prinsip yang perlu diaktualisasikan adalah
- a. Merumuskan tujuan bersama, antara sekolah dan masyarakat;
 - b. Menyikapi proses peluncuran program MBS sebagai sebuah proses dialog, dan
 - c. Melakukan pembangunan sendiri.
- 4) Pendidikan untuk keadilan, dari konsepsi itu, beberapa prinsip yang perlu diimplementasikan adalah
- a. Mengembangkan kesadaran kritis;
 - b. Menggunakan metode diskusi dalam kelompok kecil;
 - c. Menggunakan stimulus berupa masalah-masalah;
 - d. Menggunakan sarana, seperti permainan, sebagai alat untuk membantu masyarakat melihat kembali dan membuat refleksi tentang realitas yang dihadapi;
 - e. Memusatkan perhatian pada pengembangan sistem sosial dari pada individu-individu;
 - f. Mengutamakan penyelesaian konflik secara menang-menang (win-win solution);
 - g. Menjalin hubungan antar manusia yang bersifat non-hierarkhis, termasuk melalui dialog dan pembagian kepemimpinan; dan

- h. Menggunakan fasilitator yang komit terhadap pembebasan.

G. Manajemen Komponen-komponen Sekolah

Manajemen sekolah pada hakikatnya mempunyai pengertian yang hampir sama dengan manajemen pendidikan. Ruang lingkup dan bidang kajian manajemen sekolah juga merupakan ruang lingkup dan bidang kajian manajemen pendidikan. Namun demikian, manajemen pendidikan mempunyai jangkauan yang lebih luas daripada manajemen sekolah. Dengan perkataan lain, manajemen sekolah merupakan bagian dari manajemen pendidikan atau penerapan manajemen pendidikan dalam organisasi sekolah sebagai salah satu komponen dari sistem pendidikan yang berlaku. Manajemen sekolah terbatas pada satu sekolah saja, sedangkan manajemen pendidikan meliputi seluruh komponen sistem pendidikan, bahkan bisa menjangkau sistem yang lebih luas dan besar (suprasistem) secara regional, nasional, bahkan internasional.

Hal yang paling penting dalam implementasi manajemen berbasis sekolah adalah manajemen terhadap komponen-komponen sekolah itu sendiri. Sedikitnya terdapat tujuh komponen sekolah yang harus dikelola dengan baik dalam rangka MBS, yaitu kurikulum dan program pengajaran, tenaga kependidikan, kesiswaan, keuangan, sarana dan prasarana pendidikan, pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat, serta manajemen pelayanan khusus lembaga pendidikan (Mulyasa, 2002, hal. 39).

H. Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (Mbs)

Beberapa langkah penting dalam pelaksanaan MBS berikut penjelasannya:

1) Evaluasi diri (*self assesment*)

Evaluasi diri adalah langkah awal bagi sekolah yang ingin atau akan melaksanakan manajemen berbasis sekolah. Kegiatan ini dimulai dengan curah pendapat (*brainstorming*) yang diikuti oleh kepala sekolah, guru, dan seluruh staf, serta diikuti juga anggota kepala komite. Adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan ini yaitu:

- a. Mengetahui segala aspek sekolah (seluruh komponen sekolah), kemajuan yang telah dicapai maupun masalah-masalah yang dihadapi ataupun kelemahan yang dialami.
- b. Refleksi/mawas diri, untuk membangkitkan kesadaran/ keprihatinan akan penting dan perlunya pendidikan yang bermutu sehingga timbul komitmen bersama untuk meningkatkan mutu (*sense of quality*)
- c. merumuskan titik tolak (*point of departure*) bagi sekolah dalam mengembangkan diri terutama dalam hal mutu. Titik awal ini penting karena sekolah yang sudah berjalan untuk memperbaiki mutu, mereka tidak berangkat dari nol, melainkan dari kondisi yang dimiliki.

Evaluasi atau penilaian diri sering disebut *school review* atau penilaian keadaan sekolah secara menyeluruh sebagai tindakan awal sebelum melakukan perencanaan pengembangan sekolah.

2) Perumusan visi, misi, dan tujuan

Bagi sekolah yang baru didirikan, perumusan visi, misi serta tujuan merupakan langkah awal yang harus dilakukan, hal ini menjelaskan kemana arah yang ingin dituju oleh pendiri/ penyelenggara pendidikan. Bagi sekolah yang sudah berjalan perumusan visi misi dan tujuan merupakan langkah lanjutan sebagai tindak lanjut dari kegiatan evaluasi diri, terutama bagi sekolah yang belum memiliki rumusan yang jelas.

Rumusan visi dari suatu lembaga bukan hanya menggambarkan mimpi yang diidamkan, tetapi mengkomunikasikan tujuan akhir (*ultimate goal*), nilai yang dianut dan sikap pendirian yang dianut oleh suatu institusi.

Misi merupakan jabaran dari visi atau komponen pokok yang harus direalisasikan untuk mencapai visi yang telah ditentukan.

Perumusan tujuan, suatu rangkaian penting dalam langkah strategi manajemen mutu pendidikan setelah visi, misi. Tujuan jangka panjang dalam hal ini telah terumuskan dalam visi dan misi.

3) Perencanaan

Perencanaan pada tingkat sekolah adalah kegiatan yang ditujukan untuk menjawab apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Perencanaan oleh sekolah merupakan persiapan yang teliti tentang kegiatan yang akan dilakukan dan skenario melaksanakannya untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

4) Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan, pada dasarnya menjawab bagaimana semua fungsi manajemen sebagai suatu proses untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui kerja sama dengan orang lain dan dengan sumber daya yang ada, dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya (efektif dan efisien). Pelaksanaan juga dapat diartikan sebagai kegiatan merealisasikan apa yang telah direncanakan.

5) Evaluasi

Evaluasi sebagai salah satu tahapan dalam MBS merupakan kegiatan yang penting untuk mengetahui kemajuan atau hasil yang dicapai sekolah dalam melaksanakan fungsinya sesuai rencana yang telah dibuat oleh masing-masing lembaga.

6) Pelaporan

Pelaporan diartikan sebagai pemberian atau penyampaian informasi tertulis dan resmi kepada berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholder), mengenai aktivitas manajemen suatu pendidikan dan hasil yang dicapai dalam kurun waktu tertentu berdasarkan rencana dan aturan yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tugas dan fungsi yang diemban oleh suatu pendidikan tersebut (Umaedi, 2008, hal. 77).

4. Latihan Soal

A. Pilihan Ganda

- 1) Apakah yang dimaksud dengan MBS?
 - a. Model pendidikan yang berbasis sekolah

- b. Model pendidikan yang berbasis edukasi
 - c. Model pendidikan yang berbasis kinerja
 - d. Model pendidikan yang berbasis moneter
- 2) Salah satu manfaat penerapan MBS adalah sekolah dapat merespons secara...
- a. Cepat dan tepat perubahan lingkungan serta tuntutan dan aspirasi masyarakat tanpa selalu memohon petunjuk.
 - b. Cepat dan tepat perubahan lingkungan serta tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan tetap mohon petunjuk
 - c. Cepat perubahan lingkungan serta tuntutan dan aspirasi masyarakat tanpa selalu mohon petunjuk
 - d. Cepat perubahan lingkungan serta tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan tetap mohon petunjuk
- 3) Bagaimana keterkaitan antara MBS dan muatan lokal?
- a. MBS dapat mengakomodasikan sekolah negeri dan swasta untuk mengembangkan kekhususan melalui muatan lokal.
 - b. MBS dapat mengakomodasikan sekolah negeri dan swasta untuk mendorong kompetisi mutu.
 - c. MBS dapat mengakomodasikan sekolah negeri dan swasta untuk mengembangkan kekhususan dan mendorong kompetisi mutu.
 - d. MBS dapat mengakomodasikan sekolah negeri dan swasta untuk mengembangkan kekhususan untuk mendorong kompetisi mutu.
- 4) Manusia yang adaptif adalah manusia yang...
- a. Memiliki kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungannya sehari-hari.
 - b. Memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
 - c. Memiliki ketabahan dalam menghadapi berbagai perubahan yang terjadi di lingkungannya.
 - d. Berkemampuan tinggi untuk menghadapi berbagai perubahan yang terus menerus.

- 5) Manajemen berbasis sekolah juga ‘memaksa’ guru untuk ditingkatkan kemampuan profesionalnya karena...
 - a. Kebanyakan guru tidak memahami MBS
 - b. Kebanyakan guru menghendaki peningkatan kemampuan profesionalnya.
 - c. Implementasi KBK akan berjalan optimal apabila didukung oleh pemahaman guru terhadap MBS.
 - d. KBK dapat berjalan beriringan dengan MBS.
- 6) Dengan implementasi MBS peranan kepemimpinan kepala sekolah akan menjadi...
 - a. Ringan karena bersifat top-down
 - b. Berat karena bersifat top-down
 - c. Ringan karena bersifat bottom-up
 - d. Berat karena bersifat bottom-up.
- 7) Kurikulum berbasis kompetensi merupakan...
 - a. Muara dan proses pembelajaran
 - b. Bagian terpenting dari bangunan segi empat MBS
 - c. Materi yang harus dikerjakan dalam MBS
 - d. Isi yang membawa arah dan tujuan pembelajaran.
- 8) Evaluasi kinerja kepala sekolah dalam konteks di sekolah dasar dilakukan oleh....
 - a. pengawas dari dinas pendidikan kecamatan
 - b. komite sekolah
 - c. guru
 - d. jawaban A, B, dan C benar
- 9) Evaluasi diri yang objektif hendaknya ...
 - a. Dilakukan oleh unsur eksternal sekolah
 - b. Dilandasi oleh kesadaran untuk membuka jati diri
 - c. Adanya pertimbangan antara yang positif dengan yang negatif
 - d. Dilakukan oleh kepala sekolah dan komite sekolah.
- 10) Perumusan visi sekolah dapat dilakukan sesuai dengan pilihan yaitu ...
 - a. Visi sekolah tidak bertentangan dengan misi sekolah

- b. Misi sekolah hendaknya tidak bertentangan dengan visi sekolah
- c. Visi sekolah dapat dirumuskan setelah sekolah mempunyai misi dan tujuan yang jelas
- d. Visi sekolah hendaknya dirumuskan sesuai dengan aspirasi komite sekolah.

B. Essay

- 1) Self assesment sedikit berbeda dengan school review karena...
- 2) Apakah yang menjadi inti dari manajemen berbasis sekolah?
- 3) Dalam manajemen berbasis sekolah keberadaan dana merupakan ...
- 4) Dalam model manajemen berbasis sekolah, peserta didik
- 5) Perumusan visi dan misi sekolah, termasuk dalam kegiatan..

Jawaban

A. Pilihan Ganda

- 1) A
- 2) A
- 3) C
- 4) D.
- 5) C.
- 6) A.
- 7) D
- 8) D.
- 9) B.
- 10) C.

B. Essay

- 1) Self assesment lebih mempunyai nuansa afektif dibandingkan dengan school review.
- 2) Kebebasan bagi kepala sekolah untuk mengambil keputusan bersama stakeholder.
- 3) Salah satu keharusan karena pendidikan yang murah tidak dapat menghasilkan kualitas yang optimal.

- 4) Memperoleh hak untuk ikut serta dalam menentukan kebijakan sekolah.
- 5) Planning.

BAB VII

Model Community Learning center (CLC)

1. Pokok Pembahasan

Model Community Learning Center

2. Tujuan Pembelajaran

Mahasiswa bias memahami Model Community Learning Center

3. Konteks dan Isi Materi Pembelajaran

A. Definisi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (CLC)

Beberapa definisi lain dari PKBM yang teridentifikasi di antaranya adalah: UNESCO (1998) memberikan definisi: A CLC is a local educational institution outside of formal education system, for villages or urban areas, usually set up and managed by local people to provide various learning opportunities for community development and improvement of people's quality of life.

Umberto Sihombing (1999), menyebutkan PKBM adalah sebuah model pelebagaan yang diartikan, bahwa PKBM sebagai basis pendidikan masyarakat, dikelola secara professional oleh LSM atau organisasi kemasyarakatan lainnya, sehingga masyarakat dengan mudah dapat berhubungan dengan PKBM dan meminta informasi tentang berbagai program pendidikan masyarakat, persyaratannya, dan jadwal pelaksanaannya. Pelebagaan artinya menempatkan PKBM sebagai basis penyelenggaraan program pendidikan masyarakat di tingkat operasional (desa/kelurahan). Program pendidikan masyarakat yang selama ini terpisah-pisah dan dilaksanakan di berbagai tempat seperti di rumah penduduk, gedung sekolah, balai desa, dan tempat lainnya serta berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya, diupayakan untuk dipusatkan di PKBM.

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan, bahwa PKBM adalah sebuah lembaga pendidikan yang dikembangkan dan dikelola oleh masyarakat serta diselenggarakan di luar sistem pendidikan formal baik di perkotaan maupun di pedesaan dengan tujuan untuk memberikan kesempatan belajar kepada seluruh lapisan masyarakat agar mereka mampu membangun dirinya secara mandiri sehingga dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Sehingga dengan definisi tersebut, PKBM berperan

sebagai tempat pembelajaran masyarakat terhadap berbagai pengetahuan atau keterampilan dengan memanfaatkan sarana, prasarana, dan potensi yang ada di sekitar lingkungannya (desa, kota), agar masyarakat memiliki keterampilan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup. (Kamil, Mustofa. 2011: 76)

B. Fungsi PKBM

Program pendidikan nonformal yang diselenggarakan melalui PKBM diprakarsai sendiri oleh masyarakat. Ada yang dikelola perorangan, perusahaan, lembaga kursus, pesantren, LSM, dan masyarakat lainnya. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (CLC) dalam pengembangan program-programnya, terutama dalam membangun dan mengembangkan program pembelajarannya secara ideal harus mampu memadukan unsur keilmuan dan wirausaha. Unsur keilmuan (akademik) diharapkan mampu membantu menambah wawasan dan pengetahuan warga belajar, sedangkan unsur wirausaha dapat membentuk jiwa (entrepreneur) warga belajar.

Melalui bekal tersebut diharapkan, pada saat terjun ke masyarakat, warga belajar tidak hanya memiliki kemampuan secara akademik tetapi juga kemampuan untuk melihat berbagai kemungkinan atau berbagai peluang yang ada dan terjadi di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan keahlian (kompetensinya). Misalnya berkaitan dengan kemampuan akses pasar, mencari pesanan (order), dan masuk ke berbagai sumber dana yang ada di masyarakat. Berdasarkan pada peran ideal PKBM (CLC) ada beberapa fungsi yang dapat dijadikan acuan, dimana fungsi-fungsi tersebut berhubungan satu sama lain secara terintegrasi.

1) Tempat masyarakat belajar (Learning Society)

PKBM merupakan tempat masyarakat memperoleh berbagai ilmu pengetahuan dan bermacam ragam keterampilan fungsional sesuai dengan kebutuhannya, sehingga masyarakat berdaya dalam meningkatkan kualitas hidup dan kehidupannya.

2) Tempat tukar belajar (Learning Exchange)

PKBM memiliki fungsi sebagai tempat terjadinya pertukaran berbagai informasi (pengalaman), ilmu pengetahuan dan keterampilan antar warga belajar, sehingga antara warga belajar yang satu dengan yang lainnya bisa saling mengisi. Sehingga setiap warga belajar sangat dimungkinkan dapat berperan sebagai sumber belajar bagi warga belajar lainnya (masyarakat lainnya).

3) Pusat pengetahuan dan informasi atau perpustakaan masyarakat

Sebagai perpustakaan masyarakat PKBM harus mampu berfungsi sebagai bank informasi, artinya PKBM dapat dijadikan tempat menyimpan berbagai informasi pengetahuan dan keterampilan secara aman dan kemudian disalurkan kepada seluruh masyarakat atau warga belajar yang membutuhkan. Namun demikian karena sebagai bank pengetahuan ada kewajiban bagi pengelola untuk menambah berbagai pengetahuan dan keterampilan tersebut secara inovatif, melalui penelitian, pengkajian dan pengembangan model sebelum disalurkan. Sehingga peran PKBM tidak hanya sekedar sebagai penyalur atau pusat sumber informasi belaka. Fungsi PKBM sebagai perpustakaan masyarakat adalah hal yang sangat ideal, di mana masyarakat bisa memperoleh berbagai informasi baru di PKBM. Kondisi ini sesuai dengan fungsi Kominkan.

4) Sebagai sentra pertemuan berbagai lapisan masyarakat

Fungsi PKBM dalam hal ini, tidak hanya berfungsi sebagai tempat pertemuan antara pengelola dengan sumber belajar dan warga belajar serta dengan tokoh masyarakat atau dengan berbagai lembaga (pemerintah dan swasta/LSM, ormas), akan tetapi PKBM berfungsi sebagai tempat berkumpulnya seluruh komponen masyarakat dalam berbagai bidang sesuai dengan kepentingan, masalah dan kebutuhan masyarakat serta selaras dengan azas dan prinsip learning society atau pengembangan pendidikan dan pembelajaran (lifelong learning dan lifelong education).

5) Pusat penelitian masyarakat (community research centre)

Terutama dalam pengembangan pendidikan nonformal, PKBM berfungsi sebagai tempat menggali, mengkaji, menelaah (menganalisa) berbagai persoalan atau permasalahan dalam bidang pendidikan dan keterampilan baik yang berkaitan dengan program yang dikembangkan di PKBM maupun berkaitan dengan program-program lain yang selaras dengan azas dan tujuan PKBM. Fungsi kelima harus disesuaikan dengan permasalahan dan sumberdaya yang dimiliki PKBM, baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya penunjang lainnya. (Kamil, Mustofa. 2011:78-79)

C. Prinsip pengembangan program PKBM

Beberapa prinsip dasar yang harus menjadi acuan dalam pengembangan dan menyusun program PKBM diantaranya adalah:

- 1) program yang dikembangkan PKBM harus meluas (broad) sehingga warga belajar memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan pengalaman tentang pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai yang berkaitan dengan etika, estetika, logika, dan kinestetika pada saat pembelajaran
- 2) Program harus memiliki prinsip keseimbangan (balanced) dimana setiap kompetensi yang dikembangkan dalam program PKBM harus dapat dicapai melalui alokasi waktu yang cukup untuk sebuah proses pembelajaran yang efektif
- 3) program yang dikembangkan PKBM harus relevan karena setiap program terkait dengan penyiapan warga belajar untuk meningkatkan mutu kehidupan melalui kesempatan, pengalaman, dan latihan dalam berperan dan bersikap secara bertanggungjawab dalam mewujudkan kedewasaan berfikirnya
- 4) program yang dikembangkan PKBM harus mampu mengedepankan konsep perbedaan (differentiated), prinsip ini merupakan upaya pelayanan individual dimana warga belajar harus memahami: apa yang perlu dipelajari; bagaimana berpikir, bagaimana belajar, dan berbuat

untuk mengembangkan potensi dan kebutuhan dirinya masing-masing secara optimal

Berdasarkan kepada prinsip-prinsip tersebut penyusunan program PKBM tidak mungkin dilakukan sekali jadi. Oleh karena itu diperlukan perbaikan dan pemantapan. Program PKBM perlu dikaji secara berulang-ulang sebelum digulirkan. Jika program dikaji dari berbagai sudut pandang dan kepentingan, maka program yang dikembangkan akan efektif, efisien dan berhasil sesuai dengan tujuan PKBM, tujuan warga belajar (masyarakat) dan tujuan pemerintah. Untuk mendukung terlaksananya prinsip-prinsip tersebut, maka ada beberapa hal yang perlu menjadi patokan pengembang PKBM meliputi:

- 1) kualitas sumberdaya manusia yang mengusung program
- 2) kemampuan bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu (masyarakat, pemerintah dan sumber-sumber lainnya)
- 3) kemampuan (kualitas, kompetensi) sumber belajar (tutor, fasilitator) terutama kesesuaian dengan program
- 4) warga belajar yang berminat dan butuh dengan program yang dikembangkan
- 5) fasilitas pendukung program yang refresentatif sesuai dengan kebutuhan program
- 6) partisipasi masyarakat dalam pengembangan program
- 7) alat control (supervisi, monitoring dan evaluasi) program
- 8) daya dukung lain seperti model yang akan dikembangkan, materi, modul atau sumber lain yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran dan sasaran didik
- 9) anggaran untuk mendukung program
- 10) pemeliharaan program agar program tetap eksis
- 11) pengembangan program ke depan

(Kamil, Mustofa. 2011:80)

D. Program PKBM

- 1) Bidang Pendidikan

Bidang pendidikan merupakan program andalan PKBM saat ini. Terutama program-program yang menjadi kebijakan pemerintah atau Departemen Pendidikan Nasional khususnya Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah. Beberapa program yang dikembangkan PKBM diantaranya adalah:

a. Program keaksaraan fungsional

Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan keaksaraan dasar warga masyarakat yang masih buta aksara. Kegiatan belajar keaksaraan fungsional dilaksanakan selama 6 bulan dalam kegiatan kelompok belajar, tiap-tiap kelompok memiliki rata-rata 10 orang warga belajar. Setiap kelompok dibimbing oleh 1 orang tutor dan 1 orang fasilitator. Materi pembelajaran dan bahan atau sarana pembelajaran dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan mata pencaharian warga belajar. Perkembangan kemampuan dan keterampilan warga belajar dicatat oleh tutor sebagai hasil evaluasi pembelajaran, terutama berhubungan dengan mata pencahariannya, baik dalam bentuk tulisan maupun perubahan tingkah laku warga belajar selama mengikuti (proses) pembelajaran. Sangat dimungkinkan tidak ada tes khusus hasil belajar.

b. Pengembangan anak dini usia (early childhood)

Salah satu program yang dikembangkan di PKBM adalah program pendidikan anak usia dini, di luar PKBM. Konsep pembangunan sumber daya manusia (SDM) justru dimulai sejak masa usia dini. Oleh karena itu untuk meningkatkan kualitas hasil pendidikan dan kualitas SDM, pendidikan anak usia dini harus lebih digalakkan dan ditingkatkan. Pendidikan bagi anak bukan sekadar meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sebagai bekal menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Akan tetapi untuk mempersiapkan masa depan anak yang penuh tantangan, pendidikan harus memungkinkan anak mengembangkan potensi dirinya, termasuk mengembangkan kecerdasan dan kreativitasnya.

Pertumbuhan dan perkembangan anak akan optimal bila pendidikan dilaksanakan sedini mungkin. Fasli Jalal (2002).

c. Program kesetaraan (Equivalency Education)

Rendahnya kualitas sumber daya manusia Indonesia salah satunya diakibatkan oleh tingginya angka putus sekolah, pada level pendidikan dasar dan level pendidikan menengah. Oleh karena permasalahan-permasalahan tersebut, program kesetaraan merupakan program yang sangat vital dalam menjawab permasalahan kualitas (mutu) sumber daya manusia. Sesuai dengan fungsi dan perannya PKBM sebagai pusat kegiatan pembelajaran masyarakat memiliki peran penting dalam mengembangkan program-program kesetaraan di tengah-tengah masyarakatnya. Program kesetaraan melingkupi program Kelompok Belajar Paket A setara SD/MI, Kelompok Belajar Paket B setara SMP/MTs dan Kelompok Belajar Paket C setara SMA/MA. Kelompok belajar Paket C setara SMA/MA merupakan program baru di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, karena program ini baru berkembang sekitar tahun 2003. Hal ini sejalan dengan ditetapkannya UU Sisdiknas No.20/2003 Pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program Paket A, Paket B, dan Paket C (Penjelasan Pasal 26 Ayat (3) UU Sisdiknas No. 20/2003). Penjelasan berikutnya menyebutkan: Pendidikan Kesetaraan dapat dilaksanakan pada satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis ta'lim, serta satuan pendidikan yang sejenis. Untuk menjawab berbagai program tersebut PKBM sebagai salah satu lembaga pendidikan masyarakat, memiliki peran untuk merealisasikan program kesetaraan melalui pengembangan di PKBM sendiri atau bekerjasama dengan pihak lain atau lembaga lain. Program kesetaraan Paket A, dilaksanakan

dengan prioritas kepada anak-anak usia sekolah dasar yang tidak sekolah, atau putus Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyyah yang berada pada usia wajib belajar (7-15 tahun). pada pendidikan kesetaraan Paket A setara SD dikenal dengan sistem level, dimana untuk level pendidikan dasar paket A setara SD hanya memiliki 2 level yakni paket A awal dan paket A dasar atau dikenal dengan istilah darjah awal dan dasar. Program kesetaraan Paket B, program ini setara dengan SMP/MTs, PKBM yang mengembangkan program kesetaraan Paket B ditujukan bagi siswa lulusan SD/MI, lulusan Kelompok belajar Paket A atau masyarakat yang telah memperoleh pendidikan khusus melalui pendidikan informal yang telah di setarakan seperti home schooling, pendidikan pesantren dll. Di samping itu pula program kesetaraan Paket B ditujukan bagi masyarakat yang putus SMP/MTs dengan prioritas pada anak usia wajib belajar karena berbagai faktor tidak dapat melanjutkan seperti: karena alasan ekonomi, sosial, jarak sekolah yang jauh dan tidak terjangkau, seperti anak-anak di pedalaman, suku terasing, anak-anak di pesisir pantai, dan daerah perbatasan. PKBM membentuk kelompok belajar dengan jumlah warga belajar rata-rata 40 orang dan dibantu oleh beberapa orang tutor yang memiliki kompetensi khusus untuk pembelajaran di Paket B setara SMP/MTs. Seperti halnya pada system pemeringkatan keesetaraan paket B dikenal dengan istilah level atau darjah, jumlah level atau darjah pada program paket B ada dua yakni darjah 3 terampil 1 dan darjah 4 terampil 2. Program Kesetaraan Paket C, merupakan program rintisan yang dikembangkan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, program kesetaraan paket C ada dibawah binaan Direktorat Pendidikan Kesetaraan. Sebagai sebuah program rintisan, maka belum banyak PKBM yang mengembangkan program ini. Sasaran program paket C adalah, masyarakat lulusan paket B, siswa-siswa lulusan SMP/MTs, serta masyarakat yang telah mengikuti

pendidikan informal yang disetarakan. Begitu pula masyarakat yang putus sekolah atau drop out SMA/MA. Program ini dikembangkan sebagai program pendidikan alternatif atau pilihan masyarakat, karena program paket C dikembangkan lebih profesional dan bersaing dengan kualitas pendidikan sekolah (formal). Program Paket C diintegrasikan dengan berbagai jenis keterampilan yang menjadi pilihan warga belajar atau masyarakat. Program Paket C dikembangkan lebih kompetitif, terutama untuk menjawab berbagai keraguan masyarakat terhadap kualitas pendidikan nonformal.

d. Kelompok belajar usaha

Salah satu tujuan PKBM adalah, meningkatnya kualitas hidup masyarakat atau warga belajar dari sisi ekonomi (income generating). Oleh karena itu salah satu program yang dikembangkan PKBM adalah program kelompok belajar usaha. Melalui proses belajar usaha, kemandirian warga belajar (masyarakat) dalam mengembangkan keterampilan berusaha atau dalam mengembangkan entrepreneurship akan mudah tercapai. Melalui program kejar usaha diharapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap serta kemampuan warga belajar akan semakin bertambah atau semakin meningkat. Terutama bagi warga belajar yang belum memiliki sumber mata pencaharian tetap dan berpenghasilan rendah. Program kelompok belajar usaha (KBU) diperuntukan bagi masyarakat (warga belajar) yang minimal telah bebas buta aksara dan atau selesai program kesetaraan Paket A, juga masyarakat lainnya yang merasa perlu untuk meningkatkan dan memperoleh pengetahuan serta keterampilan baru. Warga belajar dikelompok belajar usaha dapat memilih berbagai alternatif jenis keterampilan dan jenis usaha yang akan dikembangkan dalam kelompoknya sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. Jumlah anggota kelompok yang dipersyaratkan dalam PKBM adalah 3-5 orang, boleh juga dilakukan secara individual (sendiri-sendiri)

tetapi masih dalam satu ikatan kelompok. Setiap kelompok dibimbing oleh 1 orang fasilitator/tutor atau lebih. Jenis-jenis usaha yang dikembangkan dalam kelompok belajar usaha yang termasuk dan dikembangkan dalam PKBM diantaranya adalah: hasil kerajinan tangan home industry (industri rumah tangga), usaha berbagai jenis makanan ringan (kerupuk, keripik), peternakan dan perikanan, usaha pertanian sayuran, buah-buahan, taman/ bunga, usaha pakaian jadi, dan berbagai usaha lainnya yang sesuai dengan kebutuhan rumah tangga.

e. Pengembangan program magang

Pada PKBM Salah satu program yang teridentifikasi dikembangkan PKBM adalah program magang, dalam PKBM magang dibagi dalam dua kegiatan ada magang individual dan ada magang kelompok. Magang individual adalah magang yang dilakukan oleh satu orang warga belajar pada kegiatan-kegiatan pelatihan atau keterampilan tertentu. Sedangkan magang kelompok adalah pemagangnya lebih dari 1 orang biasanya 2 sampai dengan 5 orang. Jenis keterampilan yang dimagangkan sangat bervariasi dan tergantung kebutuhan dan kesiapan warga belajar serta kesiapan PKBM dalam menyiapkan program-program yang sesuai dengan dunia industri. Sasaran magang adalah warga belajar yang minimal sudah terbebas dari buta huruf atau telah menyelesaikan pendidikan dasar (Paket A dan B, SD/MI, SMP/MTs) serta memiliki dasar keterampilan/keahlian tertentu.

Program magang merupakan program khusus yang dikembangkan PKBM, program magang tidak dilaksanakan oleh semua PKBM karena program ini menuntut kesiapan dan kerjasama dengan mitra (industry) atau bengkel kerja tertentu. Program pembelajaran magang, biasa disebut dengan built in learning, apprenticeship, learning by doing atau on the job training/off the job training, dimana program ini dirancang untuk level keahlian yang lebih tinggi. Oleh karenanya program

pembelajaran magang (learning by doing) cenderung lebih mengarah pada pendidikan (education) dari pada pelatihan dalam hal pengetahuan dan dalam melakukan suatu keahlian atau merupakan suatu rangkaian pekerjaan yang saling berhubungan.

Magang (learning by doing) memiliki pengertian sebagai suatu proses belajar dimana seseorang memperoleh dan menguasai keterampilan dengan jalan melibatkan diri dalam proses pekerjaan tanpa atau dengan petunjuk orang yang sudah terampil dalam pekerjaannya.

Program pembelajaran magang memberi pengaruh kuat terhadap sikap kemandirian dan penghasilan kerja. Adapun tujuan magang dalam PKBM adalah:

- (1) Untuk memantapkan penguasaan keterampilan yang diinginkan dan ditekuni untuk dijadikan mata pencaharian oleh warga belajar sebagai pemangang.
- (2) Memperluas dan mempercepat jangkauan pengadaan tenaga-tenaga terampil yang cukup mampu untuk segera berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Magang pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat memiliki ciri sebagai berikut:

- (1) Proses magang adalah permagangan dan pemangang (sumber magang atau orang yang dimagangi) berada dalam tempat permagangan bekerja. Pemangang melihat dan mencoba menggunakan alat yang dipergunakan alat yang dipergunakan sehingga tahu, bisa dan biasa bagaimana mempegunakannya, bagaimana memperbaikinya kalau rusak bagaimana merawatnya, dimana menyimpannya, dimana membelinya serta dibuatnya.
- (2) Proses magang adalah para pemangang sebaiknya bekerja dan belajar, belajarbekerja sesuai dengan urutan pekerjaan yang dikerjakan pemangang. Pemangang dapat memulai belajar-

bekerja dan bekerja-belajar dari mana saja, dari awal, di tengah atau di ujung proses pekerjaan itu.

- (3) Bahwa pemagang belajar-bekerja dan bekerja belajar tidak diawali oleh teori, melainkan langsung praktek, langsung bekerja.
- (4) Dilihat dari sudut sumber magang (permagang). sumber magang tidak perlu orang yang mengetahui teori. Sumber magang atau permagang adalah orang yang pintar dan biasa melaksanakan pekerjaan yang dimagangi.
- (5) Dilihat dari sudut pemagang, pemagang bukan hanya memperoleh pengetahuan, keterampilan, kemahiran dan sikap mental saja melainkan dapat dan terampil melaksanakan pekerjaan. (Mustofa Kamil, 2001)

Proses pembelajaran magang (learning by doing) memiliki beberapa unsur yang perlu mendapatkan perhatian, agar proses pembelajaran tersebut dapat meningkatkan kemandirian warga belajar (pemagang). Unsur-unsur tersebut adalah:

- (1) Pemagang (orang yang belajar bekerja), pada konteks pemagang ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan diantaranya adalah :
- (2) bakat dan minat, hal ini perlu diperhitungkan karena mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan magang, sebab warga belajar yang mengikuti magang, tetapi tidak sesuai dengan bakat yang dimiliki serta minat yang dikendaki, kemungkinan besar akan mengalami kesulitan baik dalam proses belajar bekerja maupun pencapaian tujuan.
- (3) kebutuhan, perlu diperhitungkan, baik yang berkaitan dengan kebutuhan warga belajar pemagang (need assessment), atau kebutuhan pasar kerja, hal ini perlu mendapat perhatian agar tidak mengalami kesulitan setelah selesai mengikuti magang.
- (4) kemampuan dimaksudkan di sini adalah kemampuan mengikuti magang untuk menyadap pengetahuan, keterampilan

dan sikap mental yang diberikan sumber magang, maupun kemampuan untuk membiayai dirinya dalam mengikuti magang, Oleh karena itu bakat dan minat sangat penting sebagai syarat untuk pemagang.

- (5) faktor lain yang perlu dipertimbangkan bagi warga belajar (pemagang) adalah kesediaan untuk mandiri setelah selesai magang belum mempunyai pekerjaan tetap, dan usia yang masih produktif dalam bekerja

Sumber magang (orang yang dimagangi atau permagang). Pada komponen ini ada tiga hal yang perlu mendapatkan perhatian diantaranya adalah :

- (1) Kesediaan
- (2) Kemampuan
- (3) kemauan.

Kesediaan sumber magang untuk dimagangi, menularkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki kepada warga belajar (pemagang), baik secara sukarela maupun dengan imbalan. Apabila sumber magang tidak bersedia dimagangi, tidak bersedia menularkan pengetahuan dan keterampilannya, maka tidak mungkin terjadi proses magang. Kemampuan sumber magang (permagang) harus mahir, terutama dalam menguasai keterampilan serta mahir dalam menularkan keterampilan yang dimilikinya, serta memiliki kemauan untuk menularkan apa yang dimilikinya.

Pola magang, Proses pembelajaran PKBM, baik dalam bentuk magang atau dalam bentuk lainnya, dapat dilakukan melalui berbagai pola yang mendukung terhadap proses dan keberhasilan dari proses tersebut. Untuk lebih jelasnya pola pembelajaran tersebut bisa dilihat dari kebutuhan, tujuan, materi, kurikulum, bidang mata pencaharian, pengelolaan pembelajaran, sumber, fasilitas, persyaratan dan upah.

Berbagai jenis keterampilan yang teridentifikasi dalam kegiatan magang yang dikembangkan PKBM, baik pada magang

individual maupun magang kelompok diantaranya adalah: Perbengkelan (mekanik otomotif, elektronik), computer hardware, menjahit, bordir, usaha perdagangan, saloon (gunting rambut), tata rias rambut dan pengantin, massage (pijat), acupuncture, membatik, home industry, mebeulair dan melukis (gallery).

PKBM telah melakukan kemitraan dengan berbagai industri besar, menengah dan kecil. Kegiatan magang yang diselenggarakan PKBM pada umumnya disesuaikan dengan Kondisi daerah tertentu, seperti Bali, banyak warga belajar yang magang di galery (lukisan), perhotelan atau menjadi guide (pengantar), serta magang pada industri kerajinan khas bali seperti souvenir. Begitu pula di daerah lainnya seperti di Jawa Barat di daerah Tasikmalaya dan Ciamis magang banyak dilakukan pada industri pakaian khususnya bordir. Di Jawa Tengah magang keterampilan banyak dilakukan di industri batik baik yang berskala kecil maupun menengah, jarang sekali ditemukan magang pada industri yang berskala besar yang dilakukan PKBM.

2) Program Non Pendidikan

Di samping program-program pendidikan ada beberapa PKBM yang mengembangkan program di luar program pendidikan nonformal, atau program yang dikembangkan atas permintaan funding atau pemberi donor, program-program ini biasanya lebih diarahkan pada peningkatan usaha/ekonomi atau peningkatan income generating bagi warga belajar dan masyarakat. Beberapa contoh kegiatan yang dikembangkan PKBM diantaranya adalah: kegiatan penggemukan sapi, domba dan kambing, pengembangan sapi perah, pengembangan usaha tanaman hias, pertanian, perikanan, pengembangan usaha rumput laut dll.

Program-program tersebut dikembangkan atas dasar kemampuan kerjasama PKBM dengan berbagai lembaga baik lembaga pemerintah (non Depdiknas) maupun lembaga swasta (NGO) atau LSM lainnya,

baik dalam negeri maupun luar negeri. Dalam mengembangkan program seperti tersebut tadi diperlukan kemampuan khusus dari pihak PKBM, terutama kemampuan dalam menganalisis berbagai persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kemudian diimplementasikan dalam bentuk program yang kompetitif.

Di samping program-program yang mendapatkan anggaran atau dana bantuan dari pihak tertentu (stake holders, public funds), ditemukan pula beberapa PKBM yang mengembangkan program berdasarkan atas kebutuhan warga belajar atau kebutuhan masyarakat, bukan program yang diluncurkan dari pemerintah atau permintaan lembaga lainnya (funding). Program ini biasanya lebih langgeng karena betul-betul murni datang dari permasalahan-permasalahan yang dialami warga belajar atau masyarakat serta dikelola sendiri oleh warga belajar (masyarakat) dalam PKBM. Beberapa program yang teridentifikasi diantaranya adalah program-program yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi contoh pendirian koperasi PKBM, usaha ekonomi keluarga, serta program-program khusus untuk ibu-ibu rumah tangga (pengajian rutin, arisan, kesehatan lingkungan, program kesehatan keluarga), dan berbagai kegiatan lain yang berhubungan dengan pembangunan masyarakat, juga kegiatan olah raga dan kepramukaan. (Kamil, Mustofa. 2011:81-92)

E. Mobilisasi dan Pengelolaan Sumber-Sumber Bagi Pengembangan PKBM

1) Mobilisasi sumber-sumber

Pusat kegiatan belajar masyarakat, sebagai pusat penyelenggaraan berbagai program baik yang diprakarsai pemerintah maupun yang diprakarsai masyarakat (warga belajar) dan pengelola, perlu didukung berbagai sumber agar pengembangan dan pengelolaan program berhasil sesuai dengan tujuan. Kemampuan menggali sumber-sumber baik sumber daya manusia maupun sumber daya material dan finansial sangat bergantung kepada kemampuan kerjasama antara

pengelola/pengembang dengan masyarakat atau dengan pihak-pihak yang memiliki perhatian terhadap PKBM (pemerintah, swasta atau organisasi kemasyarakatan lainnya).

2) Pengelolaan sumber-sumber

Pengelola (provider) PKBM akan mampu mengelola sumber-sumber yang dibutuhkan program apabila didukung oleh kemampuan menyusun strategi yang ampuh dalam menjalankan fungsi manajerial yang dimilikinya. Salah satu pengetahuan yang perlu dimiliki oleh seorang pengelola PKBM dalam mengelola sumber-sumber yang tersedia secara efektif dan efisien adalah pengetahuan dan kemampuan dalam memahami perilaku manusia dan perilaku organisasi. (Datton, and Jackson, 1987). Di samping itu pula dibutuhkan tenaga sumber daya yang berkualitas dan memiliki kompetensi tinggi agar pengelolaan yang dikembangkan survive terhadap perubahan. (Kamil, Mustofa. 2011:93-94)

F. Kerjasama dan Kemitraan

Kerjasama dan kemitraan dalam PKBM adalah hal yang sangat penting, terutama dalam mengembangkan dan membangun program-program. Kerjasama dan kemitraan dapat dilakukan dengan berbagai komponen masyarakat dan pemerintah atau dengan lembaga-lembaga lainnya baik profit maupun non profit atau lembaga-lembaga sosial (funding atau lembaga donor). Kerjasama dan kemitraan dilakukan terutama untuk : mendapatkan bantuan sumberdaya manusia, financial maupun material, atau mungkin untuk berbagai kegiatan lain seperti menempatkan warga belajar disuatu perusahaan untuk magang, atau membangun jaringan kerja sama dalam pengembangan program yang lebih menguntungkan bagi PKBM. Kerjasama dan kemitraan dapat dilakukan dalam konsep saling menguntungkan dan saling mempercayai. PKBM mendapatkan keuntungan dari lembaga yang diajak kerjasama begitu pula lembaga tersebut mendapat keuntungan dari PKBM, keuntungan tidak hanya berupa material atau finansial mungkin dalam

bentuk sosial. Berhasil tidaknya kerjasama dan kemitraan sangat bergantung kepada beberapa hal diantaranya adalah:

- 1) Kualitas program, kualitas program harus menguntungkan bagi lembaga yang diajak kerjasama,
- 2) Tingkat keinovatifan program, apakah program yang dikembangkan inovatif atau tidak, sejalan dengan perkembangan dan perubahan masyarakat terutama perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
- 3) Tingkat fleksibilitas program juga harus menjadi perhitungan,
- 4) Sasaran akhir program, atau lulusan apa yang akan dihasilkan PKBM,
- 5) Kemampuan pengawasan dan pengendalian program, pengawasan dan pengendalian program terutama diarahkan pada mutu proses (proses pembelajaran, proses pengelolaan) dan produk PKBM. Kamil, Mustofa. 2011: 95)

4. Latihan Soal

A. Pilihan Ganda

- 1) Yang merupakan fungsi PKBM (CLC), *kecuali* . . .
 - a. Sebagai learning society
 - b. Sebagai learning exchange
 - c. Sebagai sentra pertemuan berbagai lapisan masyarakat
 - d. Sebagai media politik
- 2) “Tempat masyarakat memperoleh berbagai ilmu pengetahuan dan bermacam ragam keterampilan fungsional sesuai dengan kebutuhannya, sehingga masyarakat berdaya dalam meningkatkan kualitas hidup dan kehidupannya”. Merupakan fungsi PKBM (CLC) sebagai . . .
 - a. Sebagai learning society
 - b. Sebagai learning exchange
 - c. Sebagai sentra pertemuan berbagai lapisan masyarakat
 - d. Sebagai media politik
- 3) Prinsip pengembangan program PKBM (CLC) . . .

- a. Luas
 - b. Relevan
 - c. Seimbang
 - d. Bebas
- 4) "Setiap kompetensi yang dikembangkan dalam program PKBM harus dapat dicapai melalui alokasi waktu yang cukup untuk sebuah proses pembelajaran yang efektif". Prinsip pengembangan program PKBM (CLC) dari . . .
- a. Luas
 - b. Relevan
 - c. Seimbang
 - d. Bebas
- 5) Hal yang perlu menjadi patokan pengembang PKBM (CLC) meliputi..
- a. Sumber daya manusia
 - b. Kemampuan kerjasama
 - c. Anggaran dana
 - d. Semua jawaban benar
- 6) Program PKBM (CLC) dalam Bidang Pendidikan diantaranya . . .
- a. Program keaksaraan fungsional
 - b. Program kesetaraan (Equivalency Education)
 - c. Kelompok arisan
 - d. Kelompok belajar usaha
- 7) Kepanjangan dari PKBM Adalah...
- a. Pusat Konseling Bidang Marketing
 - b. Pusat Kegiatan Budaya Masyarakat
 - c. Pusat Kesetaraan Berbasis Multibudaya
 - d. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
- 8) Dalam program kesetaraan (Equivalency Education) kelompok belajar paket A setara dengan . . .
- a. SD/MI
 - b. SMP/MTS
 - c. SMA/MA

- d. TK
- 9) Dalam program kesetaraan (Equivalency Education) kelompok belajar paket C setara dengan . . .
 - a. SD/MI
 - b. SMP/MTS
 - c. SMA/MA
 - d. TK
- 10) Berhasil tidaknya kerjasama dan kemitraan sangat bergantung kepada beberapa hal diantaranya adalah . . .
 - a. Kualitas program
 - b. Tingkat keinovatifan program
 - c. Tingkat fleksibilitas program
 - d. Semua jawaban benar

B. Essay

- 1) Apa yang kamu ketahui tentang PKBM ?
- 2) Sebutkan fungsi PKBM berdasarkan pada peran ideal PKBM !
- 3) Sebutkan beberapa prinsip dasar yang harus menjadi acuan dalam pengembangan dan menyusun program PKBM !
- 4) Sebutkan beberapa program yang dikembangkan PKBM !
- 5) Sebutkan beberapa hal yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya kerjasama dan kemitraan dalam pelaksanaan PKBM !

Jawaban

A. Pilihan Ganda

- 1) D
- 2) A
- 3) D
- 4) C
- 5) D
- 6) C
- 7) D

- 8) A
- 9) C
- 10) D

B. Essay

- 1) PKBM adalah sebuah lembaga pendidikan yang dikembangkan dan dikelola oleh masyarakat serta diselenggarakan di luar sistem pendidikan formal baik di perkotaan maupun di pedesaan dengan tujuan untuk memberikan kesempatan belajar kepada seluruh lapisan masyarakat agar mereka mampu membangun dirinya secara mandiri sehingga dapat meningkatkan kualitas hidupnya.
- 2) Berdasarkan pada peran ideal PKBM (CLC) ada beberapa fungsi yang dapat dijadikan acuan, dimana fungsi-fungsi tersebut berhubungan satu sama lain secara terintegrasi:
 - Tempat masyarakat belajar (learning society)
 - Tempat tukar belajar (Learning exchange)
 - Pusat pengetahuan dan informasi atau perpustakaan masyarakat
 - Sebagai sentra pertemuan berbagai lapisan masyarakat
- 3) Beberapa prinsip dasar yang harus menjadi acuan dalam pengembangan dan menyusun program PKBM :
 - program yang dikembangkan PKBM harus meluas (broad)
 - Program harus memiliki prinsip keseimbangan (balanced)
 - program yang dikembangkan PKBM harus relevan
 - program yang dikembangkan PKBM harus mampu mengedepankan konsep perbedaan (differentiated)
- 4) Beberapa program yang dikembangkan PKBM :
 - Program keaksaraan fungsional
 - Pengembangan anak dini usia (early childhood)
 - Program kesetaraan (Equivalence Education)
 - Kelompok belajar usaha
 - Pengembangan program magang
- 5) Berhasil tidaknya kerjasama dan kemitraan sangat bergantung kepada beberapa hal diantaranya adalah:

- kualitas program
- tingkat keinovatifan program
- tingkat fleksibilitas program juga harus menjadi perhitungan
- sasaran akhir program, atau lulusan apa yang akan dihasilkan PKBM
- kemampuan pengawasan dan pengendalian program

BAB VIII

Model Coverate Social Responsibility (CSR)

1. Pokok Pembahasan

MODEL CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

2. Tujuan Pembelajaran

Mahasiswa memahami Model Coverate Sosial Responsibility

3. Konteks dan Isi Materi Pembelajaran

Dalam Jurnal Mazahib yang ditulis oleh Darmawati tahun 2014 tentang Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Islam, halaman 125 menjelaskan bahwa Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (selanjutnya dalam artikel ini disebut CSR adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya (namun bukan hanya) perusahaan adalah memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang diantaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, social, dan lingkungan. Oleh karena itu CSR berhubungan erat dengan “pembangunan berkelanjutan”, dimana suatu organisasi, terutama perusahaan, dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan dampaknya dalam aspek ekonomi, misalnya tingkat keuntungan atau deviden, melainkan juga harus menimbang dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari keputusan itu, baik untuk jangka pendek maupun jangka yang lebih panjang.

A. Devinisi Coverate Social Responsibility

Terdapat dua jenis konsep CSR, yaitu dalam pengertian luas dan dalam pengertian sempit. CSR dalam pengertian luas, berkaitan erat dengan tujuan mencapai kegiatan ekonomi berkelanjutan (sustainable economic activity). Keberlanjutan kegiatan ekonomi bukan hanya terkait soal tanggungjawab sosial tetapi juga menyangkut akuntabilitas (accountability) perusahaan terhadap masyarakat dan bangsa serta dunia

internasional. CSR dalam pengertian sempit dapat dipahami dari beberapa peraturan dan pendapat ahli berikut:

- 1) Menurut (Widjaja & Yeremia, 2008) dalam Jurnal Aplikasi Bisnis yang ditulis oleh T. Romi Marnelly tahun 2012 tentang Corporate Social Responsibility (Csr): Tinjauan Teori dan Praktek di Indonesia, halaman 51. CSR merupakan bentuk kerjasama antara perusahaan (tidak hanya Perseroan Terbatas) dengan segala hal (stake-holders) yang secara langsung maupun tidak langsung berinteraksi dengan perusahaan untuk tetap menjamin keberadaan dan kelangsungan hidup usaha (sustainability) perusahaan tersebut. Pengertian tersebut sama dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, yaitu merupakan komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya (Widjaja & Yani, 2006).
- 2) Menurut (Kotler & Nance, 2005) dalam Jurnal Aplikasi Bisnis yang ditulis oleh T. Romi Marnelly tahun 2012 tentang Corporate Social Responsibility (Csr): Tinjauan Teori dan Praktek di Indonesia, halaman 51. Mendefinisikannya sebagai komitmen korporasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar melalui kebijakan praktik bisnis dan pemberian kontribusi sumber daya korporasi. Dari pengertian tersebut tampak bahwa CSR merupakan social responsibility dan perusahaan dalam hubungannya dengan pihak internal dan eksternal perusahaan.

B. Model Corporate Social Responsibility

Menurut Sen dan Bhattacharaya (2001:226) Model Corporate Social Responsibility mengidentifikasi ada enam hal pokok yang termasuk dalam Corporate Social Responsibility (CSR) antara lain:

- 1) Community Support. antara lain dukungan pada program-program pendidikan, kesehatan, kesenian dan sebagainya.

- 2) Diversity, antara lain merupakan kebijakan perusahaan untuk tidak membedakan konsumen dan calon pekerja dalam hal gender, fisik (cacat) atau ke dalam ras-ras tertentu.
- 3) Employee Support, berupa perlindungan kepada tenaga kerja, insentif dan penghargaan serta jaminan keselamatan kerja.
- 4) Environment, menciptakan lingkungan yang sehat dan aman, mengelola limbah dengan baik dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan.
- 5) Non-U.S operations, perusahaan bertanggung jawab untuk memberikan hak yang sama bagi masyarakat dunia untuk mendapat kesempatan kerja antara lain dengan membuka pabrik di luar negeri (abroad operations).

C. Tujuan dan Sasaran Program Corporate Social Responsibility

Dalam buku Corporate Social Responsibility (CSR) Masterplan Rencana Strategi Program CSR 2011-2015 yang disusun oleh Prof. B. Tamam Achda, M.Si. pada tahun 2010 halaman 13-14

- 1) Tujuan program Corporate Social Responsibility perusahaan adalah :
 - a. membangun hubungan yang harmonis dengan seluruh stakeholders dan menciptakan kondisi yang kondusif guna mendukung kelancaran operasional dan pertumbuhan perusahaan.
 - b. memberikan kontribusi dalam kegiatan pembangunan di wilayah operasi perusahaan yang terintegrasi dengan strategi bisnis perusahaan.
 - c. mengembangkan potensi sumberdaya local yang mendorong kemandirian.
 - d. Mengembangkan reputasi perusahaan dengan menjalankan program CSR secara efektif dan berkelanjutan.
- 2) Sasaran program Corporate Social Responsibility perusahaan adalah :
 - a. Terbangunnya hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan seluruh stakeholders, sehingga kegiatan operasional perusahaan berjalan lancar dan aman.

- b. Terbentuknya reputasi dan citra yang baik bagi perusahaan melalui berbagai program CSR yang efektif dan berkelanjutan, sebagai wujud kontribusi perusahaan terhadap perbaikan kondisi social, ekonomi dan lingkungan sekitar.
- c. Terwujudnya kemandirian masyarakat, baik secara social-budaya maupun ekonomi, melalui pengembangan potensi local dan kemitraan dengan berbagai pihak.

D. Manfaat Corporate Social Responsibility

Menurut Susanto (2007) dalam Susiloadi (2008:126) dalam Jurnal Administrasi Bisnis yang ditulis oleh Bahrul Ulum, dkk, tahun 2014 tentang Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Citra halaman 2. Dari sisi perusahaan terdapat berbagai manfaat yang dapat diperoleh dari aktivitas CSR.

- 1) Mengurangi resiko dan tuduhan terhadap perilaku tidak pantas yang diterima perusahaan.
- 2) CSR dapat berfungsi sebagai pelindung akan membantu perusahaan meminimalkan dampak buruk yang diakibatkan suatu krisis.
- 3) Keterlibatan dan kebanggaan karyawan. Karyawan akan merasa bangga bekerja pada perusahaan yang memiliki reputasi baik, secara konsisten melakukan upaya upaya untuk membantu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sekitarnya.
- 4) CSR yang dilaksanakan secara konsisten akan mampu memperbaiki dan mempererat hubungan antara perusahaan dengan para stakeholders-nya.
- 5) Meningkatnya penjualan seperti yang terungkap dalam riset Search Worldwide, konsumen akan lebih menyukai produk produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang konsisten menjalankan tanggung jawab sosialnya sehingga memiliki reputasi yang baik.
- 6) Insentif-insentif lainnya seperti insentif pajak dan berbagai perlakuan khususnya lainnya. Hal ini perlu dipikirkan guna

mendorong perusahaan agar lebih giat lagi menjalankan tanggungjawab sosialnya.

E. Persepsi Perusahaan Terhadap Kegiatan CSR

Keberadaan perusahaan di tengah lingkungan masyarakat berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap lingkungan eksternal yaitu masyarakat. Eksistensi perusahaan berpotensi besar mengubah lingkungan masyarakat, baik ke arah negatif maupun positif. Dengan demikian perusahaan perlu mencegah timbulnya dampak negatif, karena hal tersebut dapat memicu konflik dengan masyarakat, yang selanjutnya dapat mengganggu jalannya perusahaan dan aktifitas masyarakat. Pada dasarnya tidak ada perspektis teoritis atau metodologi kajian yang dapat menjelaskan aktifitas CSR secara memuaskan menjawab semua pertanyaan (Lockett et al.2006, p.12). Namun demikian menurut Frynas (2009), dalam Jurnal Administrasi Bisnis yang ditulis oleh Bahrul Ulum, dkk, tahun 2014 tentang Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Citra halaman 24. terdapat dua teori dan satu perspektif yang berkembang saat ini dalam CSR sebagaimana yang diungkapkan oleh yaitu:

- 1) Teori Stakeholder: menekankan reaksi perusahaan (perseorangan) dalam konteks hubungan dengan stakeholder eksternal. Teori ini menjelaskan respon strategis yang berbeda dari perusahaan terhadap tekanan-tekanan sosial walaupun dalam industri sejenis atau negara yang sama, berdasarkan pada sifat hubungan eksternal.
- 2) Teori Institusional: menekankan daya adaptif perusahaan secara kelembagaan (aturan). Teori ini menjelaskan mengapa perusahaan dari negara atau industri berbeda dalam merespon tekanan sosial dan lingkungan, dan mengapa di negara yang berbeda-beda dari perusahaan multinasional yang sama memilih strategi CSR yang berbeda, sebagai hasil dari pemberlakuan norma atau keyakinan nasional.

- 3) Perspektif Austrian Economics: perspektif ini menyediakan wawasan terhadap upaya strategi aktif CSR dalam perusahaan dengan suatu perspektif kewirausahaan.

Teori Stakeholder dan Teori Institusional dapat membantu menjelaskan bagaimana respon perusahaan terhadap tekanan kondisi sosial eksternal dan lingkungan. Namun demikian gagal untuk menjelaskan pilihan strategi aktif dalam perusahaan, yaitu mengapa perusahaan tertentu menggunakan CSR sebagai sebuah senjata melawan persaingan perusahaan atau mengapa perusahaan tertentu mengeluarkan jutaan dolar dalam pembaruan energy.

Sementara, sebagai sebuah perspektif, pendekatan Austrian Economic dapat dipandang sebagai salah satu alternatif pemikiran yang lebih maju dalam memandang kegiatan CSR. Dalam kaitan dengan kewirausahaan sosial sebagai suatu pendekatan dalam mengatasi persoalan sosial dan kemasyarakatan; maka CSR dapat sebagai sumber pemecahan masalah sosial tersebut.

F. Prinsip-prinsip Tanggungjawab Sosial Perusahaan

Prinsip-prinsip dasar CSR sebagaimana dinyatakan oleh salah seorang pakar CSR dari University of Bath Inggris yaitu Alyson Warhurst Di mana pada tahun 1998 dalam Riau Law Journal Vol. 1 No.1 yang ditulis oleh Ardiana Hidayah tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Dari Perusahaan Perspektif Hukum Positif Di Indonesia halaman 87. Bahwa beliau menjelaskan bahwa ada enam belas prinsip yang harus diperhatikan dalam penerapan CSR yaitu:

1) Prioritas Perusahaan

Perusahaan harus menjadikan tanggung jawab sosial sebagai prioritas tertinggi dan penentu utama dalam pembangunan berkelanjutan. Sehingga perusahaan dapat membuat kebijakan, program, dan praktik dalam menjalankan aktivitas bisnisnya dengan cara lebih bertanggung jawab secara sosial.

2) Manajemen Terpadu

Manajer sebagai pengendali dan pengambil keputusan harus mampu mengintegrasikan setiap kebijakan dan program dalam aktivitas bisnisnya, sebagai salah satu unsur dalam fungsi manajemen.

3) Proses Perbaikan

Setiap kebijakan, program, dan secara berkesinambungan didasarkan atas temuan riset mutakhir dan memahami kebutuhan sosial serta menerapkan kriteria sosial tersebut secara global.

4) Pendidikan Karyawan

Karyawan sebagai stakeholders primer harus ditingkatkan kemampuan dan keahliannya, oleh karena itu perusahaan harus memotivasi mereka melalui program pendidikan dan pelatihan.

5) Pengkajian

Perusahaan sebelum melakukan sekecil apa pun suatu kegiatan harus terlebih dahulu melakukan kajian mengenai dampak sosialnya. Kegiatan ini tidak saja dilakukan pada saat memulai suatu kegiatan, tapi juga pada saat sebelum mengakhiri atau menutup suatu kegiatan.

6) Produk dan Jasa

Suatu perusahaan harus senantiasa berusaha mengembangkan suatu produk dan jasa yang tidak mempunyai dampak negatif secara sosial.

7) Informasi Publik

Memberikan informasi dan bila perlu mengadakan pendidikan terhadap konsumen, distributor, dan masyarakat umum tentang penggunaan, penyimpanan, dan pembuangan atas suatu produk barang dan/ atau jasa.

8) Fasilitas dan Operasi

Mengembangkan, merancang, dan mengoperasikan fasilitas serta menjalankan kegiatan dengan mempertimbangkan temuan yang berkaitan dengan dampak sosial dari suatu kegiatan perusahaan.

9) Penelitian

Melakukan dan/atau mendukung suatu riset atas dampak sosial dari penggunaan bahan baku, produk, proses, emisi, dan limbah yang dihasilkan sehubungan dengan kegiatan usaha. Penelitian itu sendiri dilakukan dalam upaya mengurangi dan/atau meniadakan dampak negatif kegiatan dimaksud.

10) Prinsip Pencegahan

Memodifikasi manufaktur, pemasaran dan/atau penggunaan atas produk barang atau jasa yang sejalan dengan hasil penelitian mutakhir. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya mencegah dampak sosial yang bersifat negatif.

11) Kontraktor dan Pemasok

Mendorong kontraktor dan pemasok untuk mengimplementasikan dari prinsip-prinsip tanggung jawab sosial perusahaan, baik yang telah maupun yang akan melakukannya. Bila perlu menjadikan tanggung jawab sosial sebagai bagian dari suatu persyaratan dalam kegiatan usahanya.

12) Siaga Menghadapi Darurat

Perusahaan harus menyusun dan merumuskan rencana dalam menghadapi keadaan darurat. Dan bila terjadi keadaan berbahaya perusahaan harus bekerja sama dengan layanan gawat darurat (emergency), instansi berwenang, dan komunitas lokal. Selain itu perusahaan berusaha mengenali potensi bahaya yang muncul.

13) Transfer Best Practice

Berkontribusi pada pengembangan dan transfer bisnis praktis sepanjang bertanggung jawab secara sosial pada semua industri dan sektor publik.

14) Memberikan Sumbangan

Sumbangan ini ditujukan untuk pengembangan usaha bersama, kebijakan publik, dan bisnis, lembaga pemerintah dan lintas departemen serta lembaga pendidikan yang akan membantu meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab sosial.

15) Keterbukaan (disclosure)

Menumbuhkembangkan budaya keterbukaan dan dialogis dalam lingkungan perusahaan dan dengan unsur publik. Selain itu perusahaan harus mampu mengantisipasi dan memberikan respons terhadap risiko potensial (potencial hazard) yang mungkin muncul, dan dampak negatif dari operasi, produk, limbah, dan jasa.

16) Pencapaian dan Pelapora

Melakukan evaluasi atas hasil kinerja sosial, melaksanakan audit sosial secara berkala dan mengkaji pencapaian berdasarkan kriteria perusahaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menyampaikan informasi tersebut kepada dewan direksi, pemegang saham, pekerja, dan public

G. Arti Pentingnya CSR

Menurut (Sulistyaningtyas, 2006) dalam Jurnal Aplikasi Bisnis yang ditulis oleh T. Romi Marnelly tahun 2012 tentang Corporate Social Responsibility (Csr):Tinjauan Teori dan Praktek di Indonesia, halaman 53 Berbagai macam faktor yang menjadi penyebab mengapa tanggung jawab sosial menjadi begitu penting dalam lingkup organisasi, diantaranya adalah:

- 1) Adanya arus globalisasi, yang memberikan gambaran tentang hilangnya garis pembatas diantara berbagai wilayah di dunia sehingga menghadirkan universalitas. Dengan demikian menjadi sangat mungkin perusahaan multinasional dapat berkembang dimana saja sebagai mata rantai globalisasi
- 2) Konsumen dan investor sebagai public primer organisasi profit membutuhkan gambaran mengenai tanggung jawab organisasi terhadap isu sosial dan lingkungannya
- 3) Sebagai bagian dalam etika berorganisasi, maka dibutuhkan tanggung jawab organisasi untuk dapat mengelola organisasi dengan baik (lebih layak dikenal dengan good corporate governance)

- 4) Masyarakat pada beberapa negara menganggap bahwa organisasi sudah memenuhi standard etika berorganisasi, ketika organisasi tersebut peduli pada lingkungan dan masalah social
- 5) Tanggung jawab sosial setidaknya dapat mereduksi krisis yang berpotensi terjadi pada organisasi.
- 6) Tanggung jawab sosial dianggap dapat meningkatkan reputasi organisasi.

CSR bukan saja upaya menunjukkan kepedulian sebuah organisasi pada persoalan sosial dan lingkungan, namun juga dapat menjadi pendukung terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan dengan menyeimbangkan aspek ekonomi dan pembangunan sosial yang didukung dengan perlindungan lingkungan hidup.

4. Latihan Soal

A. Pilihan Ganda

- 1) CSR (*corporate social responsibility*) sangat erat kaitannya dengan?
 - a. stop development
 - b. sustainable development
 - c. not sustainable development
 - d. only temporary development
- 2) Sebutkan manfaat CSR bagi perusahaan?
 - a. mereduksi resiko bisnis perusahaan
 - b. melebarkan akses sumber daya
 - c. mereduksi biaya
 - d. semua jawaban benar
- 3) Sejak kapan CSR di kenal?
 - a. zaman tradisional
 - b. zaman modern
 - c. zaman yunani kuno
 - d. semua jawaban benar
- 4) Sebutkan faktor-faktor yang mendorong perusahaan melaksanakan CSR?

- a. faktor internal dan eksternal
 - b. faktor finansial
 - c. faktor lingkungan
 - d. faktor keuntungan
- 5) Keuntungan apa yang di petik perusahaan yang melaksanakan CSR?
- a. jaminan kesehatan
 - b. kerja sama antar perusahaan
 - c. finansial
 - d. di kenal masyarakat
- 6) Pada dasarnya CSR merupakan bentuk jangjung jawab terhadap?
- a. Perusahaan
 - b. Masyarakat
 - c. Pemerintah
 - d. stakeholder
- 7) Sebutkan perusahaan-perusahaan yang memberikan manfaat bagi lingkungan masyarakat melalui program CSR?
- a. Danone (air mineral aqua)
 - b. PT sinde budi sentosa (larutan cap kaki tiga)
 - c. Pertamina
 - d. semua jawaban benar
- 8) Kegiatan CSR akan menjamin kelanjutan bisnis yang di lakukan, hal ini di sebabkan karena?
- a. terjaminnya pasokan bahan baku secara berkelanjutan untuk jangka paanjang
 - b. saling menguntungkan
 - c. terjadi pencemaran lingkungan
 - d. meningkatkan pemeliharaan pasilitas umum
- 9) Sebutkan manfaat CSR bagi perusahaan?
- a. meningkatkan citra perusahaan
 - b. memberikan inovasi bagi perusahaan
 - c. mengembangkan kerja sama dengan perusahaan lain
 - d. semua jawaban benar

10) Manakah yang termasuk tahapan-penerapan CSR?

- a. Pengawasan
- b. Pengorganisasian
- c. Perencanaan
- d. produksi

B. Essay

- 1) Apakah yang dimaksud dengan CSR atau istilahnya dengan tanggung jawab sosial perusahaan?
- 2) Apakah CSR sama dengan community development (Condev)?
- 3) Bagaimana strategi pelaksanaa program CSR lalu apakah yang harus di lakukan oleh perusahaan?
- 4) Apakah CSR wajib bagi perusahaan?
- 5) Apa yang di tuju dari CSR?

Jawaban Soal

A. Pilihan Ganda

- 1) B
- 2) D
- 3) C
- 4) A
- 5) C
- 6) D
- 7) D
- 8) A
- 9) D
- 10) C

B. Essay

- 1) CSR adalah suatu upaya perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dan lingkungan dalam operasi usahanya dan dalam membangun interaksi dengan stakeholder perusahaan. Dengan prinsip triple P (People, Planet, dan Profit - urutan ideal), perusahaan diberikan

tanggung jawab yang menyeluruh dan terintegrasi (saling berkaitan) dalam menjalankan operasi perusahaannya.

- 2) Praktik paling terkenal dari CSR adalah Comdev, walau keduanya tidaklah dapat disamakan. Comdev didefinisikan sebagai upaya sistematis meningkatkan kemampuan masyarakat, terutama kelompok-kelompok paling tidak beruntung, dalam pemenuhan kebutuhan berdasar potensi seluruh sumberdaya yang dapat diaksesnya.
- 3) Kondisional, tergantung kapasitas perusahaan dan seluruh pemangku kepentingannya: dikerjakan sendiri, dilaksanakan bersama mitra, atau diserahkan ke pihak tertentu. Biasanya yang melakukan sendiri mendasarkan pertimbangan adanya kontrol penuh atau karena belum matainya kapasitas manajerial dan teknis para pemangku kepentingan. Di ekstrem lain, perusahaan mungkin berpendapat tidak memiliki kompetensi melakukan kegiatan-kegiatan CSR sendiri, hingga lebih baik diserahkan (disubkontrakkan) ke pihak yang lebih mampu.
- 4) Pada dasarnya, CSR adalah discretionary. Dalam bahasa yang sederhana, kita dapat katakan bahwa perusahaan butuh ber-CSR. mengapa demikian? karena pada dasarnya, perusahaan adalah bagian dari bangunan sosial yang utuh, juga bagian dari lingkungan hidup di sekitarnya. oleh karena itu, setiap tindak-tanduk dari orang-orang di dalam perusahaan tersebut dapat memiliki dampak bagi keberlangsungan kehidupan sosial di sekitarnya. di sisi lain, perusahaan pun memerlukan penerimaan dari publik.
- 5) ketika masyarakat yang kita bantu telah dapat berdiri sendiri. Dengan kata lain, tidaklah bijak jika kita membuahkan program yang melahirkan ketergantungan. Hal ini tidak akan berdampak positif bagi masyarakat itu sendiri, maupun bagi perusahaan dalam jangka panjang. Sementara untuk program berwawasan lingkungan, tentunya juga harus memiliki semangat sustainable development, berorientasi jangka panjang dan berkelanjutan, tidak hanya 'memperbaiki lingkungan' untuk sesaat saja.

BAB IX

Model Pendidikan Berbasis Lingkungan

1. Kompetensi

Model pendidikan berbasis lingkungan.

2. Tujuan Pembelajaran

Mahasiswa memahami model pendidikan berbasis lingkungan.

3. Materi pokok

A. Pendidikan Berbasis Lingkungan

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Proses pembelajaran dialami sepanjang hayat seorang manusia serta dapat berlaku di manapun dan kapanpun. Pembelajaran mempunyai pengertian yang mirip dengan pengajaran, walaupun mempunyai konotasi yang berbeda.

Pembelajaran adalah pemberdayaan potensi peserta didik menjadi kompetensi. Kegiatan pemberdayaan ini tidak dapat berhasil tanpa ada orang yang membantu. Menurut Dimiyati dan Mudjiono (Syaiful Sagala, 2011: 62) pembelajaran adalah kegiatan guru secara terprogram dalam desain instruksional, untuk membuat belajar secara aktif, yang menekankan pada penyediaan sumber belajar.

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 20 dinyatakan bahwa Pembelajaran adalah Proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa Pembelajaran adalah usaha sadar dari guru untuk membuat siswa belajar, yaitu terjadinya perubahan tingkah laku pada diri siswa yang belajar, dimana perubahan itu dengan

didapatkannya kemampuan baru yang berlaku dalam waktu yang relative lama dan karena adanya usaha.

Pendidikan berbasis lingkungan pada dasarnya bermakna memakai lingkungan sebagai basis orientasi pendidikan. Lingkungan memiliki dua peran dasar dalam proses pendidikan yakni:

- 1) lingkungan memberi pembelajaran pada anak didik (*educative environment*);
- 2) lingkungan harus diperbaiki oleh produk pendidikan (*better environment by education*).

Lingkungan dalam proses pendidikan harus memperhatikan dua aspek utama lingkungan, yakni:

- a. lingkungan sosial-budaya yang isinya adalah sistem nilai, perilaku, dan produk budaya masyarakat; dan
- b. lingkungan biofisik yang isinya adalah kondisi tanah air sebagai habitat bangsa Indonesia.

Keseluruhan aspek lingkungan melalui proses pendidikan akan diarahkan menjadi kondisi yang prima dengan standard (baku mutu) yang secara obyektif mampu membawa negeri ini menjadi negeri yang besar dan maju, aman, sejahtera. Pendidikan di negeri ini juga harus *menevaluasi kondisi lingkungan dari waktu ke waktu yang nyata sekali sedang bergerak menjadi semakin rusak dalam semua dimensinya*. Dari analisis kualitas lingkungan Indonesia itulah maka manusia Indonesia sudah harus mulai dibentuk oleh proses pendidikan yang benar dan produk pendidikan semacam itu pulalah yang akan merubah kualitas lingkungan menjadi semakin baik. Proses saling pengaruh mempengaruhi secara timbal balik tersebut akan berjalan berkesinambungan merupakan pusaran spiral bergerak positif menuju kondisi negeri ideal. Pendidikan berproses mengacu pada arahan baku mutu kondisi lingkungan sosial-budaya dan biofisik ideal.

Pendidikan berbasis lingkungan harus memberikan kondisi lingkungan yang edukatif bagi warga negara, khususnya para anak didik,

Untuk bisa membangun sistem pendidikan berbasis lingkungan amatlah diperlukan pembenahan kurikulum, kualitas pengajar yang mendukung, serta penataan lingkungan mikro di sekolah dan lingkungan makronya di habitat luas negeri ini. Proses pembenahan ke arah itu memerlukan peran aktif Presiden dan DPR yang harus bertindak tegas terarah secara benar, tidaklah cukup jika hanya mengharapkan perubahan melalui kebijakan di tingkat Menteri Pendidikan Nasional saja. Berbagai sektor yang jelas terkait dengan pembenahan lingkungan hidup ini harus dilibatkan, seperti departemen agama, ekonomi, kepolisian-kejaksaan-peradilan, dan media masa cetak maupun elektronik. Pembenahan di berbagai lapangan harus segera diintensifkan secara maksimal untuk mengatasi keteringgalan yang telah terjadi selama ini.

B. Model *Environmental Learning*

Model *environmental learning* merupakan model pembelajaran berbasis lingkungan yang dikembangkan agar siswa memperoleh pengalaman lebih berkaitan dengan lingkungan sekitar. Ali (2010:26) menyatakan bahwa, “Model *environmental learning* adalah model pembelajaran yang mengedepankan pengalaman siswa dalam hubungannya dengan alam sekitar, sehingga siswa dapat dengan mudah memahami isi materi yang disampaikan”. Artinya, model pembelajaran *environmental learning* ditujukan agar siswa dapat memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitar.

Model *environmental learning* digunakan dengan tujuan agar siswa dapat dengan mudah berinteraksi dengan bahan pelajaran yang telah disusun dan disesuaikan dengan model pembelajaran. Bahan pembelajaran yang disajikan kepada siswa disusun dengan melibatkan lingkungan sekitar. Artinya, pembelajaran bisa dilakukan tidak hanya di dalam kelas, tetapi juga di luar kelas dengan tujuan agar siswa lebih nyaman dan aktif dalam proses pembelajaran.

Model pembelajaran berbasis lingkungan ini menerapkan sistem permainan dan belajar di luar kelas. Beberapa hal yang harus diperhatikan

dalam model *environmental learning* yaitu isi dan prosedur pembelajaran harus sesuai dengan lingkungan pembelajar, pengetahuan yang diberikan harus memberikan jalan keluar dalam menanggapi lingkungan.

Dapat disimpulkan bahwa model *environmental learning* merupakan model pembelajaran berbasis lingkungan yang bertujuan agar siswa dapat memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Penggunaan model pembelajaran ini dapat dilakukan dengan sistem belajar di luar kelas agar siswa memiliki pengalaman lebih dan proses pembelajaran bisa menyenangkan.

Model pembelajaran dengan pendekatan lingkungan, bukan merupakan pendekatan pembelajaran yang baru, melainkan sudah dikenal dan populer, hanya saja sering terlupakan. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan lingkungan adalah suatu strategi pembelajaran yang memanfaatkan lingkungan sebagai sasaran belajar, sumber belajar, dan sarana belajar.

Pembelajaran dengan pendekatan lingkungan sangat efektif diterapkan di sekolah. Konsep-konsep sains dan lingkungan sekitar siswa dapat dengan mudah dikuasai siswa melalui pengamatan pada situasi yang konkret. Dampak positif dari diterapkannya pendekatan lingkungan yaitu siswa dapat terpacu sikap rasa keingintahuannya tentang sesuatu yang ada di lingkungannya. Seandainya kita renungi empat pilar pendidikan yakni *learning to know* (belajar untuk mengetahui), *learning to be* (belajar untuk menjadi jati dirinya), *learning to do* (Belajar untuk mengerjakan sesuatu) dan *learning to life together* (belajar untuk bekerja sama) dapat dilaksanakan melalui pembelajaran dengan pendekatan lingkungan yang dikemas sedemikian rupa oleh guru.

C. Kelebihan dan Kekurangan Model *Environmental Learning*

Setiap model pembelajaran pasti memiliki kelebihan dan kelemahan yang berbeda. Hal tersebut diklasifikasikan berdasarkan kebutuhan siswa dan kesiapan guru. Adapun yang menjadi kelebihan penggunaan model *environmental learning* adalah siswa tidak bosan

dengan apa yang dipelajari, siswa mendapatkan pengetahuan dan pemahaman dengan cara mengamati sendiri, dan menumbuhkan kecintaan siswa terhadap lingkungan” (Ali, 2010:34). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dengan model *environmental learning* siswa akan lebih memahami dirinya sendiri dan lingkungannya. Selain itu, siswa juga akan memiliki kecintaan terhadap lingkungan sekitar mereka.

Selain memiliki kelebihan, model *environmental learning* juga memiliki kelemahan. Ali (2010:34) mengungkapkan bahwa, “Kelemahan *environmental learning* di antaranya yaitu membutuhkan tenaga yang lebih, dan hanya dapat digunakan dalam beberapa materi pembelajaran”. Tenaga lebih yang dimaksud yaitu keahlian guru dalam menyusun tema materi pembelajaran yang harus disesuaikan dengan lingkungan belajar siswa.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa model *environmental learning* memiliki kelebihan yaitu siswa dapat memahami dirinya sendiri, dan menumbuhkan kecintaan siswa terhadap lingkungan mereka sendiri. Sedangkan kelemahannya, guru disulitkan dengan cara menentukan materi pembelajaran yang harus sesuai dengan lingkungan siswa.

4. Latihan Soal

A. Pilihan Ganda

- 1) proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar penjelasan diatas merupakan pengertian...
 - a. Pengetahuan
 - b. Pendidikan
 - c. Pembelajaran
 - d. Keterampilan
- 2) Proses Pembelajaran dilakukan selama ...
 - a. 1 tahun
 - b. 5 tahun
 - c. 10 tahun

- d. Sepanjang Hidup didunia
- 3) Tujuan Pembelajaran adalah untuk memperoleh ...
 - a. Hasil Belajar
 - b. Perubahan Sikap
 - c. Keterampilan
 - d. Pengetahuan
- 4) Penjelasan mengenai Pembelajaran di jelaskan dalam undang undang..
 - a. UU No 24 Tahun 2005
 - b. UU no 20 Tahun 2003
 - c. UU no 21 tahun 2003
 - d. UU no 23 tahun 2003
- 5) Proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar lainnya dilakukan, kecuali ...
 - a. Lingkungan Sekolah
 - b. Perpustakaan
 - c. Ruang Kelas
 - d. Laboratorium
- 6) Aspek utama dalam lingkungan pendidikan kecuali ...
 - a. Lingkungan Sosial
 - b. Lingkungan keluarga
 - c. Lingkungan budaya
 - d. Lingkungan biofisik
- 7) Model pembelajaran berbasis lingkungan adalah ...
 - a. Model aktif learning
 - b. Model cooperative learning
 - c. Model enviromental learning
 - d. Model Basic learning
- 8) Tujuan dari pembelajaran berbasis lingkungan yaitu ...
 - a. Mempermudah interaksi siswa
 - b. Siswa bosan dalam belajar
 - c. Mempermudah belajar siswa
 - d. Memperbaiki hasil belajar siswa

- 9) Kelebihan dari model pembelajaran berbasis lingkungan kecuali ...
- Siswa tidak bosan belajar
 - Siswa senang belajar
 - Siswa cinta dengan lingkungan
 - Siswa malas untuk belajar
- 10) Kekurangan dari model pembelajaran berbasis lingkungan yaitu ...
- Membuat siswa aktif
 - Siswa menjadi malas belajar
 - Hanya materi tertentu yang dapat digunakan
 - Siswa lebih pasif dalam belajar

B. Essay

- 1) Apa yang dimaksud dengan Pembelajaran..?
- 2) Apa saja peran dasar lingkungan dalam proses pendidikan..?
- 3) Sebutkan aspek utama lingkungan dalam proses lingkungan...?
- 4) Apakah pengertian dari model *environmental learning* menurut Ali (2010:26) ..?
- 5) jelaskan apa kelemahan dari model *environmental learning* menurut Ali (2010:34)..?

Jawaban Soal

A. Pilihan Ganda

- 1) C
- 2) D
- 3) D
- 4) B
- 5) B
- 6) B
- 7) C
- 8) A
- 9) A
- 10) C

B. Essay

- 1) Pembelajaran adalah pemberdayaan potensi peserta didik menjadi kompetensi. Kegiatan pemberdayaan ini tidak dapat berhasil tanpa ada orang yang membantu.
- 2) Lingkungan memiliki dua peran dasar dalam proses pendidikan yakni:
 - a. lingkungan memberi pembelajaran pada anak didik (*educative environment*); dan
 - b. lingkungan harus diperbaiki oleh produk pendidikan (*better environment by education*).
- 3) Lingkungan dalam proses pendidikan harus memperhatikan dua aspek utama lingkungan, yakni:
 - a. lingkungan sosial-budaya yang isinya adalah sistem nilai, perilaku, dan produk budaya masyarakat; dan
 - b. lingkungan biofisik yang isinya adalah kondisi tanah air sebagai habitat bangsa Indonesia
- 4) Ali (2010:26) menyatakan bahwa, “Model *environmental learning* adalah model pembelajaran yang mengedepankan pengalaman siswa dalam hubungannya dengan alam sekitar, sehingga siswa dapat dengan mudah memahami isi materi yang disampaikan”. Artinya, model pembelajaran *environmental learning* ditujukan agar siswa dapat memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitar.
- 5) model *environmental learning* juga memiliki kelemahan. Ali (2010:34) mengungkapkan bahwa, “Kelemahan *environmental learning* di antaranya yaitu membutuhkan tenaga yang lebih, dan hanya dapat digunakan dalam beberapa materi pembelajaran”. Tenaga lebih yang dimaksud yaitu keahlian guru dalam menyusun tema materi pembelajaran yang harus disesuaikan dengan lingkungan belajar siswa.

BAB X

Landasan, Konsep Dasar Dan Implementasi Pendidikan Multikultural Di Indonesia

1. Kompetensi Dasar

- A. Konsep Dasar Pendidikan Multikultural di Indonesia
- B. Landasan Pendidikan Multikultural di Indonesia
- C. Masalah Pendidikan Multikultural di Indonesia
- D. Implementasi Pendidikan Multikultural di Indonesia

2. Tujuan Pembelajaran

Mahasiswa mengetahui “Konsep Dasar, Landasan dan Implementasi Pendidikan Multikultural di Indonesia”.

3. Pembahasan Materi

A. Konsep Dasar Pendidikan Multikultural

Memahami multikulturalisme bukanlah suatu pekerjaan yang sederhana dan mudah, karena di dalamnya terdapat dua pengertian yang kompleks yaitu “multi” yang berarti plural (banyak dengan dimensi perbedaan), “kulturalisme” mengandung pengertian kultur atau budaya. Istilah “pluralisme” mengandung arti bukan hanya mengandung pengertian sekedar pengakuan adanya hal yang berjenis-jenis tetapi juga memiliki implikasi dalam aspek politik, hukum, sosial, dan ekonomi. Pluralisme juga, berkaitan dengan sendi-sendi dan prinsip demokrasi yang berkaitan dengan masyarakat yang terbentuk dari kelompok-kelompok yang berbeda dan memiliki hak hidup dengan budaya masing-masing.

Pendidikan Multikultural secara sederhana dapat diartikan sebagai proses pendidikan dan pengajaran yang dirancang untuk budaya dari beberapa ras yang berbeda dalam suatu sistem pendidikan. Sleeter dan Grant yang disebutkan dalam jurnal yang ditulis oleh Rukiyati, mengemukakan pembelajaran multikultural adalah kebijakan dalam praktik pendidikan yang mengakui, menerima, dan menegaskan perbedaan dan persamaan manusia dikaitkan dengan agama, budaya, gender, ras, kelas sosial.

Sedangkan menurut Liliweri menyatakan pendidikan multikultural (*multicultural education*) merupakan strategi pendidikan yang memanfaatkan keberagaman latar belakang kebudayaan dari peserta didik sebagai salah satu kekuatan membentuk sikap multikultural.

Dari beberapa pendapat di atas, pendidikan multikultural adalah proses dan strategi untuk membentuk sikap setiap orang untuk menghormati orang lain dengan berbagai perbedaan yang ada pada dirinya dari aspek budaya, ras, etnik, agama, kelas sosial, maupun gender dengan yang dimiliki orang lain, karena setiap orang memiliki dimensi yang berbeda dalam pengalaman, pikiran, persepsi, sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Sukoco, (2015), Kebijakan Multikultural di Indonesia, 22 (2), 2-10.

B. Pancasila sebagai Landasan Pendidikan Multikultural

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 3) mengamanatkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya ditegaskan bahwa pendidikan nasional bertujuan mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Tujuan pendidikan nasional tersebut menyiratkan bahwa melalui pendidikan hendak diwujudkan peserta didik yang memiliki berbagai kecerdasan, baik kecerdasan spiritual, emosional, sosial, intelektual maupun kecerdasan kinestetika. Pendidikan nasional memiliki misi mulia (*mission sacre*) terhadap anak didik, yaitu membangun pribadi yang memiliki ilmu pengetahuan, meningkatkan kemampuan teknis, mengembangkan kepribadian yang kokoh dan membentuk karakter yang kuat.

Pendidikan multikultural di Indonesia didasarkan pada filsafat bangsa yaitu Pancasila yang disepakati oleh para pendiri negara dengan semangat multikulturalisme yang terpancar dalam rumusan sila-silanya.

Sebagaimana termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan berlandaskan pada Pancasila. Pernyataan tersebut bukan hanya rangkaian kata-kata saja, melainkan harus diwujudkan dalam praksis pendidikan yang sesungguhnya. Demikian pula dalam hal pendidikan multikultural seyogyanya ada kesejajaran antara praktik dan dasar teoritiknya (praksis) yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Perlu pula dirumuskan dengan jelas apa yang menjadi tujuan pendidikan multikultural di Indonesia.

Tujuan pendidikan multikultural di Indonesia bertujuan untuk membina pribadi-pribadi Indonesia yang mempunyai kebudayaan sukunya masing-masing, memelihara dan mengembangkannya, serta sekaligus membangun bangsa Indonesia dengan kebudayaan Indonesia sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Rukiyati, (2009), Landasan dan Implementasi pendidikan Multikultural di Indonesia, 1 (1), 54-56.

C. Masalah Pendidikan Multikultural di Indonesia

Kemajemukan dalam banyak hal, seperti suku, agama, etnis, golongan, yang seharusnya menjadi hasanah, dan modal untuk membangun seringkali dimanipulasi oleh penguasa untuk mencapai kepentingan politiknya.

Bertolak dari kenyataan itu, kini dirasakan semakin perlunya kebijakan multikultural yang memihak keragaman. Dari kebijakan itu nantinya diharapkan masyarakat dapat mengelola perbedaan yang ada secara positif. Dengan demikian, perbedaan dalam beragam area kehidupan tidak memicu prasangka atau konflik tetapi sebaliknya mendorong dinamika masyarakat ke arah lebih baik. Namun demikian, problema pendidikan multikultural di Indonesia memiliki keunikan yang tidak sama dengan problema yang dihadapi oleh negara lain.

Keunikan faktor-faktor geografis, demografi, sejarah, dan kemajuan sosial ekonomi dapat memicu munculnya problema pendidikan multikultural di Indonesia. Menurut Farida Hanum dalam jurnal yang ditulis oleh Rukiyati menyatakan bahwa tantangan penerapan pendidikan multikultural di Indonesia antara lain :

- 1) Keragaman identitas budaya daerah
- 2) Pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah
- 3) Kurang kokohnya nasionalisme
- 4) Fanatisme sempit
- 5) Konflik kesatuan nasional dan multikultural,
- 6) Kesejahteraan ekonomi yang tidak merata di antara kelompok budaya
- 7) Keberpihakan yang salah dari media massa khususnya televisi swasta dalam memberitakan peristiwa.

D. Implementasi Pendidikan Multikultural di Sekolah

Implementasi pendidikan multikultural dapat dilakukan dalam berbagai aspek dan kelembagaan. Kemudian program prioritas pendidikan multikultural menurut Tilaar, yakni lembaga-lembaga pendidikan sebagai pusat budaya, pendidikan kewargaan, kurikulum pendidikan multikultural, kebijakan perbukuan dan pendidikan guru. Ide-ide Tilaar tersebut merupakan konsep makro yang bersifat menyeluruh. Tetapi, pada kesempatan kali ini penulis membatasi hanya pada implementasi pendidikan multikultural di sekolah, meliputi tiga hal, yaitu kultur sekolah, manajemen sekolah dan proses pembelajaran.

1) Kultur sekolah

Kultur merupakan pandangan hidup yang diakui bersama oleh suatu kelompok masyarakat, yang mencakup cara berfikir, perilaku, sikap, nilai yang tercermin baik dalam wujud fisik maupun abstrak. Kultur ini juga dapat dilihat sebagai suatu perilaku, nilai-nilai, sikap hidup, dan cara hidup untuk melakukan penyesuaian dengan lingkungan, dan sekaligus cara untuk memandang persoalan dan memecahkannya. Oleh karena itu, suatu kultur secara alami akan

diwariskan oleh satu generasi kepada generasi berikutnya. Sekolah merupakan lembaga utama yang yang didesain untuk memperlancar proses transmisi kultural antar generasi tersebut.

2) Manajemen sekolah

Sekolah yang hendak mewujudkan tujuan kesempatan dan kesetaraan dalam belajar sebagaimana yang menjadi fokus pendidikan multikultural haruslah dikelola dengan kepemimpinan kepala sekolah yang kuat. Kepala sekolah tidak hanya sebagai manajer, melainkan lebih dari itu. Ia harus menjadi *leader* (pemimpin). Pemimpin yang baik sebagaimana dinyatakan oleh John Kotler (1996:17-32) yang disebutkan dalam jurnal yang dibuat oleh Rukiyati (2009) adalah yang mempunyai kepekaan terhadap kemendesakan (*sense of urgency*), menciptakan koalisi yang memimpin perubahan, mengembangkan visi dan strategi, mengkomunikasikan visi, memberdayakan bawahan untuk aksi yang luas, mengakumulasikan keberhasilan demi keberhasilan, merayakan keberhasilan dan menghasilkan keberhasilan baru, serta menancapkan pendekatan baru dalam budaya organisasi.

3) Proses pembelajaran

Dimensi penting dalam pendidikan adalah proses pembelajaran. Pembelajaran yang mendukung untuk mencapai tujuan pendidikan multikultural adalah pembelajaran yang berdasarkan pada pedagogik transformatif. Pedagogik transformatif adalah pedagogik yang mengungkapkan kebebasan dan sekaligus keterbatasan manusia, serta menekankan pentingnya partisipasi dengan sesama manusia. Partisipasi dengan sesama manusia menuntut tindakan-tindakan atau kelakuan yang mau menerima sesama manusia sebagaimana adanya. Tanggungjawab, toleransi, kerja sama, saling membantu, saling menghormati pendapat orang lain dan berbagai sikap dan serta kelakuan manusia yang memperkuat kerja sama, merupakan nilai-nilai yang mendapatkan prioritas di dalam proses pembelajaran yang berlandaskan pedagogik transformatif. Di samping itu, pedagogik transformatif juga mengungkapkan keterbatasan manusia, implisit di

dalamnya mengandung pengakuan akan kebesaran Sang Pencipta. Rukiyati, (2009), Landasan dan Implementasi pendidikan Multikultural di Indonesia, 1 (1), 58-62.

4. Latihan Soal

4. Pilihan Ganda

- 1) Yang berarti plural (banyak dengan dimensi perbedaan) pengertian dari

 - a. Multi
 - b. Budaya
 - c. Prioritas
 - d. Pedagogik
 - e. Dimensi

- 2) Pedagogik yang mengungkapkan kebebasan dan sekaligus keterbatasan manusia, serta menekankan pentingnya partisipasi dengan sesama manusia adalah...

 - a. Pedagogik sosial
 - b. Pedagogik multi
 - c. Pedagogik transformative
 - d. Pedagogik culture
 - e. Pedagogik freedom

- 3) Undang –Undang yang mengatur tentang sistem pendidikan adalah....

 - a. Nomor 20 Tahun 2003 pasal 2
 - b. Nomor 20 Tahun 2003 pasal 3
 - c. Nomor 20 Tahun 2003 pasal 4
 - d. Nomor 20 Tahun 2003 pasal 5
 - e. Nomor 20 Tahun 2003 pasal 6

- 4) pembelajaran multikultural adalah kebijakan dalam praktik pendidikan yang mengakui, menerima, dan menegaskan perbedaan dan persamaan manusia dikaitkan dengan agama, budaya, gender, ras, kelas sosial. Pendapat menurut...

 - a. Tilaar

- b. Rukiyati
 - c. John kotler
 - d. Sleeter dan Grant
 - e. Sukoco
- 5) Mengandung arti bukan hanya mengandung pengertian sekedar pengakuan adanya hal yang berjenis-jenis tetapi juga memiliki implikasi dalam aspek politik, hukum, sosial, dan ekonomi pengertian dari...
- a. Culture
 - b. Kulturalisme
 - c. Multi
 - d. Multilisme
 - e. Pluralisme
- 6) Pemimpin yang baik adalah yang mempunyai kepekaan terhadap kemendesakan (sense of urgency), menciptakan koalisi yang memimpin perubahan, mengembangkan visi dan strategi, mengkomunikasikan visi, memberdayakan bawahan untuk aksi yang luas, mengakumulasikan keberhasilan demi keberhasilan, merayakan keberhasilan dan menghasilkan keberhasilan baru, serta menancapkan pendekatan baru dalam budaya organisasi. Pengertian menurut
- a. Sukoco
 - b. John kotler
 - c. Soekarno
 - d. Tilaar
 - e. Rukiyati
- 7) Implementasi pendidikan multikultural dapat dilakukan dalam berbagai aspek dan kelembagaan. Tilaar (2004:224) menawarkan lima program prioritas pendidikan multikultural yang tidak termasuk adalah
- a. Pendidikan sebagai pusat budaya
 - b. Pendidikan kewargaan
 - c. Kurikulum pendidikan multikultural
 - d. Kebijakan perbukuan

- e. Kebijakan kurikulum
- 8) Pendidikan multikultural di Indonesia didasarkan pada filsafat bangsa yaitu....
 - a. UUD 1945
 - b. Undang –Undang
 - c. Pancasila
 - d. Keputusan Presiden
 - e. Keputusan MPR
- 9) Menurut Farida Hanum (2009) menyatakan bahwa tantangan penerapan pendidikan multikultural di Indonesia, yang tidak termasuk adalah
 - a. Keragaman identitas budaya daerah
 - b. Pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah
 - c. Kurang kokohnya nasionalisme
 - d. Kepekaan terhadap kemendesakan
 - e. Fanatisme sempit
- 10) Bertujuan untuk membina pribadi-pribadi Indonesia yang mempunyai kebudayaan sukunya masing-masing, memelihara dan mengembangkannya, serta sekaligus membangun bangsa Indonesia dengan kebudayaan Indonesia sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Termasuk ke dalam tujuan
 - a. Tujuan kultur
 - b. Tujuan pendidikan multikultural
 - c. Tujuan pendidikan
 - d. Tujuan multikultural
 - e. Tujuan pluralisme

5. Essay

- 1) Apa saja tantangan penerapan pendidikan multikultural di Indonesia ?
- 2) Implementasi pendidikan multikultural dapat dilakukan dalam berbagai aspek dan kelembagaan. Tilaar (2004:224) menawarkan lima program prioritas pendidikan multikultural, sebutkan !

- 3) Jelaskan pengertian pemimpin menurut John Kotler ?
- 4) Undang –Undang yang mengatur tentang sistem pendidikan?
- 5) Apa yang dimaksud dengan pedagogic transformative?

Jawaban Soal

A. Pilihan Ganda

- 1) a. Multi
- 2) c. Pedagogik transformative
- 3) b. Nomor 20 Tahun 2003 pasal 3
- 4) d. Sleeter dan Grant
- 5) e. Pluralisme
- 6) b. John kotler
- 7) e. Kebijakan kurikulum
- 8) c. Pancasila
- 9) d. Kepekaan terhadap kemendesakan
- 10) b. Tujuan pendidikan multikultural

B. Essay

- 1) Tantangan penerapan pendidikan multikultural di Indonesia antara lain:
 - a. Keragaman identitas budaya daerah
 - b. Pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah
 - c. Kurang kokohnya nasionalisme
 - d. Fanatisme sempit
 - e. Konflik kesatuan nasional dan multikultural,
 - f. Kesejahteraan ekonomi yang tidak merata di antara kelompok budaya
 - g. Keberpihakan yang salah dari media massa khususnya televisi swasta dalam memberitakan peristiwa
- 2) Lima program prioritas pendidikan multikultural
 - a. lembaga-lembaga pendidikan sebagai pusat budaya
 - b. pendidikan kewargaan
 - c. kurikulum pendidikan multikultural

- d. kebijakan perbukuan dan
- e. pendidikan guru.

- 3) Pemimpin yang baik adalah yang mempunyai kepekaan terhadap kemendesakan (sense of urgency), menciptakan koalisi yang memimpin perubahan, mengembangkan visi dan strategi, mengkomunikasikan visi, memberdayakan bawahan untuk aksi yang luas, mengakumulasikan keberhasilan demi keberhasilan, merayakan keberhasilan dan menghasilkan keberhasilan baru, serta menancapkan pendekatan baru dalam budaya organisasi
- 4) Nomor 20 Tahun 2003 pasal 3
- 5) Pedagogik yang mengungkapkan kebebasan dan sekaligus keterbatasan manusia, serta menekankan pentingnya partisipasi dengan sesama manusia

BAB XI

Perkembangan Pendidikan Multikultur Di Dunia

2. Kompetensi Pembelajaran :

Perkembangan Pendidikan Multikultur di Dunia

3. Tujuan Pembelajaran :

Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami Perkembangan Pendidikan Multikultur di Dunia.

4. Materi Pembahasan :

A. Perkembangan Pendidikan

Perjalanan sejarah pendidikan di dunia telah berlangsung lama sejak zaman Hellenisme (150-500 SM), zaman pertengahan (500-1500), zaman Humanisme atau Reinassance serta zaman Reformasi dan Kontra Reformasi (1600an) hingga tiba pada hari ini di era milenium (2000an) pendidikan terus menunjukkan eksistensinya dan menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. Secara umum, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk peserta didik agar secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.

Pendidikan merupakan bagian dari kegiatan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Oleh sebab itu kegiatan pendidikan merupakan perwujudan dari cita-cita bangsa. Dengan demikian kegiatan pendidikan nasional perlu diorganisasikan dan dikelola sedemikian rupa supaya pendidikan nasional sebagai suatu organisasi dapat menjadi sarana untuk mewujudkan cita-cita nasional.

Secara rinci cita-cita nasional yang terkait dengan kegiatan pendidikan telah dituangkan dalam Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertkwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Selanjutnya prinsip penyelenggaraan pendidikan secara jelas juga telah diuraikan dalam Undang-Undang Sisdiknas tersebut, yaitu tercantum pada pasal 4, bahwa :1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai cultural, dan kemajemukan bangsa, 2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan system terbuka dan multimakna, 3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat, 4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran, 5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat, 6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Adapun fungsi pendidikan nasional sebagaimana tercantum pada Bab II pasal 3 disebutkan bahwa fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, fungsi pendidikan juga dapat dilihat dalam dua perspektif. *Pertama*, secara mikro (sempit), pendidikan berfungsi untuk membantu secara sadar perkembangan jasmani dan rohani peserta didik. *Kedua*, secara makro (luas), pendidikan berfungsi sebagai pengembangan pribadi, pengembangan warga Negara, pengembangan kebudayaan dan pengembangan bangsa.

B. Pendidikan Multikultural

Pendidikan multikultural adalah merupakan suatu gerakan pembaharuan dan proses untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang setara untuk seluruh siswa. Sebagai sebuah gerakan pembaharuan,

istilah pendidikan multicultural masih dipandang asing bagi masyarakat umum, bahkan penafsiran terhadap definisi maupun pengertian pendidikan multikultural juga masih diperdebatkan di kalangan pakar pendidikan. Beberapa aspek yang menjadi kunci dalam melaksanakan pendidikan multikultural dalam struktur adalah tidak adanya kebijakan yang menghambat toleransi, termasuk tidak adanya penghinaan terhadap ras, etnis, dan jenis kelamin.

Hal tersebut juga harus menumbuhkan kepekaan terhadap perbedaan budaya, diantaranya mencakup pakaian, musik, makanan khas, dan lain sebagainya seperti konsep multikulturakisme itu sendiri yang menekankan pentingnya memandang dunia dari bingkai referensi budaya yang berbeda, dan mengenali serta menghargai kekayaan ragam budaya di dalam Negara dan di dalam komunitas global.

Multikulturakisme menegaskan perlunya menciptakan sekolah di mana berbagai perbedaan yang berkaitan dengan ras, etnis, gender, orientasi seksual, keterbatasan, dan kelas sosial diakui dan seluruh siswa dipandang sebagai sumber yang berharga untuk memperkaya proses belajar mengajar. Selain itu juga memberikan kebebasan bagi tiap individu atau kelompok dalam merayakan hari-hari besar umat beragama serta memperkuat sikap agar merasa butuh terlibat dalam pengambilan keputusan secara demokratis.

1) Pendapat Ahli

Menurut salah seorang ahli pendidikan multikultural di Amerika, James A. Banks, pendidikan multikultural bermula dari ide bahwa “semua murid, apapun latar belakang jenis kelamin, etnis, ras, budaya, kelas sosial, agama, atau perkecualiannya, harus mengalami kesederajatan pendidikan di sekolah-sekolah.” Banks juga mendefinisikan pendidikan multikultural sebagai pendidikan untuk “*people of color*” yang telah dikutip dari Yangin (2010:24) yang mengartikan bahwa pendidikan multikultural ingin mengeksplorasi perbedaan sebagai keniscayaan (anugerah Tuhan). Kemudian,

bagaimana kita mampu menyikapi perbedaan tersebut dengan penuh toleran dan semangat egaliter.

Berdasarkan ahli pendidikan multikultural di Indonesia, H.A.R Tilaar mengenai pendidikan multikultural adalah merupakan proses pengembangan sikap tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mmendewasakan manusia melalui upaya pengajaran, pelatihan, proses, perbuatan, dan cara-cara mendidik yang menghargai pluralitas dan heterogenitas secara humanistik. Beliau juga mengemukakan bahwa pendidikan adalah sebuah konsep (*set of believe*) dan penjelasan yang mengakui dan menilai pentingnya keragaman budaya dan etnis di dalam membentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, kesempatan-kesempatan pendidikan dari individu, kelompok maupun negara.

Seperti pendapat Andersen dan Cusher (1994) sebagaimana dikutip Mahfud (2008), bahwa pendidikan multicultural diartikan sebagai pendidikan mengenai keragaman kebudayaan. Sedangkan Hernandez (1989), mengartikan pendidikan multikultural sebagai perspektif yang mengakui realitas sosial, politik, dan ekonomi yang dialami oleh masing-masing individu dalam pertemuan manusia yang kompleks dan beragam secara kultur, dan merefleksikan pentingnya budaya, ras, seksualitas dan gender, etnisitas, agama, status social, ekonomi, dan pengecualian-pengecualian dalam proses pendidikan.

Ahli lain, Sleeter dan Grant (2007, 2009) dan Smith (1998) sebagaimana dikutip Zamroni (2011) mendefinisikan pendidikan multikultural sebagai suatu pendekatan progresif untuk melakukan transformasi pendidikan yang secara holistik memberikan kritik dan menunjukkan kelemahan-kelemahan, kegagalan-kegagalan dan diskriminasi yang terjadi di dunia pendidikan (Zamroni, 2011: 144).

2) Nilai-Nilai Pendidikan Multikultural

Menurut Prof. Bennett yang merumuskan inti pendidikan multikultural sebagai berikut:

- a. Apresiasi terhadap adanya kenyataan pluralitas budaya di masyarakat,
- b. Pengakuan terhadap harkat dan hak asasi manusia,
- c. Pengembangan tanggung jawab masyarakat dunia, dan
- d. Pengembangan tanggung jawab manusia terhadap bumi.

3) Paradigma Pendidikan Multikultural

Paradigma pendidikan multikultural yang ditawarkan Zamroni (2011) adalah sebagai berikut :

- a. Pendidikan multikultural adalah jantung untuk menciptakan kesetaraan pendidikan bagi seluruh warga masyarakat.
- b. Pendidikan multikultural bukan sekedar perubahan kurikulum atau perubahan metode pembelajaran.
- c. Pendidikan multikultural mentransformasi kesadaran yang memberikan arah kemana transformasi praktik pendidikan harus menuju.
- d. Pengalaman menunjukan bahwa upaya mempersempit kesenjangan pendidikan salah arah yang justru menciptakan ketimpangan semakin membesar.
- e. Pendidikan multikultural bertujuan untuk berbuat sesuatu, yaitu membangun jembatan antara kurikulum dan karakter guru, pedagogi, iklim kelas, dan kultur sekolah guna membangun visi sekolah yang menjunjung kesetaraan.

Menurut James A. Banks (2002 : 14), pendidikan multikultural adalah cara memandang realitas dan cara berpikir, dan bukan hanya konten tentang beragam kelompok etnis, ras, dan budaya. Secara spesifik, Banks menyatakan bahwa pendidikan multikultural dapat dikonsepsikan atas lima dimensi, yaitu :

- (1) Integrasi konten ; pepaduan konten menangani sejauh mana guru menggunakan contoh dan konten dari beragam budaya dan kelompok untuk menggambarkan konsep, prinsip,

generalisasi serta teori utama dalam bidang mata pelajaran atau disiplin mereka.

- (2) Proses penyusunan pengetahuan; sesuatu yang berhubungan dengan sejauh mana guru membantu siswa paham, menyelidiki, dan untuk menentukan bagaimana asumsi budaya yang tersirat, kerangka acuan, perspektif dan prasangka di dalam disiplin mempengaruhi cara pengetahuan disusun di dalamnya.
- (3) Mengurangi prasangka; dimensi ini fokus pada karakteristik dari sikap rasial siswa dan bagaimana sikap tersebut dapat diubah dengan metode dan materi pengajaran.
- (4) Pedagogi kesetaraan; pedagogi kesetaraan ada ketika guru mengubah pengajaran mereka ke cara yang akan memfasilitasi prestasi akademis dari siswa dari berbagai kelompok ras, budaya, dan kelas sosial. Termasuk dalam pedagogi ini adalah penggunaan beragam gaya mengajar yang konsisten dengan banyaknya gaya belajar di dalam berbagai kelompok budaya dan ras.

Dalam pandangan Zamroni (2011), pendidikan multikultural diusulkan untuk dapat dijadikan instrument rekayasa sosial lewat pendidikan formal, artinya institusi sekolah harus berperan dalam menanamkan kesadaran hidup dalam masyarakat multikultural dan mengembangkan sikap tenggang rasa dan toleransi untuk mewujudkan kebutuhan serta kemampuan bekerjasama dengan segala perbedaan yang ada.

Sekolah harus dipandang sebagai suatu masyarakat, masyarakat kecil; artinya, apa yang ada di masyarakat harus ada pula di sekolah. Perspektif sekolah sebagai suatu masyarakat kecil ini memiliki implikasi bahwa siswa dipandang sebagai suatu individu yang memiliki karakteristik yang terwujud dalam bakat dan minat serta aspirasi yang menjadi hak siswa. Pada level sekolah, dengan adanya berbagai perbedaan yang dimiliki

masing-masing individu, maka sekolah harus memperhatikan bahwa setiap siswa memiliki kebutuhan perkembangan yang berbeda-beda, termasuk kebutuhan personal dan sosial, kebutuhan vokasi dan karier, kebutuhan psikologi dan perkembangan moral spiritual. Pada level masyarakat, yang perlu dipenuhi kebutuhannya adalah mencakup: kebutuhan akademik, kebutuhan psikologis, kebutuhan kebersamaan, dan kebutuhan rasa aman.

Pendidikan harus dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Sekolah harus dapat dijadikan tempat yang aman, memiliki suasana kekerabatan dan juga terdapat semangat saling dukung mendukung. Berkaitan dengan itu, maka proses pembelajaran diarahkan pada pengembangan individu secara utuh yang mencakup intelektual, sosial, dan moral spiritual. Tekanan dan dorongan siswa untuk bekerja keras tidak hanya bersifat *ekstrinsik*, bahkan lebih dari itu harus ditekankan pada penggunaan *instrinsik motivation*.

Dari perspektif hasil pembelajaran, pendidikan multikultural memiliki tiga sasaran yang dikembangkan pada diri setiap siswa :

- a. Pengembangan identitas kultural yakni merupakan kompetensi yang dimiliki siswa untuk mengidentifikasi dirinya dengan suatu etnis tertentu. Kompetensi ini mencakup pengetahuan, pemahaman dan kesadaran akan kelompok etnis dan menimbulkan kebanggaan serta percaya diri sebagai warga kelompok etnis tertentu.
- b. Hubungan interpersonal. Yakni, kompetensi untuk melakukan hubungan dengan kelompok etnis lain, dengan senantiasa mendasarkan pada persamaan dan kesetaraan, serta menjauhi sifat syakwasangka dan stereotip.

- c. Memberdayakan diri sendiri. Yakni suatu kemampuan untuk mengembangkan secara terus menerus apa yang dimiliki berkaitan dengan kehidupan multikultural.

Secara detail, kompetensi kultural mencakup berbagai hal sebagai berikut:

- a. Kompetensi individu untuk menerima, menghormati dan membangun kerjasama dengan siapapun juga yang memiliki perbedaan-perbedaan dari dirinya.
- b. Kompetensi kultural merupakan hasil dari kesadaran atas pengetahuan dan “bias kultural” yang dimilikinya atau sebagai faktor yang mempengaruhi perbedaan kultur
- c. Proses pengembangan kompetensi kultural memerlukan pengembangan pengetahuan, ketrampilan, sikap dan perilaku yang memungkinkan seseorang memahami dan berinteraksi secara efisien dengan orang yang memiliki perbedaan kultur.

C. Urgensi Pendidikan Multikultur

Multikulturalisme pada hakikatnya adalah sebuah konsep untuk membangun kekuatan sebuah bangsa yang terdiri dari berbagai latar belakang etnik, agama, budaya dan bahasa tadi, dengan menghargai dan menghormati hak-hak sipil mereka, termasuk hak-hak kelompok minoritas. Pendidikan multikulturalisme adalah upaya-upaya pendidikan yang dilakukan untuk memberikan pemahaman dan wawasan kepada peserta didik tentang perbedaan etnis, agama, bahasa, status sosial, gender, dan perbedaan lainnya melalui semua jenis mata pelajaran.

Pendidikan multikulturalisme memiliki empat makna: *pertama*, pengajaran tentang keragaman budaya dengan pendekatan asimilasi kultural; *kedua*, pengajaran tentang berbagai pendekatan dalam tata hubungan sosial; *ketiga*, pengajaran pluralisme tanpa membedakan strata sosial dalam masyarakat; dan *keempat*, pengajaran tentang refleksi keragaman untuk meningkatkan pluralisme dan kesamaan (egalitarianisme). Tujuannya adalah agar setiap warga negara memberikan

penghargaan terhadap keragaman, dan memberikan hak-hak yang sama bagi etnik minoritas, dalam upaya memperkuat persatuan dan kesatuan, identitas nasional dan citra bangsa di mata dunia internasional.

Oleh sebab itu materi yang disajikan dalam pendidikan multikultural adalah tentang hak-hak individual dan hak-hak kolektif dari setiap anggota masyarakat, yakni bahwa setiap individu termasuk dari etnik minoritas memiliki kebebasan untuk berkreasi, berkarya, bahkan untuk mengembangkan dan memajukan budayanya, tentang keadilan dan hak-hak minoritas, jaminan minoritas untuk bisa berbicara dan keterwakilan aspirasinya dalam struktur pemerintahan atau legislatif, toleransi dan batas-batasnya.

5. Latihan Soal

A. Pilihan Ganda

- 1) “pengakuan harkat dan hak asasi manusia” adalah nilai nilai pendidikan multikultural menurut?
 - a. Prof. Bennet
 - b. James a banks
 - c. HAR Tilaar
 - d. Andersen
- 2) Dari beberapa paradigma di bawah ini mana yang tidak termasuk dalam paradigma pendidikan multikural?
 - a. jantung untuk menciptakan masyarakat.
 - b. Mentransformasi kesadaran yang memberikan arah kemana transformasi praktik pendidikan menuju
 - c. Bukan sekedar perubahan kurikulum atau perubahan metode
 - d. Pengakuan terhadap harkat dan hak asasi manusia
- 3) Sejarah pendidikan di dunia telah berlangsung sejak zaman? Kecuali.
 - a. Zaman hellenisme
 - b. Zaman pertengahan
 - c. Zaman humanisme
 - d. Zaman batu

- 4) Pendidikan multikultural dapat dikonsepsikan atas lima dimensi mana saja yang termasuk?
- Integrasi konten
 - Proses penyusunan pengetahuan
 - Pedagogi kesetaraan
 - Semuanya benar
- 5) Mana yang termasuk dalam prinsip penyelenggaraan pendidikan?
- Dilakukan secara demokratis
 - Diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan
 - Diselenggarakan dengan memberi keteladanan
 - Semuanya benar
- 6) Pendidikan multikultural memiliki 4 makna, kecuali?
- Pengajaran tentang keagamaan budaya
 - Pengajaran tentang berbagai pendekatan hubungan sosial
 - Pengajaran tentang refleksi keragaman
 - Pengajaran dalam berkarya
- 7) Menurut James A. Banks pendidikan multikultural adalah cara memandang realitas dan cara berfikir tentang beragam kelompok berdasarkan
- Etnis
 - Semua benar
 - Ras
 - Budaya
- 8) Siapa yang berpendapat bahwa pendidikan multikultural diartikan sebagai pendidikan keagamaan kebudayaan.
- Hernandez
 - Andrean & Cusher
 - Grant
 - Smith
- 9) Siapa yang berpendapat bahwa multikultural sebagai “people of color”
- James A. Banks
 - Zamroni

- c. mahfud
- d. sleeter

10) Pendapat yang diusulkan bahwa pendidikan multikultural dapat dijadikan instrumen rekayasa

- a. Hernandez
- b. Sleeter
- c. Zamroni
- d. Smith

B. Essay

- 1) Apa yang dimaksud dengan paradigma pendidikan multikultural?
- 2) Sebutkan nilai-nilai multikultur pendidikan!
- 3) Apa pentingnya pendidikan multikultural?
- 4) Tuliskan pendapat ahli pendidikan multikultur tentang pengertian pendidikan multikultur itu sendiri!
- 5) Apa pendapat Anda mengenai pendidikan multikultur? Dan bagaimana cara Anda menyikapi multikulturalisme yang ada di lingkungan tinggal Anda?

Jawaban Soal

A. Pilihan Ganda

- 1) A
- 2) D
- 3) D
- 4) D
- 5) D
- 6) D
- 7) B
- 8) B
- 9) A
- 10) C

B. Essay

- 1) Paradigma pendidikan multikultural adalah jantung untuk menciptakan kesetaraan pendidikan bagi masyarakat
- 2) nilai-nilai multikultur pendidikan:
 - a. Apresiasi terhadap adanya pluralisme di masyarakat
 - b. Pengakuan terhadap harkat dan hak asasi manusia
 - c. Pengembangan tanggung jawab manusia terhadap bumi
 - d. Pengembangan tanggung jawab masyarakat dunia
- 3) Karena Multikulturalisme adalah sebuah konsep untuk membangun sebuah bangsa yang terdiri dari berbagai latar belakang etnik, agama, budaya, dan bahasa, maka dari itu manusia diharuskan agar bisa menerapkan pendidikan multikultur sebagai bentuk pengakuan bahwa hal tersebut penting dalam keseimbangan kehidupan
- 4) H.A.R Tilaar mengatakan bahwa proses pengembangan sikap tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran, pelatihan, dan proses mendidik yang menghargai pluralitas
- 5) (Argumentasi pribadi)

DAFTAR PUSTAKA

- Achda B. Tamam, Dkk. (2010). Corporate Social Responsibility (CSR) Masterplan Rencana Strategi Program CSR 2011-2015: 13-14.
- Arsyad dan Sulfemi, Wahyu Bagja. (2014). Minat Siswa Tentang Keadministrasian dengan Hasil Belajar Administrasi Perkantoran. *Edu tecno* 9 (2), 40-50
- Arsyad dan Sulfemi, Wahyu Bagja. (2018) Metode Role Playing Berbantu Media Audio Visual Pendidikan dalam Meningkatkan Belajar IPS. *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Indonesia*. 3 (2). 41 – 46
- Banks, James A. (ed.). 1989. *Multicultural Education : Issues and Perspectives*. Boston-London: Allyn and Bacon Press.
- Banks, James A. 1993. *Teaching Strategies for Ethnic Studies*. Boston: Allyn and Bacon Inc.
- Banks, James A. 2002. *An Introduction to Multicultural Education*, Boston-London: Allyn and Bacon Press.
- Banks, James A. 2007. *Educating Citizen in Multicultural Society. Second Edition*. New York: Teachers College and Columbia University
- Buchori, Mochtar (2009). “*Evolusi Pendidikan di Indonesia*”. Yogyakarta: Insistpress
- Badar, Dadan Samsul dan Sulfemi, Wahyu Bagja. (2014). Pengaruh Rasa Percaya Diri dan Motivasi Berprestasi Terhadap Kinerja di Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor. *Edu tecno*. 10 (1), 1-10
- Darmawati, 2014. *Jurnal Mujahib: Vol. XIII, No 2. Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Islam*.
- Fajartriani, Tia dan Sulfemi, Wahyu Bagja. (2014). Pengaruh Motivasi Kerja Guru dan Iklim Organisasi Terhadap Kinerja Guru SMA Negeri di Kecamatan Cigudeg. *Edu tecno*. 8 (1), 17-26.
- Hermianto, dkk. 2011. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara
- Hidayah Ardiana. 2017. *Riau Law Journal Vol. 1 No.1. Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Dari Perusahaan Perspektif Hukum Positif Di Indonesia*.
- Idrus Ali, (2009) *Manajemen Pendidikan Global: Visi, Aksi, dan Adaptasi*. Jakarta: Gaung Persada
- Johar. 2003. *Pendidikan Strategik, Alternatif untuk Pendidikan Masa Depan*, Yogyakarta: LESFI Hernandez, Hilda. 1989. *Multicultural Education: A Teacher Guide to Linking Context, Process, and Content*, New Jersey and Ohio: Prentice Hall
- Kuswata, wihardit. 2013. Pendidikan Multikultur. *Jurnal Pendidikan* 1.2:101

- Nugraha, Andi.2009.Pengembangan Masyarakat Pembangunan Melalui Pendampingan Sosial Dalam Konsep Pemberdayaan Dibiidang Ekonomi.*Jurnal Ekonomi Modern* 5.2.119
- Kaawoan, Selviyanti.2014.Membangun Kuktur Masyarakat Sekolah.*Jurnal Irfani* 10.1.50
- Kamil, Mustofa. 2011. *Pendidikan Non Formal*. Bandung : Alfabeta
- Marnelly T. Romi. 2012. Jurnal Aplikasi Bisnis. Corporate Social Responsibility (Csr):Tinjauan Teori Dan Praktek Di Indonesia.
- Maulana,amin.2014.Pembangunan Pendidikan.*Jurnal Pendidikan* 1.34
- Mulyasa. E. (2002). *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung. Rosadakarya.
- Mahfud, Choirul. 2016. *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Mahfud, Choirul. 2008. *Pendidikan Multikultura*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- M. Ainul Yaqin. 2005. *Pendiidkan Multikultural: Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Nurhasanah.2017.Hubungan Peran Masyarakat Terhadap Sekolah.*Jurnal Manajemen Masyarakat*.1.1.62:64.
- Nurhasanah.2017.Hubungan Peran Masyarakat Terhadap Sekolah.*Jurnal Manajemen Masyarakat*.1.1.66-68
- Nurkolis. (2002). *Manajemen Berbasis Sekolah*. Jakarta. PT. Grasindo
- Nurzaman Kadar, (2014) *Manajemen personalia*. Bandung: Pustaka Setia
- Rukiyati, (2009), Landasan dan Implementasi pendidikan Multikultural di Indonesia, 1 (1), 54-56.
- Rukiyati, (2009), Landasan dan Implementasi pendidikan Multikultural di Indonesia, 1 (1), 58-62.
- Setiadi Elly M, DKK, (2006) *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta: Kencana Media Grup
- Sulfemi, Wahyu Bagja. (2007). Ilmu Sosial Dasar. Bogor : STKIP Muhamadiyah Bogor
- Sulfemi, Wahyu Bagja. (2015). Pengaruh Metode Pembelajaran Kontekstual dan Penggunaan Media Video Pendidikan Terhadap Hasil Belajar IPS. *Edu tecno* 13 (2), 1-10
- Suparlan, 2013. *Budaya Manajemen Berbasis Sekolah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sholichah, Aas Siti. 2013. Teori Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Islam* 18.1. 4
- Suryanti, Eny Wahyu. (tahun). Perkembangan Budaya Organisasi di Sekolah. *Jurnal ilmiah* 19. 1. 3-4.
- Sukoco, (2015), Kebijakan Multikultural di Indonesia, 22 (2), 2-10.

- Sulfemi, Wahyu Bagja. (2013). Pengaruh Persepsi Siswa atas Kemampuan Pedagogik Guru dan Motivasi Belajar Siswa Terhadap Prestasi Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial Siswa (Survei di SMK Swasta Kabupaten Bogor). *Edutecno*. 7 (2), 17-26.
- Sulfemi, Wahyu Bagja. (2014). Pengaruh Motivasi dan Lingkungan Sekolah Terhadap Prestasi Belajar Sejarah Di SMA Negeri Leuwilang Kabupaten Bogor. *Fascho : Kajian Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan* 9 (2), 42-52.
- Sulfemi, Wahyu Bagja. (2015). *Challenges Of Indonesian Teacher Competence in dealing with Asean Economic Cummunity (AEC)*. *Engglis Forum*. 1 (1), 69-79
- Sulfemi, Wahyu Bagja. (2015). Kemampuan Pedagogik Guru. *Prosiding Seminar Nasional STKIP Muhammadiyah Bogor* . 1 (1), 71-83
- Sulfemi, Wahyu Bagja. (2016). Hubungan antara Persepsi Guru pada Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Motivasi Guru dengan Kinerja guru dalam Proses Pembelajaran di SMA Negeri 1 Ciomas. *Fascho : Kajian Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan*, 5 (1), 36-55.
- Sulfemi, Wahyu Bagja. (2016). *Perundang-Undangan Pendidikan*. Bogor : Program Studi Administrasi Pendidikan STKIP Muhammadiyah Bogor
- Sulfemi, Wahyu Bagja. (2017). Analisis Pengaruh Motivasi Dan Disiplin Terhadap Kinerja Guru (Studi Kasus di SMA Negeri 1 Pamijahan Kabupaten Kabupaten Bogor). *Prosiding Seminar Nasonal STKIP Muhammadiyah Bogor*. 1 (1), 342-357.
- Sulfemi, Wahyu Bagja. (2018). Pengaruh Kemampuan Pedagogik Guru dengan Hasil Belajar IPS. *Edutecno* 17 (1), 1-10
- Sulfemi, Wahyu Bagja dan Hilga Minati. (2018). Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik Kelas 3 SD Menggunakan Model Picture And Picture dan Media Gambar Seri. *JPSD*. 4 (2), 228- 242.
- Sulfemi, Wahyu Bagja dan Desmiati, Zulaicha. (2018). Model Pembelajaran Missouri Mathematics Project Berbantu Media Relief Experience dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa. *Jurnal Pendas Mahakam* . 3 (3), 232-245.
- Sulfemi, Wahyu Bagja. (2018). *Manajemen Kurikulum di Sekolah*. Bogor : STKIP Muhammadiyah Bogor
- Sulfemi, Wahyu Bagja. (2018). Pengaruh Disiplin Ibadah Sholat, Lingkungan Sekolah, dan Intelegensi Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam. *Edukasi: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan*. 16 (2), 166-178.
- Sulfemi, Wahyu Bagja dan Nurhasanah. (2018). Penggunaan Metode Demonstrasi dan Media Audio Visual Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik Mata Pelajaran IPS. *Jurnal Pendas Mahakam*. 3 (2). 151-158

- Sulfemi, Wahyu Bagja dan Setianingsih. (2018), Penggunaan Tames Games Tournament (TGT) Dengan Media Kartu Dalam Meningkatkan Hasil Belajar. *Journal of Komodo Science Education (JKSE. 1 (1), 1-14*
- Sulfemi, Wahyu Bagja. (2019). Asosiatif Layanan Tenaga Perpustakaan Sekolah dengan Motivasi Membaca Siswa di Kabupaten Bogor . *Edu tecno. 19 (2), 1-10.*
- Sulfemi, Wahyu Bagja dan Mayasari, Nova. (2019). Peranan Model Pembelajaran Value Clarification Technique Berbantuan Media Audio Visual Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPS. *Jurnal Pendidikan. 20 (1). 53-68.*
- Tilaar, H.A.R. 2002. *Pendidikan, Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia*. Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- Triwiyanto Teguh, (2014) *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Theresia, Aprilia, dkk (2014). *Pembangunan berbasis masyarakat*. Bandung : Alfabeta
- Umaedi. Dkk. (2008).*Manajemen Berbasis Sekolah*. Jakarta. Universitas Terbuka.
- Ulum Bahrul, Dkk. 2014. *Jurnal Administrasi. Jurnal Administrasi Bisnis. Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Citra.*
- Wibowo,2016.*Budaya Organisasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 15-67
- Wahyudin Din, DKK (2010) *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: Universitas Terbuka
- Widodo, Hendro. 2017. Manajemen Perubahan Budaya Sekolah. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam. 2. 2. 288.*
- Widodo, Hendro. 2017. Manajemen Perubahan Budaya Sekolah. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam. 2. 2. 293-295*
- Widodo, Hendro. 2017. Manajemen Perubahan Budaya Sekolah. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam. 2. 2. 300-301*
- Yusfiriadi dan Sulfemi, Wahyu Bagja. (2012). Penyelewangan Dana Dalam Dunia Pendidikan. *Fascho 1 (1), 1-9.*
- Zamroni, 2011. *Pendidikan Demokrasi pada Masyarakat Multikultural*. Yogyakarta: Gapin Kalam Utama.